Kerja sama antara:

Dengan dukungan dari:







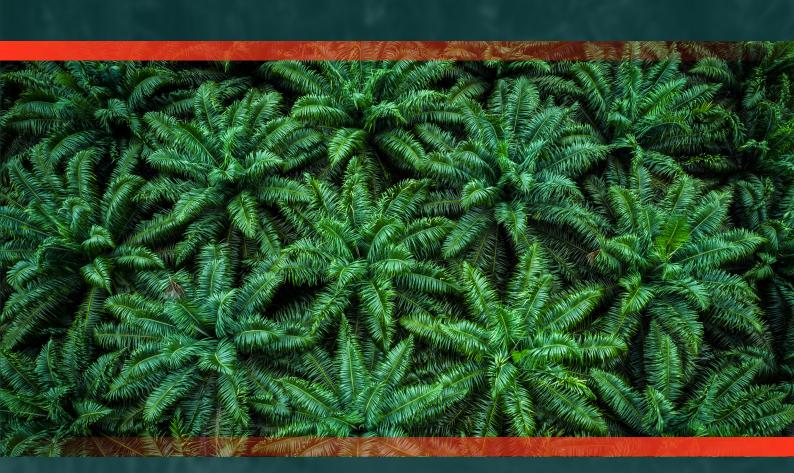






## Dokumen Kontribusi Penguatan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan

Januari 2024



Dokumen ini adalah bagian dari penelitian "Perluasan Pendekatan Yurisdiksi pada Sektor Kelapa Sawit di Indonesia" yang dilaksanakan CIFOR-ICRAF (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional-World Agroforestry), FKMS (Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Sintang), Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau), dan PPIIG (Pusat Pengembangan Iptek dan Inovasi Gambut) Universitas Palangka Raya; dengan dukungan dari Walmart Foundation.

## Dokumen Kontribusi Penguatan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan

Januari 2024

Dokumen ini adalah bagian dari penelitian "Perluasan Pendekatan Yurisdiksi pada Sektor Kelapa Sawit di Indonesia" yang dilaksanakan CIFOR-ICRAF (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional-World Agroforestry), FKMS (Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Sintang), Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau), dan PPIIG (Pusat Pengembangan Iptek dan Inovasi Gambut) Universitas Palangka Raya; dengan dukungan dari Walmart Foundation.

© 2024 CIFOR-ICRAF Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang



Materi dalam publikasi ini berlisensi di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Foto cover oleh: Ricky Martin/CIFOR-ICRAF

CIFOR Jl. CIFOR, Situ Gede Bogor Barat 16115 Indonesia T +62 (251) 8622622 F +62 (251) 8622100 E cifor@cifor-icraf.org

ICRAF
United Nations Avenue, Gigiri
PO Box 30677, Nairobi, 00100
Kenya
T +254 (20) 7224000
F +254 (20) 7224001
E worldagroforestry@cifor-icraf.org

## cifor-icraf.org

Penggunaan istilah dan penyajian materi dalam publikasi ini tidak menunjukkan adanya pendapat dari pihak CIFOR-ICRAF, para mitra, dan lembaga donor; mengenai status hukum suatu negara, wilayah, kota, daerah atau mengenai wewenangnya, atau pemisahan batas-batasnya.

## **Daftar Isi**

		Singkatan engantar	v vi
Ri	ngkas	San Y	viii
1	Prof	fil Kelapa Sawit Nasional dan Peran Gender dalam Sektor Perkebunan	1
_	1.1	Profil Kelapa Sawit Nasional	1
	1.2	Peran Gender dalam Sektor Perkebunan yang Berkontribusi pada Perubahan Transformasi	
2		dekatan Teori Perubahan, Teori Tindakan, serta Kerangka Kerja Pemantauan dan	
		luasi untuk Penguatan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan	6
	2.1	Dasar Pemikiran dan Proses Perumusan Teori Perubahan, Teori Tindakan, serta Kerangka	
		Kerja Pemantauan dan Evaluasi	6
	2.2	Proses Multipihak di Tingkat Nasional	7
	2.3	1 0	
		Subnasional	10
	2.4	Identifikasi Isu dan Risiko Kelapa Sawit Berkelanjutan di Tingkat Nasional	10
	2.5	Memperkuat Visi Kelapa Sawit Berkelanjutan Nasional Melalui Kerangka	
		Teori Perubahan, Teori Tindakan, serta Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi	15
3	Sim	ulasi Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan Melalui SIPOS	
	(Sin	nulation of Indonesian Palm Oil Sustainability)	21
	3.1	Kerangka Model SIPOS	21
	3.2	Pemodelan Dampak Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan Melalui SIPOS	22
	3.3	1 / 1	23
	3.4	1 ) 1	23
	3.5	1 / 1	23
	3.6	Dampak Kebijakan terhadap Emisi dari Sektor Kelapa Sawit	24
	3.7	1 / 1	25
	3.8	Dampak Kebijakan terhadap Nilai Perdagangan Sektor Kelapa Sawit dan	
		1	26
	3.9	Modifikasi Skenario Kebijakan untuk Menghasilkan Keseimbangan antara	
		$\circ$	27
4			29
5	Dafi	tar Pustaka	<b>3</b> 7
La	mpira	an	40
	1		40
	2	Bagan Rinci Teori Perubahan, Teori Tindakan, serta Kerangka Kerja Pemantauan	
		dan Evaluasi	56
	3	Data SIPOS	60

## **Daftar Gambar dan Tabel**

Gar	mbar	
1	Peta tutupan sawit di Indonesia tahun 2022	1
2	Lokakarya nasional pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023 (a,b)	7
3	Diskusi dan diseminasi dalam Forum Lanskap Global yang dilaksanakan pada tanggal	
	12 Oktober 2023	8
4	Lokakarya nasional kedua dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 (a,b)	8
5	Lokakarya nasional ketiga dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024 (a) dan	
	penyerahan dokumen kontribusi RAD KSB kepada perwakilan kabupaten (b)	9
6	Wordcloud beragam isu terkait kelapa sawit berkelanjutan	11
7	Wordcloud beragam risiko terkait kelapa sawit berkelanjutan	11
8	Teori perubahan untuk penguatan inisiatif kelapa sawit berkelanjutan di tingkat nasional	16
9	Jalur perubahan 1	18
10	Jalur perubahan 2	19
11	Jalur perubahan 3	20
12	Model SIPOS rantai suplai kelapa sawit	21
13	Antarmuka model Simulation of Indonesian Palm Oil Sustainability (SIPOS)	22
14	Simulasi perkembangan perkebunan sawit dengan berbagai skenario kebijakan	24
15	Simulasi deforestasi dengan berbagai skenario kebijakan	24
16	Ragam sumber emisi sektor kelapa sawit pada skenario BAU	25
17	Simulasi emisi tahunan dari kelapa sawit dengan berbagai skenario kebijakan	25
18	Simulasi produksi CPKO tahunan dari kelapa sawit dengan berbagai skenario kebijakan	20
19	Simulasi nilai perdagangan kelapa sawit dengan berbagai skenario kebijakan	26
20	Simulasi nilai perdagangan kelapa sawit dengan berbagai skenario kebijakan (a) dan	
	simulasi pendapatan petani dengan berbagai skenario kebijakan (b)	27
Tab		
1	Data luasan dan produksi CPO nasional tahun 2019-2023	2
2	Data produksi, konsumsi dan ekspor minyak sawit dari Indonesia tahun 2019-2021	2
3	Proporsi konsumsi domestik sawit di Indonesia tahun 2018-2022	2
4	Total peserta dan organisasi yang terlibat dalam lokakarya multipihak di tingkat nasional	
_	dan subnasional	10
5	Identifikasi isu dan risiko	12
6	Pengaruh skenario kebijakan terhadap indikator sawit berkelanjutan	23
7	Matriks rekomendasi kunci RAN KSB	30

## **Daftar Singkatan**

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APL Areal penggunaan lain

BAU Business as usual (bisnis seperti biasa)

CIFOR-ICRAF Center for International Forestry Research-World Agroforestry

(Pusat Penelitian Kehutanan Internasional-World Agroforestry)

CSO Civil society organization (Organisasi Masyarakat Sipil/OMS)

CPO Crude palm oil (minyak kelapa sawit)

CPKO Crude palm kernel oil (minyak inti kelapa sawit)

CSR Corporate social responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan)

FFB Fresh fruit bunch (tandan buah segar/TBS)

FKMS Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Kabupaten Sintang

FOKSBI Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

FPIC Free prior informed consent (persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa

paksaan/Padiatapa)

HCV High conservation value (nilai konservasi tinggi/NKT)

HCS High carbon stock (stok karbon tinggi)

HGU Hak guna usaha

ISPO Indonesian Sustainable Palm Oil

IUP Izin usaha perkebunan

JA Jurisdictional approach (pendekatan yurisdiksi)

Jikalahari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

JAPOS Jurisdictional Approach of Palm Oil Simulation

(simulasi pendekatan yurisdiksi sektor kelapa sawit)

MoU Memorandum of understanding (nota kesepahaman)

MEF Monitoring and evaluation framework (kerangka pemantauan dan evaluasi)

NFREL National Forest Reference Emission Level (Tingkat Referensi Emisi Hutan Nasional)

NGO Non-governmental organization (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM)

OPD Organisasi Pemerintah Daerah PKO Palm kernel oil (minyak inti sawit)

PKS Pabrik kelapa sawit

PPIIG Pusat Penelitian dan Pengembangan Iptek dan Inovasi Gambut

RAD KSB Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan RAN KSB Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan

RPO Refined palm oil (minyak sawit merah/hasil permurnian minyak sawit)

RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil

SPO Sustainable palm oil (kelapa sawit berkelanjutan)

ToA Theory of action (teori tindakan)
ToC Theory of change (teori perubahan)

TPD Tim Pelaksana Daerah TTM ToC, ToA, dan MEF

## **Kata Pengantar**

Minyak sawit adalah salah satu komoditas pertanian unggulan dan Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Tidak hanya untuk pasar ekspor, produksi minyak sawit di Indonesia juga untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, baik untuk konsumsi minyak goreng, bahan baku industri lainnya, serta biodiesel. Sebagai aktor kunci dalam produksi dan perdagangan sawit global, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen tinggi dalam implementasi praktik yang berkelanjutan, di antaranya melalui Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019. Kebijakan RAN KSB ini menggerakkan berbagai pihak di tingkat nasional untuk terus berupaya meningkatkan capaian sektor kelapa sawit berkelanjutan dan juga mendorong adopsi pendekatan yurisdiksi (jurisdictional approach/JA) melalui Rencana Aksi Daerah di tingkat nasional dan subnasional untuk memastikan implementasinya di tingkatan yang lebih teknis. Saat ini, terdapat beragam kemajuan proses perancangan dan implementasi rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan di setiap daerah di Indonesia dan mereka menghadapi tantangan serta kendala yang berbeda-beda.

CIFOR-ICRAF dengan dukungan dari Walmart Foundation melaksanakan penelitian dengan tema "Perluasan Pendekatan Yurisdiksi pada Sektor Kelapa Sawit di Indonesia". Penelitian ini berlangsung dari Januari 2020 sampai dengan Januari 2024. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kesiapan dari empat daerah produsen kelapa sawit untuk mengimplementasikan program yurisdiksi (jurisdictional programs/JPs) melalui pendekatan partisipatif, multipihak, dan inklusif gender. Selain itu, penelitian ini ditujukan untuk membagikan hasil pembelajaran dari tingkat subnasional untuk mendorong proses di tingkat nasional.

Di tingkat subnasional, kami melaksanakan penelitian di empat kabupaten terpilih, yaitu: Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau; Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur; dan Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan Kabupaten dilakukan secara sistematis dengan beberapa kriteria, yaitu: luasan hutan, nilai risiko deforestasi, luasan sawit, luasan gambut, serta laju ekspansi sawit dan deforestasi dalam lima tahun terakhir (2014-2018). Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk penguatan proses dan implementasi JA sektor kelapa sawit di kabupaten terpilih yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB). Selain itu, diharapkan pula dapat menghasilkan pembelajaran dari tingkat kabupaten untuk kontribusi dan rekomendasi proses perumusan kebijakan serta implementasinya di tingkat nasional. CIFOR-ICRAF bekerja sama dengan mitra daerah yaitu Forum Komunikasi Masyarakat Sintang (FKMS) di Kabupaten Sintang, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) di Kabupaten Pelalawan, serta Pusat Pengembangan Iptek dan Inovasi Gambut Universitas Palangka Raya (PPIIG UPR) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pulang Pisau.

Penelitian ini memfasilitasi perancangan bersama menggunakan kerangka teori perubahan (theory of change), teori aksi (theory of action), serta kerangka kerja pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation framework) atau yang disebut TTM; untuk secara sistematis mengumpulkan pembelajaran mengenai isu dan potensi solusi untuk perubahan serta aksi-aksi yang dibutuhkan. Proses untuk pengembangan TTM ini dilakukan secara partisipatif di tingkat kabupaten maupun nasional bersama dengan para pemangku kepentingan kunci dan aktor terkait. Pengembangan TTM tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi, tetapi sebagai alat untuk

memperkuat dan sarana refleksi bersama untuk membangun visi bersama, meningkatkan sinergi dalam implementasi dan dampak yang diharapkan dari JA di sektor kelapa sawit, terutama terkait RAD KSB serta RAN KSB di tingkat nasional. Selain itu, dalam penelitian ini juga dikembangkan model sistem dinamika berbasis rantai nilai kelapa sawit di tingkat subnasional yang disebut JAPOS (Jurisdictional Approach of Palm Oil Simulation) serta di tingkat nasional yaitu SIPOS (Simulation of Indonesian Palm Oil Sustainability). Model ini dapat digunakan untuk simulasi kebijakan di tingkat bentang alam dan diharapkan dapat menjadi alat untuk perancangan skenario dan pengambilan keputusan yang terkait dengan proses dan implementasi JA pada sektor kelapa sawit di tingkat kabupaten maupun nasional.

Di tingkat nasional, CIFOR-ICRAF dan para mitra telah melaksanakan dua lokakarya multipihak untuk penyusunan TTM nasional, pengembangan model SIPOS, serta wadah bertukar pikiran dan pembelajaran terkait inisiatif kelapa sawit berkelanjutan yang dilaksanakan pada 12 Oktober 2023, 23 November 2023, dan 11 Januari 2024. Selama pelaksanaan lokakarya multipihak, dilakukan proses penyusunan bersama rancangan TTM nasional yang menghasilkan sintesis pembelajaran dari penelitian terhadap empat kabupaten terpilih, yang kemudian menjadi bahan penting bagi tim peneliti untuk menyusun dokumen ini. Dokumen ini berisi hasil sintesis dan rekomendasi TTM, simulasi menggunakan SIPOS yang diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bersama dan memperkaya proses refleksi dan implementasi RAN KSB di Indonesia. Hasil-hasil yang disampaikan berasal dari proses partisipatif, oleh karenanya, tim peneliti menyampaikan terima kasih atas keterlibatan dan masukan berbagai pihak dalam proses penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak lain yang tengah bekerja untuk meningkatkan capaian realisasi sektor kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia.

Januari 2024 Tim Penyusun

## Ringkasan

#### **Profil Kelapa Sawit Indonesia**

Indonesia adalah negara produsen dan konsumen minyak kelapa sawit terbesar dengan tren produksi dan konsumsi sawit yang cenderung meningkat. Produksi nasional minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil*/CPO) pada 2023 diestimasi mencapai 48 juta ton dari luasan 15 juta ha perkebunan dengan 34% kontribusi dari perkebunan rakyat. Sebanyak 16 juta orang diperkirakan terlibat di dalam sektor sawit di Indonesia sebagai pekerja langsung maupun tidak langsung. Pada 2022, tercatat 25 juta ton minyak sawit diekspor dari Indonesia ke seluruh dunia dengan total nilai perdagangan US\$27 miliar. India, Cina, dan Pakistan merupakan beberapa negara importir terbesar minyak sawit dari Indonesia. Dari segi konsumsi domestik, adanya kebijakan biodiesel menjadi salah satu pemicu tren peningkatan konsumsi.

Untuk mewujudkan sektor kelapa sawit berkelanjutan, pemerintah mengesahkan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) untuk tahun 2019-2023 melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019. Pada tahun 2023 terdapat delapan provinsi dan 15 kabupaten yang telah memiliki Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB). Sementara itu terdapat tiga provinsi dan 17 kabupaten sedang dalam proses penyusunan peraturan daerah untuk dokumen RAD KSB. Meskipun masih banyak kendala, implementasi RAN KSB telah menghasilkan beberapa capaian, di antaranya penerbitan dokumen legalitas bagi pekebun kecil serta penerbitan kebijakan wajib sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

#### Peran Gender dalam Sektor Perkebunan

Kelapa sawit yang berkelanjutan, berkeadilan, dan responsif gender sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi Pemerintah Indonesia. Faktanya, keterlibatan perempuan telah mendominasi pekerjaan di perkebunan sawit. Sebanyak 86% angkatan kerja dalam siklus produksi kelapa sawit adalah perempuan, terutama pada sektor hulu pasok rantai kelapa sawit. Sebanyak 24 dari total 28 jenis pekerjaan di kebun kelapa sawit dikerjakan oleh perempuan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perempuan juga mendapatkan hak mereka, terutama akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB, pemerintah memberikan mandat pelaksanaan RAN KSB yang inklusif dan responsif gender. Kesetaraan gender RAN KSB terlihat pada Komponen D terkait Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa dengan persentase pelaksanaan kesetaraan gender mencapai 2,59%.

Dukungan pemerintah lainnya juga tertuang dalam sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang responsif gender, yakni melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020, yakni prinsip nondiskriminasi yang dimasukkan dalam kriteria sertifikasi dan menjadi alat verifikasi dalam bentuk ketiadaan diskriminasi berbasis jenis kelamin. Kesetaraan gender menuju perubahan transformatif dapat digunakan sebagai pintu masuk bagi percepatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Perubahan yang diharapkan tidak hanya pada tingkat individu (agensi), tetapi juga perubahan pada tingkat relasional (hubungan), dan struktur sosial (norma) terhadap indikator-indikator gender yang ada.

## Memperkuat Visi Kelapa Sawit Berkelanjutan Melalui Teori Perubahan, Teori Tindakan, serta Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi (TTM)

Teori perubahan (theory of change/ToC), teori tindakan (theory of action/ToA), serta kerangka kerja pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation framework/MEF) yang selanjutnya disebut sebagai TTM (ToC, ToA, dan MEF); adalah suatu alat untuk menjaring visi bersama secara partisipatif. CIFOR-ICRAF dan para mitra menggunakan kerangka ini untuk memfasilitasi diskusi multipihak guna mengembangkan visi bersama dan memperkuat inisiatif kelapa sawit berkelanjutan di tingkat nasional dan subnasional.

Para pihak di tingkat nasional memiliki visi bersama untuk mewujudkan pengurangan deforestasi dan emisi gas rumah kaca, peningkatan keanekaragaman hayati, dan peningkatan ketahanan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia pada tahun 2030. Berdasarkan model sistem dinamika SIPOS, tim peneliti merekomendasikan indikator pencapaian progresif berupa penurunan deforestasi di APL sebesar 80% dengan nol deforestasi di lahan gambut dan kawasan hutan, peningkatkan fraksi ekspor CPO menjadi 30%, peningkatan intensifikasi di perkebunan rakyat sebesar 25%, intensifikasi di perusahaan sebesar 10%, serta penerapan skema-skema insentif. Visi dan indikator pencapaian ini akan diwujudkan melalui implementasi tiga jalur perubahan (change pathways), yakni: legalitas usaha, pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta pemberdayaan ekonomi dan peningkatan usaha yang berkelanjutan. Jalurjalur perubahan yang telah dikembangkan tersebut berpeluang mendorong transformasi gender.

### Pemodelan Dampak Kebijakan Melalui SIPOS (*Simulation of Indonesian Palm Oil Sustainability*)<sup>1</sup>

SIPOS merupakan alat untuk memodelkan skenario kebijakan kelapa sawit berkelanjutan dengan tiga komponen utama, yakni: rantai suplai kelapa sawit, intervensi atau skenario kebijakan, dan indikatorindikator untuk mengevaluasi keluaran. SIPOS memodelkan intervensi kebijakan yang dijabarkan dalam RAN KSB. Model ini memproyeksikan masa depan sebagai dampak dari implementasi intervensi untuk mencapai kelapa sawit berkelanjutan. Hasil simulasi SIPOS menunjukkan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan dapat menurunkan deforestasi kumulatif hingga 100% dari BAU (business as usual), menurunkan emisi 23-25% dari BAU, dan meningkatkan pendapatan petani sebesar 9,8% dari BAU. Namun, kebijakan ini juga berpotensi menurunkan volume produksi CPKO (crude palm kernel oil) dan nilai perdagangan khususnya pada skenario kebijakan kelapa sawit berkelanjutan tanpa intensifikasi, sertifikasi, dan insentif.

Keseimbangan antara faktor lingkungan dan ekonomi dapat tercapai apabila terjadi penurunan deforestasi di APL sebesar 80% dengan nol deforestasi di lahan gambut dan kawasan hutan, peningkatan fraksi ekspor CPO menjadi 30% dan peningkatan intensifikasi di perkebunan rakyat sebesar 25% dengan diimbangi intensifikasi di perusahaan dan skema insentif. Apabila skenario kebijakan ini diimplementasikan, nilai ekspor sawit akan meraup US\$7,4 miliar lebih tinggi dibandingkan dengan skenario BAU. Skenario kebijakan yang tepat ini juga mampu mendorong peningkatan pendapatan petani 20% lebih tinggi dari BAU pada tahun 2029.

<sup>1</sup> https://exchange.iseesystems.com/public/cifor-vfi/sipos-id

#### Rekomendasi Kunci

Para pihak mempunyai visi bersama untuk mewujudkan pengurangan deforestasi dan emisi gas rumah kaca, peningkatan keanekaragaman hayati, dan peningkatan ketahanan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia pada tahun 2030. Berdasarkan model sistem dinamika SIPOS, tim peneliti merekomendasikan indikator pencapaian progresif yakni penurunan deforestasi di APL sebesar 80% dengan nol deforestasi di lahan gambut dan kawasan hutan, peningkatan fraksi ekspor CPO menjadi 30%, peningkatan

intensifikasi di perkebunan rakyat sebesar 25%, intensifikasi di perusahaan sebesar 10%, serta penerapan skema insentif.

Visi dan indikator di atas akan dicapai melalui kegiatan yang direkomendasikan dalam matriks rekomendasi kunci RAN KSB yang memuat lima komponen, yakni: penguatan data, koordinasi dan infrastruktur; peningkatan kapasitas petani dan percepatan peremajaan; pengelolaan dan pemantauan lingkungan; tata kelola dan penanganan sengketa; serta pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses produk kelapa sawit.

## 1 Profil Kelapa Sawit Nasional dan Peran Gender dalam Sektor Perkebunan

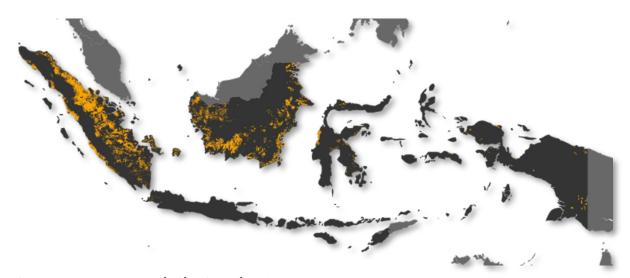
### 1.1 Profil Kelapa Sawit Nasional

Indonesia adalah negara penghasil sawit terbesar di dunia dan pada tahun 2023 berkontribusi pada 59% volume produksi sawit global (United States Department of Agriculture 2023). Statistik Pemerintah Indonesia mencatat bahwa produksi sawit Indonesia cenderung selalu meningkat sejak tahun 1980 sampai tahun 2019 (Kementerian Pertanian 2022). Lima besar provinsi dengan luasan dan produksi minyak sawit terbesar, yaitu: Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Gambar 1 adalah peta tutupan sawit nasional tahun 2022.

Pada tahun 2022, Indonesia memiliki hampir 15 juta ha perkebunan sawit yang menghasilkan lebih dari 45 juta ton CPO (*crude palm oil*). Dengan luasan yang sama, produksi CPO pada tahun 2023 diestimasi mencapai 48 juta ton. Tabel 1 menyajikan data luasan sawit pada tahun 2019-2023.

Bukan hanya perkebunan besar milik swasta atau pemerintah, perkebunan rakyat juga berkontribusi dalam produksi sawit di Indonesia. Pada tahun 2021 diperkirakan 2.273.901 pekebun dari 478.729 rumah tangga terlibat dalam produksi sawit di kebun rakyat dan berkontribusi pada 34% produksi nasional (Kementerian Pertanian 2022). Selain itu, diperkirakan 16 juta orang secara langsung terlibat dalam sektor sawit di Indonesia sebagai pekerja langsung maupun tidak langsung (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2021).

Data perdagangan global mencatat bahwa di tahun 2022, sekitar 75% volume perdagangan sawit global di bawah nomor kode HS (harmonized system) 1511 berasal dari Indonesia (UNComtrade 2020). Di tahun 2022, tercatat 25 juta ton minyak sawit diekspor dari Indonesia ke seluruh dunia dengan total nilai perdagangan US\$27 miliar. Sepuluh besar negara pasar yang mengimpor minyak sawit dari Indonesia di



Gambar 1. Peta tutupan sawit di Indonesia tahun 2022

Sumber: MapBiomas Indonesia (2022)

tahun 2022 berdasarkan volume perdagangannya yaitu: India, Cina, Pakistan, Amerika Serikat, Bangladesh, Malaysia, Vietnam, Mesir, Spanyol, dan Rusia. Tabel 2 menyajikan data volume produksi, konsumsi domestik serta ekspor, dan nilai perdagangan CPO di Indonesia sejak tahun 2019-2021.

Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi domestik minyak sawit terbesar di dunia. Konsumsi domestik di Indonesia terus meningkat dalam periode 2018-2022, terutama karena dampak kebijakan biodiesel (GAPKI 2023). Tabel 3 menunjukkan proporsi konsumsi domestik di Indonesia.

Indonesia telah memiliki komitmen terhadap realisasi sektor sawit berkelanjutan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) tahun 2019-2023 melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019. RAN KSB terdiri atas lima komponen, 28 program, 92 kegiatan, dan 118 keluaran; sementara pembagian mandat/tugas disebar

Tabel 1. Data luasan dan produksi CPO nasional tahun 2019-2023

		Luasar	n (ha)		Pi	roduksi CPO (ton)	
Tahun	Perkebunan rakyat	Perkebunan besar swasta/milik pemerintah	Luas akan dikonfirmasi*	Total	Perkebunan rakyat	Perkebunan besar swasta/milik pemerintah	Total
2019	5.896.775	8.559.836	-	14.456.611	14.925.877	32.194.370	47.120.247
2020	6.044.058	8.542.539	-	14.586.597	15.495.427	30.246.419	45.741.846
2021	6.029.749	8.591.941	2.212.295	16.833.985	15.503.840	29.617.640	45.121.480
2022**	6.159.333	8.826.150	1.848.501	16.833.985	15.519.234	30.061.658	45.580.892
2023***	6.300.426	9.002.942	1.530.617	16.833.985	16.273.170	31.962.235	48.235.405

<sup>\*</sup>Luas akan dikonfirmasi merupakan perbedaan hasil pelaporan daerah dan survei dengan penginderaan jauh

Sumber: Kementerian Pertanian (2022)

Tabel 2. Data produksi, konsumsi dan ekspor minyak sawit dari Indonesia tahun 2019-2021

Tahun	Total produksi	Konsumsi domestik (ton, %*)	Ekspor (ton, %*)	Nilai perdagangan (juta US\$)
2019	47.120.247	18.840.897 (40%)	28.279.350 (60%)	14,72
2020	45.741.846	19.806.292 (43%)	25.935.554 (57%)	17,36
2021	45.121.480	19.486.412 (43%)	25.635.068 (57%)	26,77

<sup>\*</sup>Terhadap total produksi

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (2022)

Tabel 3. Proporsi konsumsi domestik sawit di Indonesia tahun 2018-2022

Konsumsi domestik minyak sawit	2018	2019	2020	2021	2022
Biodiesel	28%	35%	42%	40%	42%
Oleochemical	7%	6%	10%	12%	10%
Pangan dan minyak goreng	65%	59%	49%	49%	47%

Sumber: GAPKI (2023)

<sup>\*\*</sup> Angka sementara

<sup>\*\*\*</sup> Angka estimasi

ke 14 kementerian/lembaga, serta gubernur dan bupati/wali kota di 26 provinsi penghasil sawit (Sekretariat RAN KSB 2023). Meskipun masih banyak kendala dalam implementasinya, implementasi RAN KSB telah menghasilkan beberapa capaian di antaranya penerbitan RAN KSB, penerbitan dokumen legalitas bagi pekebun kecil, serta penerbitan sertifikasi ISPO yang sifatnya wajib.

Dalam RAN KSB, pemerintah daerah diberikan mandat untuk mendukung upaya realisasi sawit berkelanjutan melalui rencana aksi daerah sesuai dengan panduan penyusunan yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran No. 525/5133/SJ Tanggal 20 September 2021. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, di tahun 2023 terdapat delapan provinsi dan 15 kabupaten telah memiliki Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB), selain juga terdapat tiga provinsi dan 17 kabupaten dalam proses perancangan peraturan daerah untuk dokumen yang telah disusun.

Selain perkembangan dari RAD KSB di berbagai daerah, capaian lainnya dari implementasi RAN KSB di antaranya adalah penerbitan STDB (surat tanda daftar budi daya). Di tahun keempat implementasi RAN KSB, STDB telah diterbitkan untuk 48.497 pekebun kecil dengan total luas kebun 47.721 ha. STDB merupakan syarat legalitas utama bagi pekebun skala kecil untuk sertifikasi ISPO yang bersifat wajib dan/atau untuk berpartisipasi dalam kegiatan lainnya yang didukung pemerintah, misalnya peremajaan sawit (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2023).

Salah satu keluaran RAN KSB lainnya adalah percepatan sertifikasi ISPO. Peraturan turunan mengenai sertifikasi ISPO utamanya mengacu pada Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 mengenai Sistem Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia, namun kerangka peraturan ISPO tersebut dalam proses pembaruan (Kementerian Pertanian 2023). Sertifikasi ISPO bersifat wajib baik bagi pekebun kecil maupun besar. Hingga tahun keempat implementasi RAN KSB terdapat 694 perusahaan dan 27 kelompok pekebun yang telah menerima sertifikat ISPO (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2023).

### 1.2 Peran Gender dalam Sektor Perkebunan yang Berkontribusi pada Perubahan Transformasi

Meskipun pemerintah Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengesankan di tahun 2023 yaitu sebesar 5% (Surjantoro 2024); namun perekonomian akan menjadi lebih dinamis, kuat, dan tangguh apabila semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, dapat berkontribusi dengan setara. Kesenjangan gender masih menjadi isu utama di Indonesia. Misalnya kesenjangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam hal akses terhadap kesehatan, pekerjaan, partisipasi, dan pengambilan keputusan (UNDP 2017). Pada tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ketujuh dalam hal kesenjangan gender di Asia Tenggara (Badan Pusat Statistik 2022). Stereotip gender dan pandangan tradisional mengenai peran perempuan berkontribusi menentang upaya mencapai kesetaraan gender dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik (The Asia Foundation 2012).

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengatasi isu gender dimulai dengan ratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) pada tahun 1984. Disusul dengan penerbitan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional tahun 2004-2009. Kebijakan ini menjadi dasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam kesetaraan gender sekaligus penyelarasan agenda pembangunan nasional dengan SDG (Sustainable Development Goals) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang kelima (UNDP n.d.).

Dalam konteks industri kelapa sawit, melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau RAN KSB (Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan) 2019-2024, pemerintah memberikan mandat kepada 14 kementerian/lembaga serta 26 provinsi penghasil sawit agar dalam pelaksanaan RAN KSB melibatkan seluruh pihak terkait untuk mendukung kelapa sawit yang

berkelanjutan dan berkeadilan serta responsif gender. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), melalui Keputusan Menteri PPPA No. 23 Tahun 2022 melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengarusutamakan gender dalam pelaksanaan RAN KSB 2019-2024.

Memastikan kesetaraan gender dalam kerangka kebijakan kelapa sawit berkelanjutan menjadi penting karena berkontribusi secara positif terhadap peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit (Tillah 2021). Kebijakan responsif gender dalam industri kelapa sawit berkelanjutan harus terus dipromosikan karena dapat memberikan dampak positif di luar aspek sosial, seperti lingkungan hidup dan ekonomi (UNDP Indonesia 2021). Dukungan pemerintah untuk sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang responsif gender sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 yang memasukkan prinsip nondiskriminasi dalam kriteria sertifikasi ISPO dan menjadi alat verifikasi dalam bentuk ketiadaan diskriminasi berbasis jenis kelamin.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyatakan bahwa 86% dari angkatan kerja dalam siklus produksi kelapa sawit adalah perempuan; terutama pada sektor hulu pasok rantai kelapa sawit, yang bekerja dalam kegiatan rantai pasokan seperti pemupukan, penyiangan, penyemprotan, dan pengumpulan buah kelapa sawit (Info Sawit 2022). Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa perempuan juga mendapatkan hak-hak mereka terutama akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang ke depannya dapat berkontribusi pada perubahan transformatif gender.

Isu gender yang berdampak pada kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pada industri perkebunan kelapa sawit adalah terkait akses terhadap tanah dan sumber daya alam, ketiadaan pengakuan eksplisit terhadap kontribusi perempuan dalam rantai pasok komoditas kelapa sawit; termasuk dalam hal pencatatan data pekebun, pendidikan dan pelatihan, proses pengambilan keputusan, dan keterbatasan fasilitas kerja yang responsif gender untuk mendukung kebutuhan khas perempuan, termasuk dalam hal pencegahan kekerasan berbasis gender (Tillah 2021).

Kelapa sawit yang berkelanjutan, berkeadilan, dan responsif gender sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi Pemerintah Indonesia mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Keterlibatan perempuan telah mendominasi pekerjaan di kebun sawit, yakni 24 dari total 28 jenis pekerjaan di kebun kelapa sawit dikerjakan oleh perempuan, sedangkan sisanya adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan kerja fisik yang berat, seperti menebang pohon pada saat pembukaan lahan (Media Perkebunan 2022). Perempuan, seperti halnya laki-laki, dilibatkan mulai dari proses awal penanaman, perawatan, pemanenan hingga penjualan. Perempuan banyak dilibatkan dalam perkebunan ketika kelapa sawit masih kecil, yaitu umur empat sampai dengan lima tahun, seperti membersihkan lahan, pembibitan kelapa sawit, penanaman bibit, pemupukan, penyemprotan, dan sebagainya. Namun, ketika pohon mulai berbuah, perempuan kurang terlibat di kebun dibandingkan dengan laki-laki. Meski demikian, perempuanlah yang memegang dan mengelola uang hasil penjualan kelapa sawit (Mawardati dkk. 2022).

Pelaksanaan RAN KSB yang inklusif gender diharapkan akan lebih berkontribusi pada transformasi jangka panjang. Hal ini bisa dicapai dengan memahami penyebab mendasar dari ketidaksetaraan gender dalam pengelolaan sawit dan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan terkait keterlibatan laki-laki, perempuan dan anak perempuan, serta kelompok marginal lainnya, misalnya migran. Kesetaraan gender sudah tertuang dalam RAN KSB, misalnya pada Komponen D terkait Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa, yakni terdapat empat program dan delapan kegiatan yang berkontribusi terhadap SDG 5 terkait kesetaraan gender. Program itu mencakup melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain, penyesuaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan, legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan, pelaksanaan kajian regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Persentase kesetaraan gender dalam RAN KSB mencapai 2,59% (Media Perkebunan 2022).

Kesetaraan gender menuju perubahan transformatif dapat digunakan sebagai pintu masuk bagi percepatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Ini dikarenakan perubahan yang diharapkan tidak hanya pada perubahan di tingkat individu (agensi), tetapi juga perubahan pada tingkat relasional (hubungan) dan struktur sosial (norma) terhadap indikator-indikator gender termasuk pendapatan, tenaga/beban kerja, aset, mobilitas agenda, kapasitas, keterampilan dan kesadaran sumber daya internal dan psikologis kolektif agensi dan aksi (Hillenbrand dkk. 2015).

Studi kasus di Aceh menggambarkan adanya paradigma transformasi gender dalam pengelolaan kebun sawit, misalnya pada tiga sampai empat tahun pertama tanaman kelapa sawit berjalan, perempuan terlibat aktif bekerja di perkebunan hingga tanaman kelapa sawit

tersebut menghasilkan buah. Tugas umum yang dilakukan perempuan di kebun adalah membersihkan piringan dan memberi pupuk. Ketika kelapa sawit mulai membuahkan hasil, perempuan jarang terlibat karena tanaman sawit tidak lagi membutuhkan perawatan intensif. Perempuan juga jarang dilibatkan dalam pertemuan, pelatihan, atau kegiatan lain yang berkaitan dengan kelapa sawit. Dengan demikian, perhatian dan wawasan perempuan terhadap perkebunan kelapa sawit pun terbatas. Perempuan menunjukkan minat untuk terlibat lebih jauh dalam kaitannya dengan kebun. Mereka ingin terlibat dan berperan dalam meningkatkan produktivitas kebun. Namun, struktur yang ada menjadi kendala bagi mereka. Sebagai istri, mereka diwajibkan untuk tinggal di rumah dan menjalankan peran gender tradisional lainnya (Mawardati dkk. 2022).

## 2 Pendekatan Teori Perubahan, Teori Tindakan, serta Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi untuk Penguatan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan

## 2.1 Dasar Pemikiran dan Proses Perumusan Teori Perubahan, Teori Tindakan, serta Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi

Pendekatan yurisdiksi (jurisdictional approach) JA) dapat memfasilitasi transisi sektor kelapa sawit yang lebih berkelanjutan melalui proses-proses multipihak. Teori perubahan (ToC), teori tindakan (ToA), dan kerangka kerja pemantauan dan evaluasi (MEF) yang selanjutnya disebut sebagai TTM (ToC, ToA, dan MEF); adalah satu alat untuk memfasilitasi diskusi multipihak guna menjaring visi bersama secara partisipatif agar muncul rasa kepemilikan dan tanggung jawab untuk mewujudkan perubahan yang digagas bersama ini. Penggunaan TTM memungkinkan para pihak menerjemahkan visi bersama ini menjadi kerangka aksi implementatif (ToC dan ToA) yang kemudian dapat dilacak dan dilaporkan perkembangannya melalui indikator-indikator MEF.

Teori perubahan (ToC) mendefinisikan bagian dan upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang tertentu, menjelaskan bagaimana suatu intervensi atau serangkaian intervensi, diharapkan dapat menghasilkan perubahan pembangunan yang spesifik, dengan mengacu pada analisis sebab akibat berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. ToC mencakup asumsi-asumsi yang digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk menjelaskan proses perubahan. ToC menjelaskan bagaimana dampak (impact) atau tujuan (goal) keseluruhan dapat dicapai melalui berbagai hasil (outcome) yang dipengaruhi oleh keluaran (output)

dari kegiatan yang telah dilaksanakan. ToC menjaga proses implementasi dan evaluasi tetap transparan sehingga semua orang yang terlibat tahu apa yang sedang terjadi, mengapa suatu kegiatan dilakukan, serta bagaimana setiap hasil dan keluaran dapat berkontribusi dalam pencapaian dampak maupun tujuan.

Teori tindakan (ToA) adalah operasionalisasi dari ToC yang mengakomodir perincian program atau intervensi tertentu untuk 'mengaktifkan' atau mencapai perubahan yang menjadi visi dalam ToC. ToA berfokus pada tindakan/aksi dan komponen-komponen internal yang dapat dikendalikan program seperti perincian lokasi dan alokasi sumber daya.

### Kerangka kerja pemantauan dan evaluasi

(MEF) adalah bagian penting pengelolaan program untuk menentukan apakah program yang diimplementasikan sudah sesuai dengan perencanaan yang dirumuskan dalam ToA maupun ToC dan perubahan apa yang diperlukan. MEF memungkinkan para pihak untuk melihat dampak yang terukur terhadap hasil yang diharapkan, efektivitas dari pelaksanaan program maupun efisiensi penggunaan sumber daya. TTM digunakan secara berbarengan untuk membangun basis pengetahuan tentang kondisi awal dan kebutuhan serta prioritas aksi/intervensi berikutnya sesuai desain program yang responsif terhadap konteks lokal dalam yurisdiksi.

### 2.2 Proses Multipihak di Tingkat Nasional

CIFOR-ICRAF bersama dengan para mitra, yaitu: FKMS (Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Sintang), Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau), dan PPIIG (Pusat Penelitian dan Pengembangan Iptek dan Inovasi Gambut)

Universitas Palangka Raya telah melaksanakan tiga lokakarya di tingkat nasional pada tanggal 12 Oktober 2023, 23 November 2023, dan 11 Januari 2024. Lokakarya ini juga dibarengi dengan diseminasi temuan awal pada forum internasional *Global Landscape Forum* yang dilaksanakan pada 12 Oktober 2023 (Gambar 2 sampai 5).



Gambar 2. Lokakarya nasional pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023 (a,b)



Gambar 3. Diskusi dan diseminasi dalam Forum Lanskap Global yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023



Gambar 4. Lokakarya nasional kedua dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 (a,b)



Gambar 5. Lokakarya nasional ketiga dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024 (a) dan penyerahan dokumen kontribusi RAD KSB kepada perwakilan kabupaten (b)

Proses multipihak di tingkat nasional ini merupakan tindak lanjut dari proses-proses yang telah terjadi di empat kabupaten yang menjadi lokasi penelitian CIFOR-ICRAF dan para mitra, yakni di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau; Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah; dan Kabupaten Kutai Kartanegara,

Provinsi Kalimantan Timur. Di masingmasing kabupaten, CIFOR-ICRAF dan mitra mengadakan tiga lokakarya untuk pengembangan TTM dan satu lokakarya akhir untuk diseminasi dan penyempurnaan TTM serta simulasi model kebijakan di tingkat subnasional (JAPOS) dari tahun 2022 sampai dengan 2023. Sebanyak 761 peserta yang terafiliasi dengan 287 organisasi telah

Tabel 4. Total peserta dan organisasi yang terlibat dalam lokakarya multipihak di tingkat nasional dan subnasional

Lokakarya	Total peserta	Total instansi
Nasional	328	146
Kabupaten Pelalawan	145	61
Kabupaten Sintang	148	54
Kabupaten Pulang Pisau	84	31
Kabupaten Kutai Kartanegara	125	32
Total keseluruhan	761	287

terlibat dalam proses lokakarya di tingkat nasional dan subnasional (Tabel 4). Daftar hadir peserta lokakarya nasional tersedia pada Lampiran 1.

Proses multipihak yang terjadi di tingkat nasional dan subnasional ini menghasilkan kontribusi rekomendasi untuk penguatan dan atau pengembangan rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah (RAN dan RAD KSB). Dokumen kontribusi ini mencakup identifikasi isu dan konteks secara partisipatif, pengembangan kerangka TTM, dan umpan balik terhadap studi sektor kelapa sawit dan model simulasi kebijakan yang dikembangkan oleh tim peneliti.

## 2.3 Pembelajaran dari Proses Multipihak dan Inisiatif Sawit Berkelanjutan di Tingkat Subnasional

Pendekatan yurisdiksi untuk sawit berkelanjutan yang dikombinasikan dengan kerangka TTM berhasil memfasilitasi diskusi multipihak untuk penguatan inisiatif keberlanjutan melalui RAD KSB. Secara umum, para pihak di tingkat subnasional mempunyai visi bersama untuk mengurangi deforestasi, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan meningkatkan ketahanan mata pencaharian masyarakat. Tujuan atau dampak ini akan dicapai melalui tiga jalur perubahan, yaitu: data, regulasi, dan kepatuhan hukum; keanekaragaman hayati dan konservasi ekosistem; serta pemberdayaan ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan. Jalur perubahan ini menjadi

dasar dalam perumusan rekomendasi kunci yang dikelompokkan menjadi lima komponen sesuai dengan panduan pengembangan rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan.

Dari proses diskusi multipihak yang telah dilakukan, kami merangkum beberapa manfaat proses TTM ini, di antaranya adalah penguatan kepercayaan dan peningkatan kolaborasi dalam proses diskusi dan audiensi antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang sama. Penggunaan TTM juga dapat memfasillitasi strukturisasi isu kompleks dan pengembangan target dan indikator kinerja yang jelas untuk memantau dan mengukur pencapaian inisiatif sawit berkelanjutan. Melalui proses TTM, para pemangku kepentingan yang relevan diidentifikasi sesuai dengan kepentingan dan perannya.

Keberhasilan diskusi untuk pengembangan dan penguatan RAD KSB di tingkat subnasional juga tidak lepas dari faktor-faktor pendukung penting lainnya, misalnya kapasitas dan jaringan dari mitra kerja di tingkat kabupaten. Kami juga mengamati adanya dukungan pemerintah daerah, termasuk dari bupati dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) akan mendorong kelancaran proses diskusi multipihak di kabupaten. Dukungan dan keberadaan mitra kerja ini juga mendorong terbangunnya kepercayaan di antara para pemangku kepentingan sehingga para pihak terlibat aktif menyumbangkan gagasannya di dalam diskusi. Faktor lainnya yang juga berpengaruh penting adalah proses diskusi multipihak dilaksanakan dengan memperhatikan momentum yang ada di tingkat subnasional; ketika tujuan dan waktu pengembangan TTM sejalan dengan tata waktu, tujuan, dan program pemerintah daerah untuk membangun sektor kelapa sawit yang berkelanjutan.

## 2.4 Identifikasi Isu dan Risiko Kelapa Sawit Berkelanjutan di Tingkat Nasional

Dalam diskusi multipihak yang berlangsung di tingkat nasional, para pihak juga mengidentifikasi isu dan risiko di sektor kelapa sawit untuk mencapai keberlanjutan. Isu dan risiko ini dikelompokkan menjadi lima kelompok sesuai dengan komponen yang ada di dalam perumusan RAN KSB (Tabel 5). Isu dan risiko divisualisasikan melalui wordcloud yang menggambarkan

topik isu dan risiko yang berulang (Gambar 6 dan 7). Beberapa isu penting ini di antaranya terkait ketersediaan data dasar, pengumpulan, sinkronisasi, dan pembaharuan; tumpang tindih dan konflik lahan; dan komitmen perusahaan dalam merealisasikan kemitraan plasma dan dalam aspek keberlanjutan. Sementara itu, beberapa risiko penting yang teridentifikasi adalah ego sektoral terkait dengan data; kebijakan yang ada

bersifat umum sehingga perlu diimbangi dengan adanya strategi agar lebih implementatif; dan keberadaan kelembagaan untuk para pekebun. Isu dan risiko yang teridentifikasi ini menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan teori perubahan, teori tindakan, serta kerangka kerja pemantauan dan evaluasi. Deskripsi terperinci mengenai isu dan risiko ini disampaikan pada Tabel 5.



Gambar 6. Wordcloud beragam isu terkait kelapa sawit berkelanjutan



Gambar 7. Wordcloud beragam risiko terkait kelapa sawit berkelanjutan

Tabel 5. Identifikasi isu dan risiko

No	Kelompok isu dan risiko	Temuan isu	Temuan risiko
1	Penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur	<ul> <li>Data geospasial (data open source masih terbatas dan akurasinya rendah)</li> <li>Data, koordinasi, dan infrastruktur untuk penerapan HCV (high conservation value) dan HCS (high carbon stock) di level lanskap/kabupaten</li> <li>Infrastruktur</li> <li>Ketersediaan data dasar perkebunan kelapa sawit</li> <li>Ketertelusuran</li> <li>Ketidaksesuaian dokumen usulan ke BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dengan dokumen lapangan</li> <li>Pembaharuan data</li> <li>Pemenuhan persyaratan STDB (surat tanda daftar budi daya)</li> <li>Pengumpulan data</li> <li>Publikasi data</li> <li>Sinkronisasi data</li> <li>Tata kelola data (pengelolaan dan berbagi data)</li> <li>Transparansi dan keterbukaan data dan informasi</li> <li>Tumpang tindih data antar para pihak</li> <li>Validasi data</li> </ul>	<ul> <li>Birokrasi</li> <li>Data open source</li> <li>Ego sektoral terkait penggunaan data</li> <li>Kebijakan yang menjadi payung untuk data perkebunan</li> <li>Ketidaksinkronan data antar institusi</li> <li>Kualitas data tidak dipercaya global</li> <li>Kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap publik</li> <li>Kurangnya tool/platform</li> <li>Penurunan kualitas data karena adanya ketidakpercayaan publik dalam pemberian data kepada lembaga</li> <li>Program keberlanjutan terkait kelapa sawit belum menghasilkan manfaat optimal</li> <li>Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan</li> </ul>
2	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani	<ul> <li>Implementasi 20% lahan perusahaan untuk plasma harusnya dilakukan di awal pembangunan perkebunan kelapa sawit perusahaan</li> <li>Kelembagaan pertanian</li> <li>Pembiayaan untuk pekebun rakyat</li> <li>Pengembangan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)</li> <li>Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) tidak fokus ke kelapa sawit</li> <li>Produktivitas pekebun rakyat masih rendah</li> <li>Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan dukungan sarana dan prasarana terhambat karena permasalahan legalitas lahan</li> <li>Rantai birokrasi</li> <li>Rendahnya kapasitas pemetaan</li> <li>Tipologi untuk pekebun rakyat dan kebijakan yang berbeda untuk mengakomodair petani dengan luasan lahan yang berbeda</li> </ul>	<ul> <li>Kelembagaan untuk kelompok tani</li> <li>Perlu mengakomodir keterbatasan dan karakteristik petani sawit yang berbeda- beda di dalam kebijakan</li> <li>Sumber daya manusia terbatas untuk percepatan implementasi STDB</li> <li>Tidak ada PPL yang khusus menangani sawit</li> </ul>

## Tabel 5. Lanjutan

	J. Lanjulan		
No	Kelompok isu dan risiko	Temuan isu	Temuan risiko
3	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan	<ul> <li>Akses data dan informasi terkait lingkungan</li> <li>Banyaknya misinformasi dan transparansi terkait aspek lingkungan</li> <li>Dampak limbah pupuk</li> <li>Isu lingkungan tidak selalu menjadi fokus utama</li> <li>Kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan</li> <li>Kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan</li> <li>Komitmen untuk mengelola area HCV dan/atau HCS</li> <li>Kondisi business as usual (BAU) yang kurang berkelanjutan</li> <li>Konflik lahan</li> <li>Konservasi koridor habitat satwa liar</li> <li>Perusahaan belum memiliki kemauan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan</li> <li>Safeguard terkait aspek lingkungan</li> <li>Tumpang tindih lahan</li> <li>Berkurangnya keanekaragaman hayati</li> </ul>	<ul> <li>Aspek tenurial</li> <li>Belum adanya dampak dari pengelolaan HCV dan/atau HCS</li> <li>Ego sektoral</li> <li>Insentif untuk alokasi area koridor habitat dan konservasi</li> <li>Kemauan untuk mengalokasikan area untuk koridor habitat dan area konservasi</li> <li>Ketidaktahuan masyarakat terhadap koridor habitat dan area konservasi</li> <li>Konflik kepentingan</li> <li>Kurangnya motivasi perusahaan untuk mempraktikkan keberlanjutan dan dari perusahaan pemasok atau buyer untuk mengimplementasikan sustainable sourcing</li> <li>Pemutihan sawit dalam kawasan hutan</li> <li>Perubahan paradigma</li> <li>Perubahan-perubahan di kebijakan baru</li> <li>Political will</li> <li>Tren pasar</li> <li>Perbedaan budaya dalam menerjemahkan konsep keberlanjutan antara dunia luar atau internasional dengan situasi lokal sehingga situasi lapangan di Indonesia sulit untuk dipahami</li> </ul>
4	Tata kelola dan sengketa	<ul> <li>Eksploitasi pekerja perempuan</li> <li>Kesenjangan sinergi dan kolaborasi antara aktor nasional dan daerah</li> <li>Inisiatif kelapa sawit berkelanjutan di tingkat pusat perlu dibarengi dengan dukungan anggaran dari pusat ke daerah</li> <li>Kepastian hukum, misalnya dalam kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur sektor perkebunan nasional</li> <li>Keterlibatan pemimpin adat dalam penanganan perselisihan</li> <li>Kewajiban perusahaan untuk memenuhi plasma sebesar 2%</li> <li>Konflik akibat tata kelola sawit</li> <li>Korupsi dan tata kelola dalam industri sawit</li> <li>Kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana di tingkat pekebun swadaya</li> <li>Lambatnya perkembangan inisiatif kelapa sawit berkelanjutan</li> </ul>	<ul> <li>Ada atau tidaknya mitra pembangunan (LSM) yang mendukung yurisdiksi, khususnya di tingkat subnasional</li> <li>Ego sektoral antar lembaga pemerintahan</li> <li>Fleksibilitas kebijakan dan penganggaran</li> <li>Gerakan masif untuk akselerasi inisiatif dari tingkat nasional ke seluruh kabupaten dan kota</li> <li>Kepastian legalitas tenurial lahan</li> <li>Kewenangan pemerintah daerah terbatas, khususnya untuk mengatasi sengketa lahan</li> <li>Komunikasi belum intensif sehingga rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan masih belum dianggap penting</li> </ul>

#### Tabel 5. Lanjutan

#### Kelompok isu dan risiko Temuan isu Temuan risiko No • Lembaga keuangan belum dilibatkan • Kontribusi dan inklusi gender dalam RAN KSB Minimnya anggaran untuk Pemerintah daerah tidak memiliki pendanaan kegiatan kewenangan dalam penyesuaian Perlunya tingkat kolaborasi lahan kawasan di Rencana Tata Ruang tinggi antar OPD Wilayah (RTRW) · Sifat kebijakan yang umum sehingga sulit untuk · Penerapan isu gender masih parsial Penguatan penegakan hukum diimplementasikan · Perbedaan perspektif barat dan lokal Tata kelola sawit terkait dengan pekerja anak belum dibenahi · Perempuan hanya berperan sebagai pendukung Persoalan yang ada di sektor perkebunan kelapa sawit ditangani secara sektoral Regulasi pemerintah terkait kelapa sawit berkelanjutan sudah ada namun belum bisa mengakselerasi penyelesaian berbagai isu tentang sawit Sosialisasi perkembangan dari inisiatif keberlanjutan · Sumber pendanaan terbatas Tata kelola STDB Kebijakan bersifat umum sehingga sulit untuk diimplementasikan, perlu dibarengi dengan strategi untuk implementasi · Perempuan tidak terlibat aktif dalam diskusi penting di tingkat tapak 5 Dukungan percepatan Aspek keberlanjutan menjadi kendala • Kemampuan adaptasi dengan pelaksanaan sertifikasi dalam ekspor tuntutan konsumen untuk menjadi berkelanjutan • Badan sertifikasi ISPO: perlu adanya ISPO dan peningkatan lembaga dan kewenangan yang jelas · Ketertelusuran dan tata kelola akses pasar produksi untuk verifikasi Koordinasi atau komunikasi kelapa sawit Black campaian Legalitas · Insentif harga premium · Lembaga yang terkait harusnya terlibat dalam sosialisasi dan • Integrasi hulu dan hilir dalam pendekatan vurisdiksi untuk meningkatkan serapan implementasi produk sawit yang berkelanjutan Keterlibatan para pihak dalam Dewan Pengarah Sertifikasi ISPO Kewenangan untuk mengeluarkan STDB tidak seragam • Pabrik kelapa sawit tidak berkelanjutan · Penciptaan pasar yang ideal untuk hasil produk CPO dan turunannya • Perlu peningkatan nilai tambah produk sawit petani sehingga produksi tidak dijual dalam bentuk bahan mentah • Perubahan pola konsumsi menjadi lebih hijau • Perusahaan pemasok/buyer belum memiliki komitmen sawit berkelanjutan Proses administrasi STDB Serapan anggaran untuk dukungan sarana dan prasarana di BPDPKS kurang maksimal Tenurial dan legalitas: status kepemilikan lahan · Tumpang tindih dengan standar lainnya

## 2.5 Memperkuat Visi Kelapa Sawit Berkelanjutan Nasional Melalui Kerangka Teori Perubahan, Teori Tindakan, serta Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi

Pemerintah Indonesia telah merumuskan peta jalan sektor kelapa sawit berkelanjutan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2019 mengenai RAN KSB 2019-2024. Kebijakan ini menjadi acuan dan panduan bagi pemerintah pusat dan daerah, para pelaku bisnis, dan mitra pembangunan dalam mendukung pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2023), provinsi dan kabupaten produsen kelapa sawit telah mengesahkan peraturan gubernur dan kabupaten terkait dengan RAD KSB. Beberapa provinsi dan kabupaten lainnya sedang dalam proses pengembangan dan pengesahan RAD KSB. Rencana aksi ini menjadi salah satu indikator dalam menentukan dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit. Pada tahun 2023, tujuh provinsi dan sembilan kabupaten telah memenuhi indikator untuk mendapatkan transfer DBH. Dengan mempertimbangkan pentingnya industri kelapa sawit terhadap ekonomi Indonesia dan juga pentingnya mempertahankan keberlanjutan dari industri kelapa sawit nasional dan daya saing global, RAN KSB periode 2019-2024 dipertimbangkan untuk dilanjutkan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2023).

Penelitian yang dilakukan CIFOR-ICRAF dan para mitra bertujuan untuk berkontribusi pada penguatan visi kelapa sawit berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui rangkaian studi, diskusi multipihak, dan simulasi kebijakan. Salah satu perangkat (tool) yang digunakan dalam menguatkan visi ini adalah melalui kerangka TTM yang dilengkapi dengan beberapa analisis, yaitu: situasi, konteks, intervensi, peran pemangku kepentingan, risiko, dan asumsi. Kerangka TTM beserta dengan analisis ini dikembangkan melalui rangkaian lokakarya multipihak dan analisis lebih lanjut oleh tim peneliti. Narasi terperinci mengenai TTM ini tersedia pada Lampiran 2.

Para pihak di tingkat nasional memiliki visi bersama untuk mewujudkan pengurangan deforestasi dan emisi gas rumah kaca, peningkatan keanekaragaman hayati, dan peningkatan ketahanan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia pada tahun 2030. Berdasarkan hasil penelitian, tim peneliti merekomendasikan indikator pencapaian progresif, yakni penurunan deforestasi di APL sebesar 80% dengan nol deforestasi di lahan gambut dan kawasan hutan, peningkatan fraksi ekspor CPO menjadi 30%, peningkatan intensifikasi di perkebunan rakyat sebesar 25%, intensifikasi di perusahaan sebesar 10%, serta penerapan skema-skema insentif. Beragam perubahan yang akan diwujudkan ini dimuat dalam kerangka teori perubahan (theory of change) yang ditunjukkan pada Gambar 8.

Visi dan indikator pencapaian di atas akan diwujudkan melalui implementasi tiga jalur perubahan (change pathways) dalam kerangka logis (logical framework) teori perubahan (Gambar 8). Jalur-jalur perubahan ini adalah legalitas usaha, pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan pemberdayaan ekonomi serta peningkatan usaha yang berkelanjutan. Jalur-jalur perubahan yang telah dikembangkan berpeluang mendorong transformasi gender pada beberapa aktivitas kegiatan yang akan dilakukan dengan melihat domain kekuasaan pada beberapa indikator (pendapatan dan tenaga kerja, aset, agenda, kolektif agensi dan aksi, pengetahuan, dan keterampilan) serta mempertimbangkan dimensi pemberdayaan (agensi, relasi, dan struktur).

#### Jalur Perubahan 1

Jalur perubahan ini berkontribusi pada komponen RAN KSB:

- 1. Penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur
- 2. Peningkatan kapasitas pekebun dan percepatan peremajaan

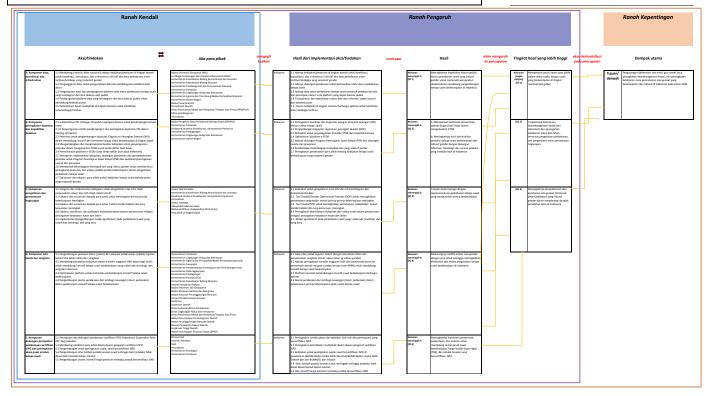
Pada aspek penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur, beberapa kegiatan yang direkomendasikan adalah mendorong adanya kebijakan atau peraturan di tingkat daerah untuk koordinasi, konsolidasi, dan sinkronisasi inisiatif dan data perkebunan antar institusi atau lembaga yang responsif gender; penganggaran dana untuk pengumpulan data dan pembangunan platform data dasar termasuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan; pengumpulan data dan pembangunan platform data dasar perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dan bisa diakses oleh publik; pembangunan platform data yang terintegrasi dan bisa diakses publik

#### Teori Perubahan - Penguatan Inisiatif Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Rogisam Time: Initial Fishpo Sawit Berksteinjam of Indonesia

TDC/TOA Effectivelysis wrote in encepal telephane on Indonesia with the Committee of the Intervaliant behaping plant task persentation, research, done mayorisk termanic persenguan dan analt persenguan et a populari terpingirkan latinops, datam pengambilan keputusan, kentrol sumber daya, dan bostool tenaga angie persensi andicipam pengambilan kebusansan dan shaktur yang membatai pertidipai peluh datam rentai nilal perdagangan ketapa sewit.

Intervaliant pengambilan saparitan saparitan saparitan dan saparitan saparitan saparitan dan saparitan saparitan saparitan dan saparitan saparitan saparitan saparitan dan saparitan saparitan saparitan dan saparitan saparitan



Aksi 1, Keluaran 1.1	Asumsi keluaran untuk aplikasi pengetahuan/inovasi  - Para pitak baik pemerintah, pelaku bisnis, organisasi non-pemerintah (LSM) dan lembaga tain menjalin kemitsaan mendakung inidusi gender dan pembangunan berkalanjutan.
	<ul> <li>Adanya inisitif para pihak untuk mendorong pembentukan kelompok kerja atau tim ihusus yang fokus pada pembendayaan penempuan di sektor perkebunan.</li> </ul>
Aksi 1, Keluaran 1.2	Pemerintah nasional mengidentifikasi data dasar perkebunan kelapa sawit sebagai prioritas strategis dan penting untuk kebijakan.
	<ul> <li>Dans yang dialoksikan mencakup investasi dalam teknologi informasi dan sistem yang modern untuk pengumpulan dan pemeliharaan data termasuk tindakan untuk mengurangi ketidakpastian dan potensi kesalahan dalam data perkebunan kelapa sawit.</li> </ul>
	Pemerintah memiliki koniomen yang kuat untuk mensantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan terkait data, kepasahan hukum, dan tata kelola.      Terdapat prioritas tinseli untuk trassparansi dan akuntabilitas dalam kebilakan tersebut.
	Nedapar produst onggi untuk transparansi dan akuntabetas dalam kelajakan sersekur.     Lembaga-lembaga pemerintah terlibut memiliki kapabilitas yang memadai dalam melakukan pemantasan dan evaluasi.
lksi 1, Keluaran 1.2	<ul> <li>Adariya prioritas pemerintah untuk keberlanjutan dan peningkatan funguionalitas platform.</li> </ul>
	Sumber daya mansala yang cukup dan berkualitas untuk mengelola dan mengembangkan platform.     Pemerintah menjalin kemitnan dengan pihak ekstemal, termasuk lembaga penelitian, unleenitas, atau sektor swasta, untuk memastikan kehandalan data dan analisis.
lkxi 1. Keluaran 1.4	Pelaksara di daerah memiliki kasasitas untuk persumpulan data dasar dan publik dasat mensakses data dasar melaksi pistform nasional
	Pelaksans di daerah memiliki kapa istas untuk pengumpulan data dasar; dan publik dapat mengakses data dasar melaki pitatform nasional     Melibatkan manyarakat setempat dalam pengumpulan data dan mematikan representasi yang iniduali dari berbagai pihak terkait.
lksi 1, Keluaran 1.S	Ada nya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
	Memberikan Pemerintah Caerah kebebasan untuk merancang dan mengelola program program yang sesuai dengan kondisi lolai.     Demarintah Dasarah menjalih kemilinan dengan nahai susuatu dan mitra pembasanyan untuk mendulan selampanyan PAN YOL
	Pemerintah Cuerah menjalin kemitraan dengan pihak swanta dan mitra pembangunan untuk mendukung implementasi RAN KSB.     Adanya mekanisme pelaporan yang dapat dipertanggungiawabkan dan diwerlikasi.
lksi 1, Keluaran 1.6	Pemerintah Pusat memiliki komitmen yang kuat terhadap princip pincip koordinasi multipihak.
	Adarija anggaran dan dukungan finansial untuk kepenluan administratif dan pelaksanaan program forum.     Adarija akses yang setara terhadap informasi di antara semua pihak yang terilbat.
	Forum memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang efektif.
lksi 2, Keluaran 2.1	<ul> <li>Adarnya komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah kepada PPI. dalam melakukan pendampingan/pelatihan ibagi pekebun terkait dengan diversifikasi.</li> </ul>
lksi 2, Keluaran2.2	PPL yang memiliki kapasitas dapat memberikan pendampingan yang memadal untuk para petani.
liksi 2, Keluaran2.2	Adarya komitmen pimpinan OPO untuk melakukan pengembangan kapasitas. OPO dapat bekerja sama dengan pihak ekstemal seperti lembaga pelatihan, universitas, atau organisasi lain untuk mendukuna nemembangan kanasitus.
	mendukung pengembangan kapasitas.  • OPO memiliki pemahaman yang jelas tentang kebutuhan kapasitas yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
	OPO memiliki sistem pengukuran dan evakuasi kinerja yang efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan dan melacak kemajuan pengembangan kapasitas.
Nksi 2, Keluaran 2.2	- Ads bezoegts regulasi yang mendukung untuk penyuwana kebijakan penyenganan prosedur STOB dan Implementasinya. Rebijakan penyengganan prosedur STOB disasun dangan mempentinbangi perbesahan kebijakan penyengganan prosedur STOB dan Implementasinya. Rebijakan penyengganan prosedur STOB disasun dangan mempentinbangi perbesahan kebijakan penyengganan penyenggan penyengan kebijakan, sebringga menceminiaha kebuduhan dan kondisi nyata.
	persecuan kondus ucus di bertagai daran, seninggi beruna nekobel cun adapar.  - Para pihak (pertan listipa susuit, asosiasi dindusti, dan manyankat setempat dilibatkan dalam proces penyusunan kebijakan, sehingga menceminkan kebutuhan dan kondisi nyata.
	<ul> <li>rerseda sum dan anggaran untuk merakaan persentan, perumusan kedijakan, seria peraksanaan imperientasi kedijakan penjeragaman prosedur siruk.</li> </ul>
Aksi 2, Keluaran 2.4	Tujuan dan mandaat e- STDB jelas dan dipahami oleh semua pihak terkuit, sehingga mendapatkan dukungan yang lebih besar.  Data yang diha silan oleh platform e-STDB datat diawakan secara efektif untuk mendukung senarahilan kepatawan dan pemuntawan keberlanjutan di sektor kelapa sawit.
	Osta yang dihasilkan oleh platform e-STDB dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan dan pemantasan keberlanjutan di sektor kelapa sawit.     Platform e-STDB dapat disdasta si dengan baik terhadan kondisi lokal di berbasai wilayah probleki lekapa sawit.
	Floriform e-STDB dapat diadaptasi dengan baik terhadap kondisi lidal di berbapai wilayah produksi lelapa sawit.     Adanya mekanisme evaluasi dan pemantauan yang sistematis untuk mengulur efeldisitsa dan dampak dari optimalikasi e-STDB.
lksi 2, Keluaran 2.5	Adarpa program pelatihan yang efekif unsik meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelala perkebuan kelapa sawit.     Adarpa alaksal senganan yang memalai untuk mendukung pelaksansan PSA dan penyeduan sanna serta prasarana yang diprikikan.
	Adanya alokasi anggaran yang memadal untuk mendukung pelaksanaan PSR dan penyedaan sarana serta prasarana yang diperlukan.
	Terdapat lahan yang layak dan sesuai untuk program peremajaan, dan langkah-langkah pemilihan lahan selah memperimbangkan keberlanjutan dan dampak lingkangan.  Petani memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke umber daya keuangan untuk mendukung partikipasi mereka dalam program PSR.
Nxi 2. Keluaran 2.6	
	*Récompoi tani mendapatkan kemudahan sikses ke sumber daya kesuregan untuk mendukung kegistan pertanian kelapa sawit mereka.     *Adanya program pelatihan dan peningkatan kapa itas untuk anggota kelompok tani, termasuk dalam hal marajemen pertanian, praktik keberlanjutan, dan penguatan keterampilan.
Nksi 2, Keluaran 2.7	Pemerintah dan perusahaan kelapa sawit memiliki konsismen tinggi untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan berkelanjutan yang responsif gender dan melakukan upaya proaktif untuk
	meningkatkan pemaharuan.  Dipenkkan kampanye edukasi kesadaran yang tercoganisir secara baik untuk meningkatkan pemahaman parapihak tentang pemingnya kebijakan berkelanjutan yang responsif gender dalam sektor
	Belapa szwit.  * Prizar di bidang beksisisujutan, indusif dan responsif gender dilibatkan dalam menyedakan wawasan dan pemahaman mendulum kepada para pihak.
	<ul> <li>Pacur a bidang benkuanjutan, industr dan responst geraer distancian dalam menyedakan wawasan dan pertunannan mendalam wapada piara prasi.</li> <li>Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengukur tingkat kesadaran para pihak terhadap kebijakan kelapa sawit berkelanjutan yang responsif gender.</li> </ul>
kxi 2. Kelupron 2.1	Tendarat keria sama dan koordinasi sant balk antara pemerintah, perusahaan, dan pihak-pihak terlait lainnus dalam penerembanyan dan implementasi labiliakan HCV dan HCS.
	*Embry taley, some den troud east une pale a strate presention, perceivant, den plank einhe levels trievan, darin perceivang den treplementers intellijkein (KC) fan KC.  *Embry talementelle sich an kriterium signe mennet kriterium ein Kolle (Sach Amendaus) erwonnen den treplementers intellijkein denges an kriterium erwonnen erwonnen kriterium erwonnen k
	<ul> <li>Penusahaan memiliki kingiran dan kesiapan serbai memanahi kebipikan NCV dan HCS, dan bahwa tendapat insendi stasu sariksi yang elektif serbai mendorong kepatahan tersebut.</li> <li>Adaman sembai kingiran dan kesiapan serbai melakaran memanahi kebipikan nikit tersebut.</li> <li>Adaman sembai dan serbai melakaran memanahi kebipikan memanahi kebipikan nikit tersebut.</li> </ul>
lksi 2, Keluaran 2.2	Pimpiran kementerian mendukung penuh implementari SDP.     Para pihak memiliki pemahaman mendalam tentang pendinanya keberlanjutan dan upawa pencesahan kerbuda.
	Adarqui telesologi perunatawan misang menungan kelenangkan kelenangkan perunggan kelenangkan perungkan kelenangkan perunggan kelenangkan perunggan kelenangkan perunggan kelenangkan perungkan perunggan kelenangkan perunggan kelenangkan perungkan kelenangkan perungkan kelenangkan perungkan perunggan kelenangkan perungkan kelenangkan kelenangkan kelenangkan kelenangkan kelenangkan kelenangka
lksi 2, Keluaran 2.2	<ul> <li>Pemerintah pusat memiliki komitmen yang tinggi terhadap perlindungan lingkungan dan pengelalaan sikosistern gambut, dan hal ini tercemin dalam kebijakan nasional.</li> <li>899UH dan RPPGG dapat diintegrasikan dan bersinegi dengan program nasional lainnya yang berhubungan dengan lingkungan dan ekosistern gambut, seperti program penurunan emisi karbon dan</li> </ul>
	Tandarest knowlines i vane efektif settere Demeriotek Dusst den Desemb delem meren ann den melaksansken 2001 til den 2005.
	<ul> <li>Percentah daerah secara peruh mengkatertakan diri dalam proses perrocanaan, implementasi, dan percentasan 599UH dan 599GG, serta mensiliki kelinginan untuk mengadopsi dan menyesualka dakumen tersebut dengan kondal lokal.</li> </ul>
	<ul> <li>Dukungan alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung Inplementasi RPPLH dan RPPEG.</li> </ul>
Aksi 2, Keluaran 2.4	Pimpinan kemerterian mendukung penuh implementasi SDP.
	Fara phak meniliki peranhaman mendalam tentang pentingnya koridor habitat dan menjaga area konservasi.     Para phak berperan aktif dalam menuntau dan memberikan masukan terhadap implementasi SDP, serta menjadi mitra kolaboratif dalam mencapai tujuan keberlanjutan.
liksi 2, Keluaran 2.5	<ul> <li>Pertilik atau pengelola perkebunan sawit memiliki komitmen untuk mengadopsi model ogroforestri, yang melibarkan pengintegrasian pohon-pohon jenis lain bersama tanaman sawit dalam sistem pertanian.</li> </ul>
	- Vertreum von der
Aksi 4, Keluaran 4.1	Proses penyauran Julios dan Juklak melibatkan partisipasi dan konsultasi yang kas dengan berbagai pihak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, kelompok perempuan, LSM, dan balammok kesentingan Juliosa.
	neraripun kepitraspira suuroja.  - Ada nja kepit sama yang balk antara pemerintah pusat dan pemerintah dalam pelaksanaan regulasi ini, termasuk pembagian tanggung jawab yang jelas.
	* Terdapat regulasi yang dihasilkan memberikan penekanan pada kesetaraan dan keadilan gerder, mengakui peran perempuan dalam tata kelola lahan, dan memastikan akses lahan yang inklusir.
	<ul> <li>Tendagast sluttem hakum yang kuat yang mendalung negulusi bersebut, dan bahau tendapast mekanim mengegakan hakum yang efekitif untuk menjamin kepastuhan.</li> <li>Tendagast lawasan mediasi vaner efekitif untuk menselesu kana sensebeta wane musekin binabi, denasan mengematikan auseki inkluari senselesu.</li> </ul>
	Fines previous black on black medicate proteins de intensities i que la deque helega joba pera que i sperit que rema a mujero tri de, i descrip pera pera pera pera pera pera pera per
	nurcul.
Aksi 4, Keluaran 4.2	Pemerintah pusat memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan sektor kelupa sawit berkelanjutan dan memahami pentingnya transfer anggaran sebagai salah satu instrumen untuk mendukana (nisiatif tersebut)
	Pemerintah daerah memiliki sistem yang akuntabel dan transparan dalam penggunaan dana yang diterima.
	**Mediang initial filmshit.  **Post counts benedia sendar dram industrial sings sawit memberahan dan sengangan sami sawa dan sendar dram industri sings sawit memberahan dalampa filmshiri arab sendar didarim.  **Post sensor benedia sendar dram industri sings sawit memberahan dalampa filmshiri arab selaturi bingsa untuk mendulung beharinjutan selaturi), iki melahi program bentitasan arab mendulung beharinjutan selaturi, iki melahi program bentitasan arab mendulung bentitasa
4ksi 4,Keluaran 4.2	Parapihak yang relevan, termasak manyarakat lokal, LSM, akademisi, dan organisasi non-pemerintah terlibat sixiff dalam platform, memberikan kontribusi dan membawa berugam pen pektif.      Penusahaan uswit dan perungku kepentingan wasata lainnya bergantsipasi secara aktif dalam platform, termasuk berbagi informasi, pengalaman, dan kontimen mereka terbadap psaktik.
	berkela rjutan.
	Adarqus sumber dans yang cukup untuk operasional dan pengembangan platform, baik dari pemerintah, donatur, atau sektor swasta, untuk memastikan kebefunjutan operasionalnya.     Terdapat koordinasi yang elekidi antara lembaga-lembaga dan institusi yang teribat dalam platform, termasuk kementerian terkait, badan sertifikasi, dan lembaga penelitian.
Action 6. Output 4.4	<ul> <li>Terdapit coordina yang enerat a mara sembaga-sembaga dan instituti yang sembat dalam puntom, semakua semensiran terdari, dadan tertinasi, dan sembaga persentan.</li> <li>Lembara keuansia memahami dan berkomismen terhadap orinsio ESC fernironmental, social, powerponer) dalam keputusan insentani menka, denara memperimbarakan dampak linakunsan, aud</li> </ul>
e. com 4, Dutput 4.4	
	sooid, din trata kelala yang balik.  - Lembaga kewangan benedia membelikan dakungan Finansial berkelanjutan untuk propek atau usaha kelapa sawit yang memenuhi kriteria keberianjutan, bahkan mungkin membelikan insentif atau banga yang kebel mendal untuk propek berkalanjutan.
lksi S, KelvaranS.1	Adarque program penyuluhan dan pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran petani dan pekabun tentang mantaut dan prosedur sentifikasi ISPO.     Keterseduan sumber daya balik dari pemerintah maupun pihak wasats untuk membarab petani dan pelabun dalam proses sentifikasi, seperdi akses terhadap dana, pelatihan, dan bimbingan teknis.
	<ul> <li>szerce-asan sumber daya bak dan pemenntah maspun pihak swasta untuk membantu petani dan pekebun dalam proses sertifikasi, seperti akses terhadap dana, pelatihan, dan bimbingan teknis.</li> </ul>
liksi S, Keluaran S.2	Komitmen pemerintah pusat untuk mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam dewan pengarah setifikasi ISPO, dengan mengakui nilai dari representasi yang inklusif.
	<ul> <li>Komörnen permeintah pusat untuk mendozong partisipasi skiff diri berbagai pikak dalam dewan pengunah sertifikasi (PO), dangan mengakai nikai dan impersentasi pang inikisal?</li> <li>Yasu pikai mendukung dan membahan tiapentingsak bersitaban malipikak dalah misuan pengunah sertifikasi (PO) sebagai langkis kerjering mengali berban pikatas selebar inispas sawat.</li> <li>Yasu pikai mendukung dan membahan tiapentingsak sertebaka sertebahan malipikak dalah pengunan pengunah sertebakan sertebakan</li></ul>
Akri S. Kelyaran S.2	Pemerintah memberikan dukuntan penuh terhadap lebilakan dan merujati yang mempromosikan penggunaan kelapa sawit bersertifikasi, termasuji inseritifikasi nemesirian hukum wang tenan
	<ul> <li>Persektah memberikan dakungan penuh terbadap kebipikan dan regulasi yang mempromosikan penggunasa kelapa sawit benerifikasi, termasuk hosefif dan penegakan hukum yang tepat.</li> <li>Edukai sipada pikai keriman penuhan mengenai pendinyai beheriapkan dalam indarit kelapa anasu, eseri memberian penuhaman tentrai penjementasi dan mandasi serifikasi.</li> <li>Penseletah mengedakan interefi, talakai, sata siribusi, keciman dan pensahanan yang sepada dan menjedakan penggunasi belapa sesi benerifikasi siribusi.</li> <li>Penseletah mengedakan interefi, talakai, sata siribusi, keciman dapi pensahanan yang sepada dan menjedakan penggunasi belapa sesi benerifikasi siribusi.</li> </ul>
	Pemerintah menyediakan insentif, fasilitas, atau stimulus ekonomi bagi perusahaan yang mengadopsi dan meningkatkan penggunaan kelapa sawit bersentifikasi untuk mendorong adopsi praktik
	behelanjutan.  • Adanya audit internal dan eksternal secara teratur untuk memverilikasi dan memastikan bahwa praktik-praktik keberlanjutan sesuai dengan standar yang diharapkan.
Mxi.S Keluaran S.4	Ada nas divertifikasi dan inovasi produk kala pa sawit berlela niutan, seperti mema sankan produk dengan label berlela niutan atau mengembanakan produk turunan yang ramah lingkungan.
	* Endage in investaci jang piakap dalam terkelap dan invosai saria mengendungkan prose penakai jang labah feliana dan meneglakan olal serdah janda poda kanunan sariak (antanan sariak penakan penakan jang tegah dan meneglakan olal serdah jang teggi. **Endaget storak penakan jang dalam dan sariak penakan penaka
	Terdapat strategi persasaran yang efektif untuk memasarkan produk turunan sawit dengan nilai tambah yang tinggi.      Terdapat strategi persasaran yang efektif untuk memasarkan produk turunan sawit dengan nilai tambah, termasuk pengembangan pasar baru dan peninekatan aksas ke pasar elobal.
	Adanya standar eco-label yang relevan, akurat, dan dapat dandalkan yang menceminkan kriteria keberlanjutan yang tinggi untuk produk kelapa sawit bemerifikasi, termasuk ISPO.
	Tendapat sistem pemantauan dan verifikasi yang efektif untuk memastikan bahwa produk kelapa sawit bensetifikasi ISPO dan sertifikasi voluntary lainnya memenuhi standar eco-label yang ditetap
ksi S, Keluaran S.S	Persangku kaperdingan, termasuk pemerintah, indunti, dan ISM, memiliki pemahanan yang jaksa tentang ku-isu kebedanjutan datam produksi kelapa sawi dan mampu menyampalkan informasi tersebut dinegan siyak kepada insumen.     Persentish memiliki kontrinen untah mendukung kampanya kesadaran korumen melalui aldasi anggaran, kebipkan dikungan, dan kerja sama dengan pihak swesta.
	Pemerintah memiliki komitmen untuk mendukung kampanye kesadaran konsumen melalui alokasi anggaran, kebijakan dukungan, dan kerja sama dengan pihak swasta.
	Tensedia dana dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kampa nye kesadaran, termasuk dana dari pemerintah, industri, dan organisasi non-profit. Terdapat kalaborasi dengan meda massa dan figur publik (selebris) untuk memperluas ja ngis uan kampanye dan meningisatian daya tarik pesan kesadaran konsumen.
	<ul> <li>Terdapat kalaborasi dengan media massa dan figur publik (selebris) untuk memperisas jangkasan kampanye dan meningkatkan daya tarik pesan kesadaran konsumen.</li> <li>Kampanye melibatkan komunitas idial secara langsung, dengan memperimbangkan konteks budaya dan keuritan lokal untuk meningkatkan efektivitas kampanye.</li> </ul>

		1	Asumsi untuk te
Asums	ii untuk mencapai keberhasilan dan terlemahan dari hasi	1.037266	<ul> <li>Adanya infrastr</li> </ul>
Hasi7 10.1	Pemerintah Indonesia memiliki regulasi yang lelas, konsisten, dan mudah digahami		menyediakan dat
	terkait perkebusan kelapa sawit, termasuk persyaratan terkait inklusi eender.		Adanya keterlit
	<ul> <li>Perusahaan patuh untuk memenuhi peruyaratan PUP dan mempertahankan sertifikasi</li> </ul>		Kolaborasi yan     Iainnya untuk me
	berkelanjutan		Adanya dorong
			terhadap praktik
			<ul> <li>Adanya insenti</li> </ul>
			praktik-praktik y
Hasi 10.2	Adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan	Hasil LO.2	Pemerintah dar
131110.3	pemerintah daerah untuk memastikan kesesuaian dan dukungan nasional terhadap	Manifesta	dan ekosistem, s
	kebijakan kelapa sawit berkelanjutan.		mendukung seca
	<ul> <li>Adanya kerja sama dan koordinasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan LSM</li> </ul>		<ul> <li>Terdapat peng</li> </ul>
	untuk mendukung implementasi dan pemantauan STDB.  • Pemerintah daerah memiliki kapasitas administratif dan teknis yang memadai untuk		kebijakan pelest
		HASTO S	peringatan dini d • Pemerintah pu
	mengimplementasikan dan mengawasi penerbitan STDB serta memastikan keberjanjutan dan inklusi pender.	Man LO.	mengimplements
	Petani kelaga sawit memiliki pemahaman yang memadai tentang manfaat penerbitan		pendahan klim.
	STDB dan mereka terlibat aktif dalam proses tersebut.		<ul> <li>Masyarakat, te</li> </ul>
1.01 (100)	Penusahaan perkebunan kelapa sawit menpelola hutan secara bertangguna jawab		termasuk tanah,
	denran meneraskan praktik oraktik berkelanjutan.	1	Terdapat dukur
	Komunitas lokal terlibat aktif dalam pengelolaan hutan dan mendukung prinsip	1	menjadi wadah u • Adanya peninsi
	berkelanjutan dalam operasional perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka.		lainnya pening
	<ul> <li>Adanya sistem pengawasan dan pelaporan yang efektif untuk memantau dampak</li> </ul>		Tarriga Graza Fre
	operasional perkebunan kelapa sawit terhadap tutupan hutan, dan bahwa hasilnya dagat diakwa oleh olhak terkait.		
	Rencana tata ruang wilayah mempersimbangkan keberlanjutan hutan dan lahan, serta		
	menestur perkebunan kelaga sawit asar tidak menusikan tutupan hutan yang terjaga.		
Hasil 10.4	Terbangunnya harmonikasi/Nemitraan antara perkebunan kelapa sawit dengan		
ISSE 10.4	Tertangunnya harmonicasi, wemtraan antara pensebutan serapa sawit bengan masyarakat sekitar kawasan perkebunan.		
	Adanya sistem pengelolaan konflik yang efektif dan mekanisme penyelesalan		
	seneketa yang diterapkan di dalam dewan pengarah sertifikasi ISPO untuk mengatasi		
	perbedaan pendapat.		
Hasil IO.S	Adanya regulasi yang kuat dan konsisten yang mendukung praktik-praktik		
	berkela njutan dalam industri kela pa sawit, dan bahwa regulasi tersebut memberikan insentif positif basi penerapan ISPO.		
	insentif positif bagi penerapan SPO.  • Penusahaan kelapa sawit bersedia untuk menjadi lebih transparan dalam melaporkan		
	praktik-praktik mereka dan bahwa ada sistem pelaporan yang efektif untuk memantau		
	keberlarjutan.		
	<ul> <li>Adanya insentif ekonomi jangka panjang dalam mendukung kelapa sawit</li> </ul>		
	berkelanjutan, seperti akses lebih baik ke pasar internasional dan perbedaan harga		
	jang menguntungkan.  • Terdapat kemitraan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, penyuahaan, dan		
	<ul> <li>Terdapat kemitisan dan kolaborasi yang kuat antara pemenisan, perusahaan, dan Industri untuk meninekatkan graktik-graktik berkelanjutan dan mendorone ISPO.</li> </ul>		
	Adanya meulasi yane kuat dan konsisten yane mendukune praktik-oraktik		
	berkelanjutan dalam industri kelapa sawit, dan bahwa regulasi tersebut memberikan		
	insentif positif bagi penerapan ISPO.		
	Perusahaan kelapa sawit bersedia untuk menjadi lebih transparan dalam melaporkan		
	praktik-praktik mereka dan bahwa ada sistem pelaporan yang efektif untuk memantau		
	keberlarjutan.  • Adanya insentif ekonomi jangka panjang dalam mendukung kelapa sawit		
	berkela niutan, seperti akses lebih baik ke pasar internasional dan perbedaan harara		
	yang menguntungkan.		
	a Tandanat kamitraan dan kelabarasi yang kuat antara pamasintah, panusibaan, dan		

	Asumsi untuk terjemahan dari hasil menuju dampak
Hasilto.1	<ul> <li>Adanya infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mengumpulkan, menyimpan, dan</li> </ul>
	menyediakan data yang akurat.
	<ul> <li>Adanya keteribatan dalam kemitraan dan aliansi industri yang mendorong praktik berkelanjutan.</li> </ul>
	<ul> <li>Kolaborasi yang baik antara produsen kelaga sawit, produsen produk konsumen, dan pihak terkai</li> </ul>
	lainnya untuk mencapai tujuan berkelanjutan bersama.  - Ada nya doronsan dan insentif dari pemerintah untuk memastikan kepatuhan dan pensawasan ak
	<ul> <li>Adanya dorongan dan insentir dan pemenntan untuk memastikan separanan dan pengawasan ak terhadag oraktik-oraktik berkelanjutan di sektor kelapa sawit.</li> </ul>
i .	Adanya insendif dan penghangsan yang dapat meningkatkan motivasi perusahaan untuk mengado
	praidit-praktik yang berkelanjutan.
Hasil CO.2	Pemerintah dan pihak swusta memiliki komitmen tinggi terhadas pelestarjan keunekara saman h
Marit LUI 2	dan ekpsistem, serta pencerahan kebakaran hutan dan lahan, dengan menerapkan kebilakan yang
	mendukung secara konsisten dan efektif.
	Terdapat pengawasan dan penerakan hukum yang efektif untuk mencegah pelanggaran terhada
	kebilakan pelestarian keanekaragaman hayati dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sistem
	peringatan dini dan deforestasi nol dapat menjamin kelestarian keanekarawaman hayati.
HMILO'S	Pemerintah pusat dan daerah memberikan dukunsan dan kecemimpinan yang kuat dalam
	mengimplementasikan kebijakan dan program yang mendukung ketahanan masyarakat terhadap
	perubahan klim.
	<ul> <li>Masyarakat, termasuk petani/pekebun, memiliki akses yang adil dan setara terhadap sumber da</li> </ul>
	termasuk tanah, air, dan layanan esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas infrastruktur
	<ul> <li>Terdapat dukungan untuk penguatan organisasi masyarakat, seperti kelompok tani, yang dapat</li> </ul>
	menjadi wadah untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya.
	<ul> <li>Adanya peningkatan dukungan internasional dalam bentuk pendanaan, teknologi, dan kerja sama</li> </ul>
	lainnya untuk mendukung ketahanan masyarakat Indonesia terhadap perubahan iklim.

Gambar 8. Teori perubahan untuk penguatan inisiatif kelapa sawit berkelanjutan di tingkat nasional

untuk mendukung ketertelusuran; mendorong koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk merancang dan mengelola programprogram yang sesuai dengan kondisi lokal; dan optimalisasi forum multipihak di tingkat nasional untuk koordinasi antar lembaga/institusi.

Pada aspek peningkatan kapasitas pekebun dan percepatan peremajaan, beberapa kegiatan yang direkomendasikan adalah rekrutmen PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) khusus untuk pendampingan kelapa sawit; penyeragaman modul pendampingan dan peningkatan kapasitas PPL dalam training-of-trainers; pelatihan untuk pengembangan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung inisiatif dan komitmen kelapa sawit berkelanjutan di tingkat tapak; mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan untuk penyeragaman prosedur dalam mengeluarkan STDB; pemeliharaan *platform* e-STDB; percepatan implementasi kebijakan, dukungan pendanaan dan penyederhanaan prosedur untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan perbaikan/peningkatan sarana dan prasarana; membentuk kelembagaan kelompok tani yang inklusif gender untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas dan adopsi praktik-praktik keberlanjutan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit; serta sosialisasi dan edukasi para pihak terkait kebijakan kelapa sawit berkelanjutan yang responsif gender.

Beragam kegiatan ini akan menghasilkan keluaran (output) yang akan berkontribusi pada hasil jangka menengah (intermediate outcomes) berupa meningkatnya kepatuhan hukum pelaku bisnis dan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mengeluarkan STDB guna mendorong peningkatan hasil dan kualitas produksi kelapa sawit berkelanjutan yang inklusif gender. Sementara itu, hasil jangka panjang (longterm outcomes) yang diharapkan dapat tercapai adalah penciptaan tata kelola yang transparan, efisiensi ketertelusuran dalam mendukung kebijakan kelapa sawit yang berkelanjutan, dan responsif inklusi gender untuk memperkuat posisi tawar rantai suplai kelapa sawit di tingkat nasional dan global. Jalur perubahan ini ditunjukkan pada Gambar 9.

#### Jalur Perubahan 2

Jalur perubahan ini berkontribusi pada komponen RAN KSB:

- 1. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- 2. Tata kelola dan penanganan sengketa

Pada aspek pengelolaan dan pemantauan lingkungan, beberapa kegiatan yang direkomendasikan adalah integrasi dan implementasi kebijakan untuk pengelolaan area HCV dan HCS; edukasi dan sosialisasi kepada para pihak untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pencegahan karhutla serta pemahaman akan kawasan dan fungsi hutan; edukasi dan sosialisasi kepada para pihak terkait Rencana Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) nasional agar sinergi dengan dokumen tingkat daerah; edukasi dan sosialisasi kepada para pihak terkait koridor habitat dan area konservasi; serta implementasi atau pengembangan model agroforestri baik pada perkebunan sawit yang sudah ada (existing) maupun yang baru.

Pada aspek tata kelola dan penanganan sengketa, beberapa kegiatan yang direkomendasikan adalah pengembangan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) regulasi terkait tata kelola lahan dan sengketa; mendorong perubahan kebijakan dalam transfer anggaran DBH untuk mendukung inisiatif kelapa sawit berkelanjutan yang sudah ada maupun yang baru diinisiasi; optimalisasi *platform* untuk memantau perkembangan inisiatif kelapa sawit berkelanjutan; pengembangan skema pendanaan dari lembaga keuangan dalam pelaksanaan inisiatif kelapa sawit berkelanjutan.

Beragam kegiatan ini akan menghasilkan keluaran yang akan berkontribusi pada hasil jangka menengah berupa terjaganya tutupan hutan lewat operasionalisasi perkebunan kelapa sawit yang menjalankan prinsip berkelanjutan; dan berkurangnya konflik antara masyarakat dengan para pihak sehingga meningkatkan efektivitas tata kelola pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Dalam jangka panjang, hasil jangka panjang yang diharapkan dapat tercapai adalah terjaminnya kelestarian keanekaragaman hayati

#### Tujuan atau Dampak

Pengurangan deforestasi dan emisi gas rumah kaca, peningkatan keanekaragaman hayati dan peningkatan ketahanan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia pada tahun 2030.

#### Jalur Perubahan 1

Data, kepatuhan hukum dan tata kelola

#### Hasil Jangka Panjang 1

Menciptakan tata kelola yang transparan, efisien ketertelusuran dalam mendukung kebijakan kelapa sawit yang berkelanjutan dan responsif inklusi gender untuk memperkuat posisi tawar rantai suplai kelapa sawit di tingkat nasional dan global.

#### Hasil Jangka Menengah 1

Meningkatnya kepatuhan hukum pelaku bisnis perkebunan sawit yang inklusi gender untuk memenuhi persyaratan dan berkomitmen mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.

#### Hasil Jangka Menengah 2

Memperkuat komitmen pemerintah daerah (bupati/walikota) dalam mengeluarkan STDB (surat tanda daftar budidaya) guna mendorong peningkatan hasil dan kualitas produksi kelapa sawit berkelanjutan dan inklusi gender di Indonesia.

#### Keluaran 1

- 1.1 Kebijakan/peraturan untuk koordinasi, konsolidasi dan sinkronisasi inisiatif dan data perkebunan antar institusi/lembaga yang responsif gender
- 1.2 Dukungan pendanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun non-APBN untuk ketersediaan data dasar perkebunan kelapa sawit termasuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan terkait data, kepatuhan hukum dan tata kelola
- 1.3 Optimalisasi penggunaan platform nasional untuk pemantauan dan evaluasi perkembangan berbasis bukti (evidence-based)
- 1.4 Data dasar perkebunan kelapa sawit (yang mencakup smallholder laki-laki dan perempuan) dalam satu platform yang dapat diakses publik
- 1.5 Fleksibilitas penggunaan insentif kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan atas kepatuhan pemenuhan komponen RAN KSB (Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan)
- 1.6 Forum multipihak di tingkat nasional berfungsi optimal untuk koordinasi antar lembaga/institusi dari tingkat nasional sampai daerah

#### Keluaran 2

- 2.1 Peningkatan kuantitas dan kapasitas Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) khusus sektor kelapa sawit
- 2.2 Pengembangan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- 2.3 Kebijakan untuk penyeragaman prosedur STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) dan implementasinya
- 2.4 Optimalisasi platform e-STDB (surat tanda daftar budidaya elektronik)
- 2.5 Dukungan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan dukungan sarana dan prasarana
- 2.6 Pembentukan kelembagaan kelompok tani yang inklusi gender
- 2.7 Peningkatan pemahaman para pihak tentang kebijakan kelapa sawit berkelanjutan yang responsif gender

### Gambar 9. Jalur perubahan 1

dan ekosistem serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan, termasuk pengelolaan perkebunan dan pengelolaan serta pemantauan lingkungan. Jalur perubahan ini ditunjukkan pada Gambar 10.

#### Jalur Perubahan 3

Jalur perubahan ini berkontribusi pada komponen RAN KSB:

 Pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses produk kelapa sawit Pada aspek pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses produk kelapa sawit, beberapa kegiatan yang direkomendasikan adalah percepatan dan dukungan pendanaan sertifikasi ISPO bagi pekebun; mendorong pelibatan para pihak dalam Dewan Pengarah Sertifikasi ISPO; pengembangan untuk peningkatan suplai sawit tersertifikasi ISPO; pengembangan skema insentif harga premium terhadap produk bersertifikasi ISPO; pengembangan nilai tambah produk turunan sawit sehingga hasil produksi tidak dijual dalam bentuk bahan mentah; mendorong peningkatan

#### Tujuan atau Dampak

Pengurangan deforestasi dan emisi gas rumah kaca, peningkatan keanekaragaman hayati dan peningkatan ketahanan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia pada tahun 2030.

#### Jalur Perubahan 2

Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem

#### Hasil Jangka Panjang 2

Terjaminnya kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, termasuk pengelolaan perkebunan dan pengelolaan serta pemantauan lingkungan.

#### Hasil Jangka Menengah 3

Tutupan hutan terjaga dengan operasionalisasi perkebunan kelapa sawit yang menjalankan prinsip berkelanjutan.

#### Hasil Jangka Menengah 4

Berkurangnya konflik antara masyarakat dengan para pihak sehingga meningkatkan efektivitas tata kelola pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.

#### Keluaran :

- 3.1 Kebijakan untuk pengelolaan area HCV (High Conservation Value) dan HCS (High Carbon Stock) terintegrasi dan diimplementasikan
- 3.2 Implementasi SOP di kementerian terkait untuk meningkatkan pemahaman para pihak terkait prinsip-prinsip keberlanjutan, pencegahan karhulta, dan pemahaman akan kawasan dan fungsi hutan
- 3.3 Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) nasional dan sinergi dengan dokumen tingkat daerah
- 3.4 Implementasi SOP untuk meningkatkan pemahaman para pihak terkait koridor habitat dan area konservasi meningkat
- 3.5 Model agroforestry pada perkebunan sawit yang sudah ada (existing) dan yang baru

#### Keluaran 4

- 4.1 Juknis dan Juklak regulasi terkait tata kelola lahan dan penyelesaian sengketa (misal: akses lahan yg inklusif gender)
- 4.2 Peningkatan transfer anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maupun sumber lainnya (non-APBN), untuk mendukung inisiatif kelapa sawit berkelanjutan
- 4.3 Platform nasional perkembangan inisiatif sawit berkelanjutan berfungsi optimal
- 4.4 Skema pendanaan dari lembaga keuangan (misal: perbankan) dalam pelaksanaan prinsip keberlanjutan pada usaha kelapa sawit

#### Gambar 10. Jalur perubahan 2

eco-label produk kelapa sawit yang bersertifikasi ISPO maupun sertifikasi sukarela lainnya; dan mendorong sosialisasi atau kampanye peningkatan kesadaran konsumen di masyarakat dan media sosial.

Beragam kegiatan ini akan menghasilkan keluaran-keluaran yang akan berkontribusi pada hasil jangka menengah berupa meningkatnya komitmen pemerintah, perusahaan, dan industri untuk mendukung rantai pasok sawit yang berkelanjutan; serta meningkatnya harga tandan buah segar (TBS) dan produk turunan yang bersertifikasi ISPO. Kemudian hasil jangka panjang yang diharapkan dapat tercapai adalah meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan masyarakat, termasuk petani atau pekebun rakyat yang inklusif gender untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Jalur perubahan ini ditunjukkan pada Gambar 11.

#### Tujuan atau Dampak

Pengurangan deforestasi dan emisi gas rumah kaca, peningkatan keanekaragaman hayati dan peningkatan ketahanan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia pada tahun 2030.

#### Jalur Perubahan 3

Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan usaha yang berkelanjutan

#### Hasil Jangka Panjang 3

Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan masyarakat (termasuk petani/pekebun) yang inklusi gender dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Indonesia.

#### Hasil Jangka Menengah 5

Meningkatnya komitmen pemerintah, perusahaan dan industri untuk mendukung rantai pasok sawit berkelanjutan, harga tandan buah segar (TBS) dan produk turunan yang bersertifikasi ISPO.

#### Keluaran 5

- 5.1 Peningkatan jumlah dan luasan lahan perkebunan petani dan pekebun (laki-laki dan perempuan) yang tersertifikasi *mandatory* ISPO maupun *voluntary* meningkat
- 5.2 Peningkatan keterlibatan multipihak dalam dewan pengarah sertifikasi ISPO
- 5.3 Kebijakan untuk peningkatan suplai sawit tersertifikasi ISPO maupun sertifikasi voluntary di perusahaan (BUMN-Badan Usaha Milik Negara/BUMD-Badan Usaha Milik Daerah dan non-BUMN/D) dan industri
- 5.4 Nilai tambah produk turunan sawit meningkat sehingga produksi tidak dijual dalam bentuk bahan mentah
- 5.5 Peningkatan kesadaran konsumen melalui sosialisasi atau kampanye di masyarakat dan media sosial

Gambar 11. Jalur perubahan 3

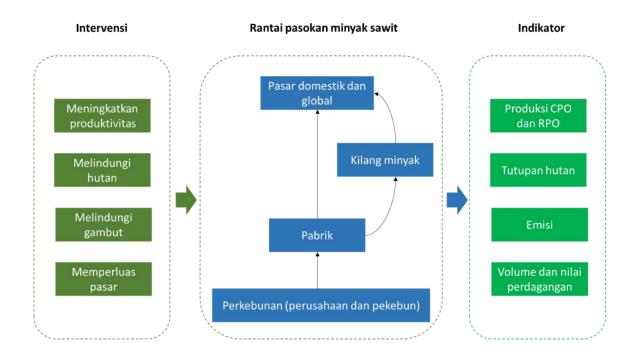
# 3 Simulasi Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan Melalui SIPOS *(Simulation of Indonesian Palm Oil Sustainability)*

### 3.1 Kerangka Model SIPOS

SIPOS merupakan alat untuk memodelkan skenario kebijakan kelapa sawit berkelanjutan. Arsitektur dari SIPOS ini (Gambar 12) terdiri atas tiga komponen utama, yakni: rantai suplai kelapa sawit, pembangunan intervensi atau skenario kebijakan, dan indikator untuk mengevaluasi keluaran dari masing-masing skenario. Skenario kebijakan yang dikembangkan melalui intervensi produksi, perlindungan hutan dan gambut, dan perluasan pasar dimodelkan dalam sistem rantai suplai kelapa sawit saat ini. Keluaran dari kebijakan/intervensi ini kemudian dipantau dampaknya berdasarkan indikator seperti pengaruh pada produksi CPO dan RPO (refined palm oil), tutupan lahan, emisi dan volume, serta nilai perdagangan kelapa sawit.

SIPOS menggunakan data statistik untuk mensimulasikan pertumbuhan perkebunan, produksi minyak kelapa sawit, emisi dari rantai suplai kelapa sawit dan perdagangan di sektor domestik dan global. Kami juga menggunakan data tutupan lahan historis untuk menghasilkan matriks transisi guna memproyeksikan perubahan penggunaan lahan dan emisi di masa depan akibat dari pengembangan kebun kelapa sawit. Sumber data untuk masing-masing komponen dalam SIPOS ditunjukkan pada Lampiran 3.

Skenario dalam model SIPOS terdiri dari BAU (business as usual), tanpa gambut dan tanpa deforestasi (no deforestation and no peatl NDP), serta NDP dan manfaat tambahan dari intensifikasi, sertifikasi yang disertai dengan harga premium, pajak karbon, dan transfer fiskal berbasis ekologis. Skenario BAU mencakup kegiatan



Gambar 12. Model SIPOS rantai suplai kelapa sawit

operasional dalam perkebunan kelapa sawit yang biasa dilakukan sesuai dengan standar operasional yang ada (BAU). Hasil pemodelan SIPOS pada skenario BAU akan menghasilkan simulasi keluaran berdasarkan praktik dan konteks yang ada saat ini (existing). Sementara pada skenario kebijakan, SIPOS memodelkan intervensi kebijakan yang dijabarkan dalam RAN KSB. Model ini memproyeksikan masa depan sebagai dampak dari implementasi intervensi untuk mencapai kelapa sawit berkelanjutan.

SIPOS dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk memahami sinergi dan *trade-off* antara faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Model simulasi yang dihasilkan memungkinkan pengguna untuk mengikuti dan memahami proses *input* dan *output* yang dihasilkan dari penerapan skenario. Pengguna juga mampu mengenali kemungkinan titik intervensi dan siapa yang akan terdampak (Purnomo dkk. 2020).

Dalam pengembangan model, perlu diterapkan prinsip keseimbangan yang tepat antara kompleksitas dan kesederhanaan dalam mengakomodir variabel yang relevan (Purnomo dkk. 2020). Namun, ada tantangan dalam ketersediaan data pada sektor kelapa sawit di

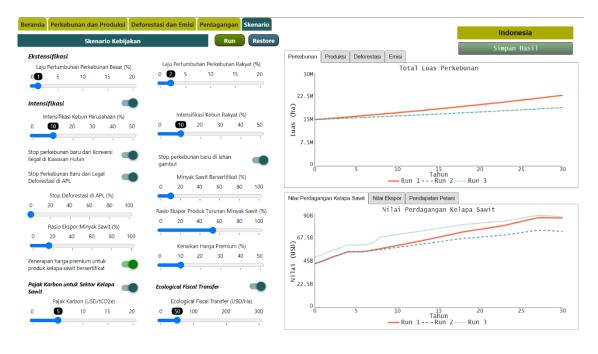
Indonesia sehingga tim peneliti perlu melakukan ekstrapolasi dan interpolasi untuk melengkapi kekosongan data yang dibutuhkan untuk simulasi.

## 3.2 Pemodelan Dampak Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan Melalui SIPOS

Untuk memodelkan dampak kebijakan kelapa sawit berkelanjutan melalui SIPOS, kami mengembangkan tiga skenario kebijakan untuk memproyeksikan pengelolaan kelapa sawit dengan tahun 2019 sebagai data dasar atau tahun nol (Gambar 13). Skenario ini adalah:

Skenario I: Kondisi pengelolaan sawit yang sedang berjalan (BAU) dengan mengakomodir perkembangan dari berbagai inisiatif telah diimplementasikan untuk mencapai sawit berkelanjutan. Penggunaan istilah BAU pada simulasi model tidak mengabaikan inisiatif yang sedang berjalan, tetapi untuk membedakan kondisi terkini dengan implementasi kebijakan di masa mendatang.

**Skenario II:** Kondisi pengelolaan sawit saat kebijakan NDP diimplementasikan. Kebijakan NDP ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 mengenai RAN KSB. Pada kebijakan



Gambar 13. Antarmuka model Simulation of Indonesian Palm Oil Sustainability (SIPOS)

Model ini dapat diakses melalui tautan: https://exchange.iseesystems.com/public/cifor-vfi/sipos-id

ini model merujuk pada implementasi kebijakan tanpa deforestasi yang tidak mengembangkan kelapa sawit yang berasal dari hutan dan tidak mengembangkan sawit secara ilegal di dalam kawasan hutan. Model ini juga merujuk pada tanpa gambut yaitu tidak ada pengembangan baru di atas gambut berapa pun kedalamannya.

Skenario III: Kombinasi antara kebijakan NDP dengan implementasi intensifikasi, sertifikasi, dan insentif berupa harga premium, pajak karbon dan transfer fiskal berbasis ekologis (EFT). Pada skenario ini, kami mengasumsikan intensifikasi sebesar 10% diimplementasikan di perkebunan besar dan rakyat, harga premium sebesar 10% untuk produk yang bersertifikat, pajak karbon dari sektor kelapa sawit sebesar US\$5/ton dan EFT sebesar US\$50/ha. Apabila merujuk pada RAN KSB, maka skenario-skenario ini menggambarkan implementasi komponen peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit, serta insentif untuk penguatan implementasi kelapa sawit berkelanjutan di level tapak.

## 3.3 Dampak Kebijakan terhadap Indikator Sawit Berkelanjutan

Dengan mengacu pada tiga skenario kebijakan di atas, SIPOS mensimulasikan hasil pemodelan terhadap indikator sawit berkelanjutan. Rangkuman dampak dari skenario kebijakan yang dimodelkan melalui SIPOS ini disajikan pada Tabel 6.

## 3.4 Dampak Kebijakan terhadap Perkembangan Perkebunan Sawit

Pada skenario BAU, luasan perkebunan sawit diproyeksikan akan terus bertambah sebesar 16,5 juta ha pada tahun 2029 (grafik *run* 1 pada Gambar 14). Sementara itu, pada skenario kebijakan NDP (grafik *run* 2) dan kombinasi kebijakan NDP dengan intensifikasi, sertifikasi dan insentif (grafik *run* 3), terjadi perlambatan perluasan perkebunan sawit sebesar 4,2% dari BAU. Perlambatan ini dikarenakan perkebunan sawit tidak boleh dikembangkan di atas lahan gambut berapa pun kedalamannya.

## 3.5 Dampak Kebijakan terhadap Deforestasi dari Sektor Kelapa Sawit

Pada skenario BAU, deforestasi akan terus mengalami peningkatan dan angka kumulatif deforestasi pada tahun ke-10 mencapai 494,3 ribu ha (grafik run 1 pada Gambar 15). Pada skenario kebijakan, implementasi kebijakan NDP mampu menurunkan angka deforestasi kumulatif menjadi 0 (grafik run 2 dan run 3). Pada skenario kebijakan NDP yang dikombinasikan dengan intensifikasi, sertifikasi, dan insentif, laju deforestasi mengalami tren yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa laju deforestasi tetap dapat ditekan selama kebijakan NDP diimplementasikan.

Tabel 6. Pengaruh skenario kebijakan terhadap indikator sawit berkelanjutan\*

Indikator	Satuan	Skenario I BAU	Skenario II NDP	Skenario III kombinasi NDP, intensifikasi, sertifikasi dan insentif
Perkembangan areal perkebunan sawit	Juta ha	16,5	15,8	15,8
Deforestasi kumulatif	Ribuan ha	494,3	0	0
Emisi	Juta ton CO₂e	218	169	174
Volume produksi CPKO	Juta ton CPOe	48,7	47,6	52,3
Nilai perdagangan	Miliar dolar AS	55,7	55,2	62,5

<sup>\*</sup>Angka dalam tabel merupakan hasil skenario pada tahun ke-7 (tahun 2029) yang mengambarkan dampak implementasi satu periode setelah perpanjangan RAN KSB pada tahun 2024.



Gambar 14. Simulasi perkembangan perkebunan sawit dengan berbagai skenario kebijakan

Keterangan:

Run 1 adalah skenario BAU

Run 2 adalah skenario kebijakan NDP

Run 3 adalah skenario kebijakan NDP dengan kombinasi intensifikasi, sertifikasi, harga premium, pajak karbon, dan transfer fiskal berbasis ekologis



Gambar 15. Simulasi deforestasi dengan berbagai skenario kebijakan

Keterangan:

Run 1 adalah skenario BAU

Run 2 adalah skenario kebijakan NDP

Run 3 adalah skenario kebijakan NDP dengan kombinasi intensifikasi, sertifikasi, harga premium, pajak karbon, dan transfer fiskal berbasis ekologis

### 3.6 Dampak Kebijakan terhadap Emisi dari Sektor Kelapa Sawit

Model SIPOS menujukkan bahwa emisi yang paling signifikan berasal dari oksidasi gambut perkebunan yang ada, limbah pabrik, kegiatan pembukaan lahan, dan limbah kilang minyak sawit (Gambar 16). Oksidasi lahan gambut menjadi sumber emisi terbesar dari sektor kelapa

sawit karena lebih dari 50% areal sawit berada di lahan gambut. Oksidasi gambut terjadi karena menurunnya kadar air tanah akibat drainase atau pembuatan parit-parit pada perkebunan sawit yang mengakibatkan penguraian bahan organik tanah (Yahya 2019). Langkah-langkah keberlanjutan saat ini dapat mengurangi, tetapi tidak menghentikan emisi karbon dari gambut (Purnomo dkk. 2020). Limbah cair pabrik kelapa sawit (*palm oil mill* 



Gambar 16. Ragam sumber emisi sektor kelapa sawit pada skenario BAU



Gambar 17. Simulasi emisi tahunan dari kelapa sawit dengan berbagai skenario kebijakan

Keterangan:

Run 1 adalah skenario BAU

Run 2 adalah skenario kebijakan NDP

Run 3 adalah skenario kebijakan NDP dengan kombinasi intensifikasi, sertifikasi, harga premium, pajak karbon, dan transfer fiskal berbasis ekologis

effluent/POME) dan oksidasi lahan gambut merupakan sumber emisi karbon terbesar dari sektor kelapa sawit. Limbah cair pabrik yang dihasilkan selama proses pengolahan TBS menjadi CPO juga menghasilkan emisi CO<sub>2</sub> dan gas metan CH<sub>4</sub> yang cukup besar dari sektor kelapa sawit (Arjuna dan Santosa 2018).

Skenario BAU menunjukkan emisi dari produksi dan pengolahan kelapa sawit mencapai 218 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2029. Jika skenario kebijakan NDP diimplementasikan, maka emisi dari sektor perkebunan kelapa sawit akan jauh lebih rendah (Gambar 17). Pada tahun ke-10, skenario ini mampu menurunkan emisi hingga 56 juta ton CO<sub>2</sub>e atau 22,5% dari BAU (Tabel 6, grafik *run* 2 pada Gambar 17). Skenario

kebijakan NDP kombinasi intensifikasi dan insentif menunjukkan tren yang sama (grafik *run* 3 pada Gambar 17).

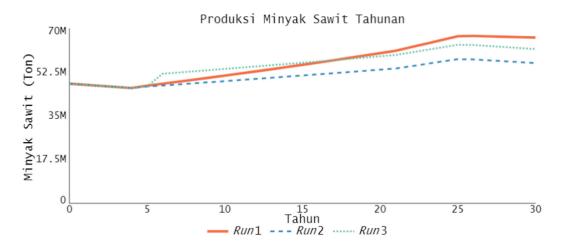
### 3.7 Dampak Kebijakan terhadap Produksi Sektor Kelapa Sawit

Hasil simulasi menunjukkan bahwa produksi CPKO tahunan mengalami beberapa fase, pada periode awal produksinya menurun, periode berikutnya pada tahun ke-5 mengalami peningkatan, hingga akhirnya produksinya mengalami penurunan mulai tahun ke-26 implementasi. Implementasi kebijakan pada skenario kebijakan NDP akan mengurangi produksi CPKO tahunan. Pada tahun ke-10, penurunan ini mencapai 2,2% (Tabel 6 dan grafik

run 2 pada Gambar 18). Tren penurunan serupa juga ditunjukkan pada skenario kebijakan NDP kombinasi (grafik run 3). Namun, penurunan dari skenario NDP kombinasi dimulai setelah tahun ke-17 implementasi.

## 3.8 Dampak Kebijakan terhadap Nilai Perdagangan Sektor Kelapa Sawit dan Pendapatan Petani

Pada berbagai skenario, nilai perdagangan akan terus meningkat hingga tahun ke-27 dan pada tahun selanjutnya mengalami penurunan (Gambar 19). Implementasi skenario kebijakan NDP dapat menghasilkan nilai perdagangan yang sama dengan skema BAU pada enam tahun awal dan pada tahun berikutnya nilai perdagangan berada di bawah skema BAU (grafik *run* 2). Skenario NDP yang dikombinasikan dengan intensifikasi, sertifikasi, dan berbagai manfaat kebijakan lainnya dapat menghasilkan nilai perdagangan di atas BAU dalam kurun waktu 30 tahun (grafik *run* 3). Skenario ini juga mampu menghasilkan pendapatan petani sebesar US\$1.840/ha/tahun atau lebih tinggi 8,6% dari skenario BAU pada tahun ke-10.



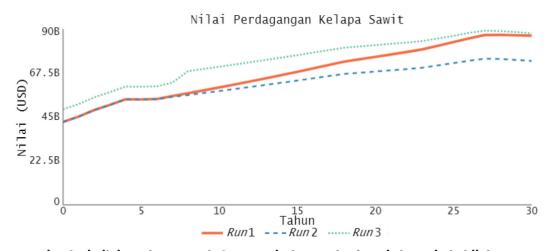
Gambar 18. Simulasi produksi CPKO tahunan dari kelapa sawit dengan berbagai skenario kebijakan

Keterangan:

Run 1 adalah skenario BAU

Run 2 adalah skenario kebijakan NDP

Run 3 adalah skenario kebijakan NDP dengan kombinasi intensifikasi, sertifikasi, harga premium, pajak karbon, dan transfer fiskal berbasis ekologis



Gambar 19. Simulasi nilai perdagangan kelapa sawit dengan berbagai skenario kebijakan

Keterangan:

Run 1 adalah skenario BAU

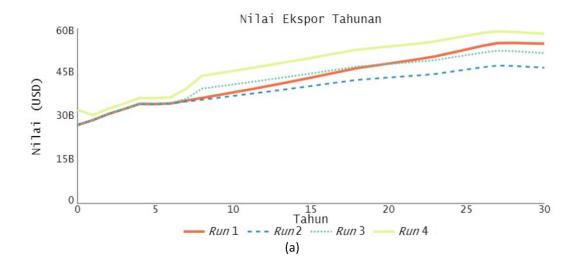
Run 2 adalah skenario kebijakan NDP

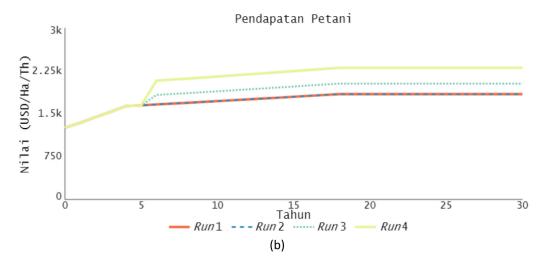
Run 3 adalah skenario kebijakan NDP dengan kombinasi intensifikasi, sertifikasi, harga premium, pajak karbon, dan transfer fiskal berbasis ekologis

## 3.9 Modifikasi Skenario Kebijakan untuk Menghasilkan Keseimbangan antara Faktor Ekonomi dan Lingkungan

Skenario kebijakan mampu menurunkan emisi dan menekan deforestasi serta meningkatkan pendapatan petani sawit di atas skenario BAU. Meskipun secara umum nilai perdagangan lebih tinggi dibandingkan dengan skenario BAU, namun implementasi skenario kebijakan terbukti menghasilkan nilai ekspor yang lebih rendah dibandingkan dengan skenario BAU.

Keseimbangan antara faktor lingkungan (penurunan deforestasi dan emisi) dan faktor ekonomi (peningkatan pendapatan petani dan nilai perdagangan domestik dan ekspor) dapat tercapai apabila terjadi penurunan deforestasi di areal penggunaan lain (APL) sebesar 80% dengan nol deforestasi di lahan gambut dan kawasan hutan, peningkatan fraksi ekspor CPO menjadi 30%, peningkatan intensifikasi di perkebunan rakyat 25%; sementara intensifikasi di perusahaan dan insentif sama dengan skenario sebelumnya (Skenario IV).





Gambar 20. Simulasi nilai perdagangan kelapa sawit dengan berbagai skenario kebijakan (a) dan simulasi pendapatan petani dengan berbagai skenario kebijakan (b)

Keterangan:

Run 1 adalah skenario BAU

Run 2 adalah skenario kebijakan NDP

Run 3 adalah skenario kebijakan NDP dengan kombinasi intensifikasi, sertifikasi, harga premium, pajak karbon, dan transfer fiskal berbasis ekologis

Run 4 adalah skenario kebijakan penurunan deforestasi 80% di APL dengan nol deforestasi di kawasan hutan dan gambut, peningkatan rasio ekspor CPO, peningkatan intensifikasi perkebunan rakyat, sertifikasi, harga premium, pajak karbon dan transfer fiskal berbasis ekologis

Apabila skenario kebijakan ini diimplementasikan, maka nilai ekspor sawit akan lebih tinggi dibandingkan dengan skenario BAU (grafik *run* 4 pada Gambar 20a). Pada tahun ke-10 atau tahun 2029, nilai ekspor sawit mencapai US\$39,3 miliar atau 3 miliar lebih tinggi dibandingkan dengan skenario BAU. Skenario IV juga mampu mendorong peningkatan pendapatan petani menjadi US\$2.100/ha/tahun atau sekitar 25% lebih tinggi dari BAU pada tahun 2029 (grafik *run* 4 pada Gambar 20b).

Penelitian ini merekomendasikan penurunan deforestasi di APL menjadi 80% karena mempertimbangkan kejadian konversi lahan untuk perkebunan sawit baru yang masih terus terjadi. APL menjadi satu-satunya kawasan yang secara legal dapat dikonversi untuk perkebunan sawit baru sesuai ketentuan yang berlaku. Berbeda dengan konversi kawasan hutan dan lahan gambut untuk perkebunan baru yang merupakan tindakan ilegal, oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan agar deforestasi di kawasan hutan dan lahan gambut tetap dipertahankan nol deforestasi.

Peningkatan intensifikasi dan sertifikasi perkebunan terutama ISPO yang dibangun dalam skenario ini sejalan dengan komponen yang ada di dalam RAN KSB. Upaya intensifikasi dapat diwujudkan melalui implementasi praktik perkebunan yang baik (good agricultural practices/ GAP) dan peremajaan kebun yang kurang produktif (Saleh dkk. 2019). Penerapan GAP pada perusahaan besar maupun perkebunan rakyat berpengaruh signifikan terhadap produksi tandan buah segar dan pendapatan perusahaan maupun petani perkebunan rakyat (Fachrudin dkk. 2020). Pemerintah daerah dapat mendorong peran aktif perusahaan besar untuk mengimplementasikan GAP di arealnya sendiri maupun memberikan pendampingan kepada petani di sekitar arealnya. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mendorong pembentukan kelompok-kelompok tani agar dapat mengakses program Peremajaan

Sawit Rakyat (PSR) dari pemerintah pusat yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Lebih jauh lagi, peningkatan sertifikasi ISPO menjadi salah satu upaya yang perlu didorong karena pada tahun 2025 semua perkebunan kelapa sawit memasuki era wajib sertifikasi (Hadi dkk. 2023). Pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan sertifikasi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat, perusahaan besar, dan mitra pembangunan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperoleh dukungan finansial dalam mengimplementasikan ISPO dan juga dukungan teknis seperti pendampingan untuk penguatan kelembagaan pekebun.

Skenario kebijakan lainnya seperti transfer fiskal berbasis ekologis dan pajak karbon memang belum menjadi alternatif utama menuju kelapa sawit berkelanjutan, tetapi sebetulnya memiliki potensi yang sangat besar. Transfer fiskal berbasis ekologis dapat diupayakan dengan adanya transfer fiskal atas penerimaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dari pusat ke daerah yang disertai dengan penerapan indikator ekologi berupa indeks tutupan hutan dan indeks kerusakan hutan (Nurfatriani dkk 2018). Dana yang diterima oleh pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber dana untuk mengimplementasikan setiap aktivitas yang ada di dalam RAN KSB. Selain itu, terdapat pajak karbon yang ditetapkan berdasarkan emisi yang dihasilkan dari setiap aktivitas dari sektor kelapa sawit. Pajak karbon dapat menjadi salah satu bentuk disinsentif agar pengusaha di sektor kelapa sawit dapat melakukan praktikpraktik yang ramah lingkungan dan minim emisi.

Terlepas dari berbagai skenario kebijakan yang diimplementasikan untuk meningkatkan nilai perdagangan kelapa sawit, ada faktor lain yang berpengaruh. Faktor-faktor tersebut antara lain nilai tukar dan harga internasional (Advent dkk. 2021), serta volume ekspor dan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) (Sari dan Sishadiyati 2022).

## 4 Rekomendasi Kunci

Melalui proses diskusi multipihak, para pihak merumuskan bahwa visi bersama kelapa sawit berkelanjutan adalah pengurangan deforestasi dan emisi gas rumah kaca, peningkatan keanekaragaman hayati, dan peningkatan ketahanan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia pada tahun 2030. Indikator pencapaian progresif yang direkomendasikan oleh tim peneliti berdasarkan model sistem dinamika SIPOS adalah penurunan deforestasi di APL sebesar 80% dengan nol deforestasi di lahan gambut dan kawasan hutan, peningkatan fraksi ekspor CPO menjadi 30%,

peningkatan intensifikasi di perkebunan rakyat sebesar 25%, intensifikasi di perusahaan sebesar 10%, serta penerapan skema-skema insentif.

Visi dan indikator di atas akan dicapai melalui kegiatan yang direkomendasikan dalam matriks rekomendasi kunci RAN KSB berikut (Tabel 7). Matriks rekomendasi ini memuat lima komponen, yakni: penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur; peningkatan kapasitas pekebun dan percepatan peremajaan; pengelolaan dan pemantauan lingkungan; tata kelola dan penanganan sengketa; serta pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses produk kelapa sawit.

No	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator keluaran	Waktu pelaksanaan	OPD pelaksana	OPD/mitra kerja pendukung	Pembiayaan
A. Kol	A. Komponen penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur	infrastruktur					
<b>A</b> 1	Mendorong adanya kebijakan/ peraturan di tingkat daerah untuk koordinasi, konsolidasi dan sinkronisasi inisiatif dan data perkebunan antar institusi/lembaga yang responsif gender.	Untuk didiskusikan	Kebijakan/peraturan untuk koordinasi, konsolidasi dan sinkronisasi inisiatif dan data perkebunan antar-institusi/ lembaga yang responsif gender.	Untuk didiskusikan	Badan Informasi Geospasial (BIG)     Lembaga     Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)     Kementerian Koordinator Bidang	<ul> <li>Pemerintah daerah</li> <li>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)</li> <li>Mitra pembangunan</li> <li>Perusahaan</li> </ul>	Untuk didiskusikan
<b>A</b> 2	Penganggaran dana untuk pengumpulan data dan pembangunan <i>platform</i> data dasar termasuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan terkait data, kepatuhan hukum, dan tata kelola.		Dukungan pendanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun non-APBN untuk ketersediaan data dasar perkebunan kelapa sawit, termasuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan terkait data, kepatuhan hukum, dan		Kemaritiman dan Investasi  Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi  Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional  Kementerian Pertanian  Kementerian Fertanian  Kementerian Fertanian  Kementerian Fertanian  Kementerian		
A3	Pengumpulan data dan pembangunan <i>platform</i> data dasar perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dan bisa diakses oleh publik.		Optimalisasi penggunaan platform nasional untuk pemantauan dan evaluasi perkembangan berbasis bukti		Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Kementerian Dalam Negeri • Badan Pusat		

Berlanjut ke halaman berikutnya

		(	_	
		•	-	7
		ſ	7	7
		:	3	1
	٠	٠	_	-
		۰	-	7
		٠	-	
•	۰	•	=	
		(	_	
		•	-	
		ſ	τ	7
		٠	3	1
	ı			٠
	ı			٠
	ı			٠
			1	
			1	
		-	1	֚֡֝֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֓֓֓֓֓֜֜֜֜֜֜֜֜֜
		-	1	֚֡֝֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֓֓֓֓֓֜֜֜֜֜֜֜֜֜
		-	1	֚֡֝֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֓֓֓֓֓֜֜֜֜֜֜֜֜֜
		-	1	֚֡֝֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֓֓֓֓֓֜֜֜֜֜֜֜֜֜

5	aper 2. Early area!						
No	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator keluaran	Waktu pelaksanaan	OPD pelaksana	OPD/mitra kerja pendukung	Pembiayaan
A4	Pembangunan <i>platform</i> data yang terintegrasi dan bisa diakses publik untuk mendukung ketertelusuran.		Data dasar perkebunan kelapa sawit termasuk smallholder laki-laki dan perempuan dalam satu platform yang dapat diakses publik.				
A5	Mendorong koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah untuk merancang dan mengelola program-program yang sesuai dengan kondisi lokal.		Fleksibilitas penggunaan insentif kepada pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan atas kepatuhan pemenuhan Komponen RAN KSB (Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan).				
A5	Optimalisasi forum multipihak di tingkat nasional untuk koordinasi antarlembaga/institusi.		Forum multipihak di tingkat nasional berfungsi optimal untuk koordinasi antar lembaga/institusi dari tingkat nasional sampai daerah.				

Berlanjut ke halaman berikutnya

Tabel 7. Lanjutan

Berlanjut ke halaman berikutnya

No	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator keluaran	Waktu pelaksanaan	OPD pelaksana	OPD/mitra kerja pendukung	Pembiayaan
B. Ko	B. Komponen peningkatan kapasitas pekebun dan percepatan peremajaan	dan percepatan	peremajaan				
B1.1	Mendorong rekruitmen PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) khusus untuk pendampingan kelapa sawit.	Untuk didiskusikan	Dukungan peningkatan kuantitas dan kapasitas PPL khusus	Untuk didiskusikan	Badan Pengelola     Dana Perkebunan     Kelapa Sawit	Untuk didiskusikan	Untuk didiskusikan
B1.2	Penyeragaman modul pendampingan dan peningkatan kapasitas PPL dalam training-of-trainers.		sektor kelapa sawit.		(BPDPRS) • Kementerian Pertanian • Direktorat		
B2	Pelatihan untuk pengembangan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung inisiatif dan komitmen kelapa sawit berkelanjutan di tingkat tapak.		Pengembangan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).		Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian • Kementerian Perdagangan		
B3	Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan untuk penyeragaman prosedur mengeluarkan STDB.		Kebijakan untuk penyeragaman proses STDB dan implementasinya.		<ul> <li>Kementerian         <ul> <li>Lingkungan Hidup</li> <li>dan Kehutanan</li> <li>Kementerian</li> </ul> </li> <li>Dalam Negeri</li> </ul>		
B4	Pemeliharaan <i>platform</i> e-STDB.		Optimalisasi <i>platform</i> e-STDB.		)		
B2	Percepatan implementasi kebijakan, dukungan pendanaan dan penyederhanaan prosedur untuk program PSR dan perbaikan/ peningkatan sarana dan prasarana.		Adanya dukungan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan dukungan sarana dan prasarana.				
B6	Membentuk kelembagaan kelompok tani yang inklusif gender untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas dan adopsi praktik-praktik keberlanjutan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.		Pembentukan kelembagaan kelompok tani yang inklusif gender.				

intan	3
±	-
=	2
•=	
_	
	3
_	
	•
17	٦
-	
d	J
٦.	2
ď	1

label	label 7. Lanjutan						
No No	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator keluaran	Waktu pelaksanaan	OPD pelaksana	OPD/mitra kerja pendukung	Pembiayaan
87	Sosialisasi dan edukasi para pihak terkait kebijakan kelapa sawit berkelanjutan yang responsif gender.		Peningkatan pemahaman para pihak tentang kebijakan kelapa sawit berkelanjutan yang responsif gender.				
C. Ko	C. Komponen pengelolaan dan pemantauan lingkungan	ngkungan					
ב	Integrasi dan implementasi kebijakan untuk pengelolaan area HCV dan HCS.	Untuk didiskusikan	Kebijakan untuk pengelolaan area HCV dan HCS terintegrasi dan terimplementasikan.	Untuk didiskusikan	<ul> <li>Kantor Staf Presiden</li> <li>Kementerian</li> <li>Koordinator</li> <li>Bidang</li> <li>Kemaritiman dan</li> </ul>	<ul> <li>Perusahaan</li> <li>Pekebun swadaya</li> <li>Masyarakat adat dan lokal</li> <li>Badan sertifikasi</li> <li>(independent</li> </ul>	Untuk didiskusikan
S	Edukasi dan sosialisasi kepada para pihak untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pencegahan karhutla serta pemahaman akan kawasan dan fungsi hutan.		Implementasi SOP di kementerian terkait untuk meningkatkan pemahaman para pihak tentang prinsip-prinsip keberlanjutan dan pencegahan karhutla dan pemahaman akan kawasan dan fungsi hutan.		Investasi • Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian	third party)  • Para pihak di tingkat tapak	
ខ	Edukasi dan sosialisasi kepada para pihak terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) nasional agar sinergis dengan dokumen tingkat daerah.		Implementasi RPPLH dan RPPEG nasional dan sinergi dengan dokumen tingkat daerah.				

Berlanjut ke halaman berikutnya

Berlanjut ke halaman berikutnya

Tabe	Tabel 7. Lanjutan						
No	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator keluaran	Waktu pelaksanaan	OPD pelaksana	OPD/mitra kerja pendukung	Pembiayaan
2	Edukasi dan sosialisasi kepada para pihak terkait koridor habitat dan area konservasi.		Implementasi SOP untuk meningkatkan pemahaman para pihak terkait koridor habitat dan area konservasi.				
ව	Implementasi/pengembangan model agroforestri pada perkebunan sawit yang sudah ada (existing) dan yang baru.		Model agroforestri pada perkebunan sawit yang sudah ada (existing) dan yang baru.				
D. Kc	D. Komponen tata kelola dan penanganan sengketa	gketa					
Д	Pengembangan juknis dan juklak regulasi terkait tata kelola lahan dan sengketa.	Untuk didiskusikan	Juknis dan juklak regulasi terkait tata kelola lahan dan penyelesaian sengketa (misal: akses lahan yg inklusif gender).	Untuk didiskusikan	Kementerian     Pertanian     Kementerian     Lingkungan Hidup     dan Kehutanan     Kementerian     Agraria dan	<ul> <li>Gubernur</li> <li>Sekretaris Daerah</li> <li>Dinas Perkebunan</li> <li>Dinas Lingkungan</li> <li>Hidup dan</li> <li>Kehutanan</li> </ul>	Untuk didiskusikan
D2	Mendorong perubahan kebijakan dalam transfer anggaran DBH (dana bagi hasil) untuk mendukung inisiatif kelapa sawit berkelanjutan yang sudah ada (existing) dan yang baru diinisiasi.		Peningkatan transfer anggaran DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maupun sumber lainnya (non-APBN), untuk mendukung inisiatif kelapa sawit berkelanjutan.		Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional • Kementerian Keuangan • Rementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Penanaman     Modal dan     Pelayanan Terpadu     Satu Pintu     Badan Perencanaan     Pembangunan     Daerah     Badan     Badan	
D3	Optimalisasi <i>platform</i> untuk memantau perkembangan inisiatif kelapa sawit berkelanjutan.		Platform nasional perkembangan inisiatif sawit berkelanjutan berfungsi optimal.		<ul> <li>Kementerian</li> <li>Ketenagakerjaan</li> <li>Kementerian</li> <li>Perdagangan</li> </ul>	<ul> <li>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>Kejaksaan Tinggi Daerah</li> </ul>	

iutan
Lan
[7.
ape
Тa

5	יי במיולימיי						
No	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator keluaran	Waktu pelaksanaan	OPD pelaksana	OPD/mitra kerja pendukung	Pembiayaan
40	Pengembangan skema pendanaan dari lembaga keuangan (misal: perbankan) dalam pelaksanaan inisiatif kelapa sawit berkelanjutan.		Skema pendanaan dari lembaga keuangan (misal: perbankan) dalam pelaksanaan prinsip keberlanjutan pada usaha kelapa sawit.		Kementerian     Perindustrian     Kementerian     Koordinator     Bidang Ekonomi     Dewan Perwakilan     Rakyat     Badan Informasi     dan Geospasial     Badan Restorasi     Gambut dan     Mangrove     Badan Nasional     Penanggulangan     Bencana     Komisi     Pemberantasan     Kowisi     Pemberantasan     Kowisi		
E. Ko	E. Komponen pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses produk kelapa sawit	n akses produk k	celapa sawit				
<b>T</b>	Percepatan dan dukungan pendanaan sertifikasi ISPO bagi pekebun.	Untuk didiskusikan	Peningkatan jumlah petani dan pekebun (laki-laki dan perempuan) yang tersertifikasi mandatory ISPO maupun voluntary meningkat.	Untuk didiskusikan	<ul> <li>Pemerintah</li> <li>Kementerian</li> <li>Kewenterian</li> <li>Pertanian</li> </ul>	<ul> <li>Asosiasi pekebun</li> <li>LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)</li> <li>Perusahaan</li> </ul>	Untuk didiskusikan

Berlanjut ke halaman berikutnya

Tabel 7. Lanjutan

Р	
~	
$\Box$	
m	
_	
$\sim$	
$\sim$	
щ	
10	
ıalaı	
ര	
_	
$\overline{}$	
Φ	
â	
$\sim$	
$\perp$	
-	
$\overline{}$	
. —	
$\overline{}$	
_	
E	
ď	
Ę	
rlai	
erlar	
serlar	
Berlar	
ゼ	
Berlar	

No	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator keluaran	Waktu pelaksanaan	OPD pelaksana	OPD/mitra kerja pendukung	Pembiayaan
E2	Mendorong pelibatan para pihak dalam Dewan Pengarah Sertifikasi ISPO.		Peningkatan keterlibatan multipihak dalam Dewan Pengarah Sertifikasi ISPO.				
E3.1 E3.2	Pengembangan untuk peningkatan suplai sawit tersertifikasi ISPO. Pengembangan skema insentif harga premium terhadap produk bersertifikasi ISPO.		Kebijakan untuk peningkatan suplai sawit tersertifikasi ISPO maupun sertifikasi voluntary di perusahaan (BUMD, dan non-BUMN/D) serta industri.				
E4.1	Pengembangan nilai tambah produk turunan sawit sehingga hasil produksi tidak dijual dalam bentuk bahan mentah.		Nilai tambah produk turunan sawit meningkat sehingga produksi tidak dijual				
E4.2	Mendorong peningkatan eco- label produk kelapa sawit yang tersertifikasi ISPO maupun sertifikasi voluntary lainnya.		dalam bentuk bahan mentah.				
83	Mendorong sosialisasi atau kampanye peningkatan kesadaran konsumen di masyarakat dan media sosial.		Peningkatan kesadaran konsumen melalui sosialisasi atau kampanye di masyarakat dan media				
			sosial.				

## 5 Daftar Pustaka

- Advent R, Zulgani, Nurhayani. 2021. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia Tahun 2000-2019. *e-Jurnal Perdagangan Industri dan Moneter* 9(1): 49-58.
- Arjuna RT dan Santosa E. 2018. Carbon footprint assessment of palm oil production in Sei Lukut Estate, Siak District, Riau. Bul. *Agrogorti* 6(2): 287-295.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2022. Kajian penghitungan indeks ketimpangan gender 2022. Jakarta, Indonesia: BPS. Diakses 5 Januari 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2022/12/19/5268e769d853ff2f 930c0834/kajian-penghitungan-indeksketimpangan-gender-2022.html
- ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia). 2007. Investigation on sustainable biomass utilization vision in East Asia: Lifecycle assessment for biomass derived fuel in Malaysia. ERIA Joint Research Project Series No. 39.
- Fachrudin B, Nearti Y, Awaliah R. 2020. Analisis penerapan GAP (good agricultural practice) dalam pengelolaan kebun kelapa sawit pada PT. Duta Reka Mandiri, Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. *Jurnal AGRIPITA* 4(2): 43–50.
- GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia). 2023. Siaran pers Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI): Kinerja industri minyak sawit 2022. Diakses 8 Januari 2024. https://gapki.id/news/2023/01/25/kinerja-industri-minyak-sawit-2022/
- Hadi S, Bakce D, Muwardi D, Yusri J, Septya F. 2023. ISPO certification acceleration strategies for independent oil palm plantations. *Analisis Kebijakan Pertanian* 21(1): 21-42. https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/3068

- Hillenbrand E, Karim N, Moharaj P, Wu D. 2015. Measuring gender transformative change: A review of literature and promising practices. Working paper. Atlanta, AS: CARE USA. https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/working\_paper\_aas\_gt\_change\_measurement\_fa\_lowres.pdf
- Info Sawit. 2022. 86% dari Siklus produksi kelapa sawit melibatkan perempuan. Diakses 5 Januari 2024. https://www.infosawit. com/2022/06/24/86-dari-siklus-produksikelapa-sawit-melibatkan-perempuan/
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2021. Siaran Pers No. HM.4.6/82/SET.M.EKON.3/04/2021. Industri kelapa sawit Indonesia: Menjaga keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jakarta, Indonesia: Kemenko Perekonomian. Diakses 8 Januari 2024. https://ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2023. Development and implementation of the National Action Plan for Sustainable Palm Oil (NAP SPO). Dipresentasikan pada Workshop Nasional dan Dialog Global Landscape Forum "Pembelajaran dari Pendekatan Yurisdiksi untuk Pengembangan Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan". Bogor, Indonesia: Kemenko Perekonomian.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2022. Perjanjian Kerjasama Nomor TAN.03.01/ 161/D. II.M.EKON/02/2022, 002/D.KG/ KL.01/3/2022. Pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2019-2024. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/566/download

- Kementerian Pertanian. 2020. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020. Penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Jakarta, Indonesia: Kementan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/201269/permentan-no-38-tahun-2020
- Kementerian Pertanian. 2022. Statistik perkebunan unggulan nasional 2021-2023. Jakarta, Indonesia: Kementan. https://ditjenbun.pertanian.go.id/?publikasi=buku-statistik-perkebunan-2021-2023
- Kementerian Pertanian. 2023. Ditjenbun terus menguatkan ISPO. Jakarta, Indonesia: Kementan. https://ditjenbun.pertanian.go.id/ ditjenbun-terus-menguatkan-ispo/
- MapBiomas Indonesia. 2022. Indonesia annual land cover 2000–2022. http://platform-map.nusantara.earth/
- Mawardati, Dewi R, Khalsiah, Afrillia Y, Jullimursyida, Siska D, Ramadhan G, Munandar A. 2022. The role of women in increasing oil palm production in Aceh province. Proceedings of Malikussaleh International Conference on Multidisciplinary Studies. https://doi.org/10.29103/micoms. v3i.44
- Media Perkebunan. 2022. RAN KSB dan ISPO dukung kesetaraan gender di perkebunan kelapa sawit. Diakses 5 Januari 2024. https://mediaperkebunan.id/ran-ksb-dan-ispo-dukung-kesetaraan-gender-di-perkebunan-kelapa-sawit/
- NFREL (National Forest Reference Emission Level). 2022. National forest reference level for deforestation, forest degradation, and enhancement of forest carbon stock. Jakarta, Indonesia.
- Nurfatriani F, Ramawati, Sari GK, Komarudin H. 2018. Optimalisasi dana sawit dan pengaturan instrumen fiskal penggunaan lahan hutan untuk perkebunan dalam upaya mengurangi deforestasi. Working Paper 238. Bogor, Indonesia: CIFOR. https://doi.org/10.17528/cifor/006882
- Purnomo H, Okarda B, Dermawan A, Ilham QP, Pacheco P, Nurfatriani F, Suhendang E. 2020. Reconciling oil palm economic development and environmental conservation in Indonesia: A value chain dynamic approach. *Forest Policy and Economics* 111 (2020): 102089. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102089

- Saleh S, Bagja B, Suhada T, Widyapratami H, Putra S, Said Z, Putraditama A. 2019. Intensifikasi perkebunan kelapa sawit rakyat: Dari mana kita memulai? Working Paper. Jakarta, Indonesia: WRI Indonesia. https://wri-indonesia.org/id/publikasi/intensifikasi-perkebunan-kelapa-sawit-rakyat-dari-mana-kita-memulai
- Sari LC dan Sishadiyati. 2022. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia ke Uni Eropa. *Sebatik* 26(1): 26–31. https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i1.1867
- Sekretariat RAN KSB. 2023. Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Jakarta, Indonesia: Sekretariat RAN KSB. https://www.sekretariat-ranksb.id/rencanaaksi-nasional
- Surjantoro D. 2024. Siaran pers: Kinerja positif APBN 2023 tetap menjaga momentum pemulihan serta memperbaiki pemerataan dan kesejahteraan. Jakarta, Indonesia: Kemekeu RI. Diakses 5 Januari 2024. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Kinerja-Positif-APBN-2023-Tetap-Menjaga-Momentum
- The Asia Foundation. 2012. Gender in Indonesia. Jakarta, Indonesia: The Asia Foundation. Diakses 5 Januari 2024. https://asiafoundation.org/resources/pdfs/IDgender.pdf
- Tillah M. 2021. Akselerasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan melalui kebijakan responsif gender. Policy Brief. Jakarta, Indonesia: UNDP SPOI. https://goodgrowthpartnership.org/wp-content/uploads/Gender-Responsive-SPO-Policy-Brief-INDONESIAN-1.pdf
- UNComtrade. 2020. UNComtrade Database. https://comtradeplus.un.org/
- UNDP (United Nations Development Programme). 2017. Change makers:
  Programming for gender equality and helping men and women in indonesia shape a fairer world. UNDP Indonesia Gender Equality Strategy and Action Plan 2017-2020. Jakarta, Indonesia: UNDP. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/id/0e888b952c742ac7029376aae0ffeda36e8 c02553a804522a77855f8135e56b6.pdf
- UNDP (United Nations Development Programme). n.d. Gender equality: national

ownership. Jakarta, Indonesia: UNDP. Diakses 5 Januari 2024. https://www.undp.org/indonesia/gender

UNDP (United Nations Development Programme). 2021. Masukan kebijakan baru tentang gender di sektor minyak sawit berkelanjutan serukan peran perempuan yang lebih kuat. Jakarta, Indonesia: UNDP. Diakses 5 Januari 2024. https://www.undp.org/id/indonesia/press-releases/masukan-kebijakan-baru-tentang-gender-di-sektor-minyak-sawit-berkelanjutan-serukan-peran-perempuan-yang-lebih-kuat

United States Department of Agriculture. 2023. Palm Oil Explorer. Diakses 8 Januari 2024. https://ipad.fas.usda.gov/ cropexplorer/cropview/commodityView. aspx?cropid=4243000

Yahya VJ, Sabiham S, Pramudya B, Las I. 2019. Identification of factors that influence carbon emissions in tropical peatland (case on the palm oil plantations in Siak district). *Biospecies* 12(2): 20-27.

# Lampiran

## 1. Daftar Peserta Lokakarya Nasional

Tabel L1.1. Daftar peserta lokakarya nasional 1, 2, dan 3

				Partisi	pasi dalam Lok	akarya
No	Nama	Instansi	Jabatan	Lokakarya 1	Lokakarya 2	Lokakarya 3
1	Hartono	Analis News			1	
2	Sugiantoro	Apical Group				1
3	Vincent Lovrenta	Apical Group				1
4	Dr. Diharyo	APKASINDO Kab. Pulang Pisau	Ketua			1
5	Ainun	Ata Marie		1		
6	Dyah Ayu	Ata Marie		1		
7	Akhmad Kamaluddin	Auriga Nusantara		1	1	
8	Sesilia Maharani	Auriga Nusantara	Researcher	1		
9	Anang Nugroho	Bappenas		1		
10	Nurul Aulia Rahmi	Bappenas				1
11	Hamiddah I. Kusumastuti	Bappenas, Direktorat Pangan dan Pertanian				1
12	M. Iqbal Oktaviandri	Bappenas, Direktorat Pangan dan Pertanian				1
13	Diny Hartiningtias	Belantara Foundation	Program & Fundraising Manager	1	1	1
14	Dolly Priatna	Belantara Foundation	Executive Director	1		
15	Fitri Nurfatriani	BRIN, Direktorat Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam dan Ketenaganukliran	Peneliti Ahli Madya	1		
16	Bariot Hafif	BRIN		1		

Tabel L1.1. Lanjutan

Ne	Nama	Instance!	lahatan	Partisi	pasi dalam Lok	akarya
No	Nama	Instansi	Jabatan	Lokakarya 1	Lokakarya 2	Lokakarya 3
17	Dibyo Pranowo	BRIN		1		
18	Dr. Ir. Delima Hasri Azahari, M.S.	BRIN, GPPI, YSNI				1
19	Resti Ura'	BRIN, Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi	Peneliti	1		
20	Tri Sulistyati W.	BRIN, Pusat Riset Kependudukan		1	1	
21	Dwi Yana Hendrata	Bunge Agribusiness Indonesia				1
22	Devyandra Putri	CDP		1		
23	Norma Pedroza	CDP			1	
24	Anton Rizki	Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)	Chief Executive Officer (CEO)			1
25	Ani A. Nawir	CIFOR-ICRAF				1
26	Brigitta Isworo	CIFOR-ICRAF		1		
27	Swetha Peteru	CIFOR-ICRAF	Scientist	1	1	
28	Beria Leimona	CIFOR-ICRAF	Senior Expert Landscape Governance and Investment	1	1	
29	Herry Purnomo	CIFOR-ICRAF	Indonesia Country Director and Senior Scientist	1	1	1
30	Sonya Dewi	CIFOR-ICRAF	Director of Asia			1
31	Sonya Dyah Kusumadewi	CIFOR-ICRAF	Research Officer	1	1	1
32	Dyah Puspitaloka	CIFOR-ICRAF	Lead Research Group III	1	1	1
33	Monica Azzahra	CIFOR-ICRAF	Monitoring Evaluation Learning Impact Assessment Specialist	1	1	1
34	Beni Okarda	CIFOR-ICRAF	Senior Research Officer	1	1	1
35	Dina Hubudin	CIFOR-ICRAF	Team Support Assistant	1	1	1
36	Salwa Nadhira	CIFOR-ICRAF	Research Assistant	1	1	1
37	Budhy Kristanty	CIFOR-ICRAF	Communications, Outreach and Engagement (COE)	1	1	1

Tabel L1.1. Lanjutan

	N		1.1	Partisi	pasi dalam Lok	akarya
No	Nama	Instansi	Jabatan	Lokakarya 1	Lokakarya 2	Lokakarya 3
38	Dinny Dwi Saputri	CIFOR-ICRAF	Communications, Outreach and Engagement (COE)	1		1
39	Perdana Maulansyah Putra	CIFOR-ICRAF	Communications, Outreach and Engagement (COE)	1		1
40	Aris Sanjaya	CIFOR-ICRAF	Communications, Outreach and Engagement (COE)	1		1
41	Hilman Rusdian	CIFOR-ICRAF	Communications, Outreach and Engagement (COE)	1		1
42	Fatwa N. Susanti	CIFOR-ICRAF	Research Consultant			1
43	Penza Lindiani	CIFOR-ICRAF	Research Consultant			1
44	Santy Darmokusumo	CIFOR-ICRAF	Communications, Outreach and Engagement (COE)	1		
45	Thifali Adzani	CIFOR-ICRAF	Communications, Outreach and Engagement (COE)	1		
46	Levania Santoso	CIFOR-ICRAF	Communications, Outreach and Engagement (COE)	1		
47	Angga Pratama	CIFOR-ICRAF	Communications, Outreach and Engagement (COE)		1	1
48	Dinny Dwi Hadi Saputri	CIFOR-ICRAF	Communications, Outreach and Engagement (COE)		1	1
49	Fajrin Hanafi	CIFOR-ICRAF	Communications, Outreach and Engagement (COE)		1	1
50	Nining Liswanti	CIFOR-ICRAF	Scientist		1	1
51	Prasetya Irawan	CIFOR-ICRAF	Research Consultant		1	1
52	Santi Darmokusumo	CIFOR-ICRAF	Communications, Outreach and Engagement (COE)		1	
53	Vito Gama Kaparang	CIFOR-ICRAF	Communications, Outreach and Engagement (COE)		1	1

Tabel L1.1. Lanjutan

				Partisi	pasi dalam Lok	akarya
No	Nama	Instansi	Jabatan	Lokakarya 1	Lokakarya 2	Lokakarya 3
54	Nabiha Shahab	CIFOR-ICRAF	Communications, Outreach and Engagement (COE)		1	1
55	Lila Juniyanti	CIFOR-ICRAF, BRIN	Research Consultant	1	1	1
56	Dewi Suralaga	CLUA		1		
57	Dhita R.	CLUA		1		
58	Dimazs Hamihenda	Cofco International				1
59	Malahayati Daulay	CPOPC				1
60	M. Rafi' Faishal	CPOPC		1		
61	Febby Thaliana F.	Daemeter		1		
62	Farhan Thufail M.	Daemeter		1		
63	Gaia Khairina	Daemeter	Project Manager	1		
64	Nadia Awaliyah	Daemeter		1		
65	Nilam Khoirun Nisa	Daemeter		1		
66	Arvin Aryasatya	Daemeter			1	
67	Bukhari	Daemeter	Senior Manager of Geomatics and Natural Resource Management		1	
68	Hamdah Busyrah	Dala Institute		1		
69	Farida Indriastuti	DW Asia				1
70	Aris Bahariyono	Earthworm Foundation		1		
71	Dean Affandi	Earthworm Foundation		1		
72	Rikto Yotodiharjo	Earthworm Foundation	Forest & Carbon Manager	1		
73	Tri Agus Sugiyanto	Earthworm Foundation			1	1
74	Rully Amrullah	European Forest Institute (EFI)	Stakeholder Engagement Expert	1		
75	Ade M. Iswadi	FKMS Kab. Sintang	Sekretaris Jenderal	1	1	1
76	Febbi Lia Fitri	FKMS Kab. Sintang		1		
77	Asep Hermawan	FKMS Kab. Sintang			1	
78	Nurul Huda	FKMS Kab. Sintang				1
79	Riski Septia Putri	FORCI IPB			1	1
80	Hana Nur T.	FORCI IPB			1	1
81	Ginastri Puspadianti	FORCI IPB			1	1

Tabel L1.1. Lanjutan

				Partisi	pasi dalam Lok	akarya
No	Nama	Instansi	Jabatan	Lokakarya 1	Lokakarya 2	Lokakarya 3
82	Shinta Dwi Ariastanti	FORCI IPB			1	
83	M. Irsyad	FORCI IPB				1
84	Citra S. Putri	Forest Digest			1	1
85	Kania Gita Lestari	Forest Digest				1
86	Robi Destia Waldi	Forest Digest			1	
87	Nevi Dewi	FORTASBI			1	
88	Sendy T. N. de Soysa	FORTASBI			1	
89	Nurmadiah Situmorang	FWI	Staf Divisi Kampanye dan media	1		
90	Edi Suhardi	GAPKI	Komp. Hubungan Stakeholders	1		
91	Burhan Zein	GAPKI		1		
92	R. Azis Hidayat	GAPKI				1
93	Dr. Silfi Iriyani	GIZ	Environmental Policy, Resources Efficiency Advisor			1
94	Iwied W.	GIZ				1
95	Harry Prasetyo	Hallo.id				1
96	Totong Ariwanto	HKTI/Neistura			1	
97	Indah Budiani	IBCSD	Executive Director	1		
98	Arya Hadi Dharmawan	IPB University		1		
99	Dwita Putri R.	IPB University				1
100	Muh. Dicky Kurniawan	IPB University			1	
101	Ratu Yanra Dewi	IPB University				1
102	Choirotun Hisan Rabbani Anhar	IPB University			1	
103	Lutfi Aditya A.	IPB University			1	
104	Farrel Ardan	IPB University			1	
105	Riza Rahmat Azis	IPB University			1	
106	Ridha Nurhasanah	IPB University			1	
107	Satria Adam	IPB University				1
108	Sayid Hasan	IPB University				1
109	Serly Wijayanti	IPB University				1
110	Novriyanti	IPB University, CTSS			1	
111	Akbar Fitri	ISCC				1
112	Okto Yugo Setiyo	Jikalahari		1	1	1

Tabel L1.1. Lanjutan

No	Nama	Instans	lahatan	Partisi	pasi dalam Lok	akarya
No	Nama	Instansi	Jabatan	Lokakarya 1	Lokakarya 2	Lokakarya 3
113	Teddy Herdiyansyah	Jikalahari		1	1	1
114	Persona Gemilang	J-PAL Southeast Asia			1	
115	Haris Zamaludin	J-PAL Southeast Asia	Senior Policy Associate	1		
116	Riswandi	J-PAL Southeast Asia	Postdoctoral Research Fellow	1		
117	Muhyi	JurnalNusantara.com			1	1
118	Harry	Kabarinews			1	
119	Abetnego Tarigan	Kantor Staf Presiden (KSP)				1
120	Hery Suhartono	Kantor Staf Presiden (KSP)			1	
121	Mulki Shader	Kantor Staf Presiden (KSP)				1
122	Nauval Putra	Kantor Staf Presiden (KSP)			1	
123	Anang Fajar Sidik	Kaoem Telapak		1	1	
124	Hairul Pagab	Kelompok Tani Segati Bertuah	Ketua	1		
125	Merandal Gita Eveline	Kementerian ATR/ BPN				1
126	Angga Al Furqen Yulianto	Kementerian ATR/ BPN				1
127	Edy Yusuf	Kemenko Bidang Perekonomian RI	Direktur Pengembangan Agribisnis Perkebunan	1		
128	Diah Suradiredja	Kemenko Bidang Perekonomian RI	Tim Ahli Bidang Keberlanjutan dan Sumberdaya Alam		1	
129	Arin Kusuma P.	Kemenko Bidang Perekonomian RI				1
130	Redy Prasetyo, S.ST, M.AP.	Kemenko Bidang Perekonomian RI				1
131	Seprina Aritonang	Kemenko Bidang Perekonomian RI				1
132	Syauqi Ahmada	Kemenko Bidang Perekonomian RI				1
133	Adinda Laily M.	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Pengembangan Daerah			1	1

Tabel L1.1. Lanjutan

N	Normal		t.b.c.	Partisi	pasi dalam Lok	akarya
No	Nama	Instansi	Jabatan	Lokakarya 1	Lokakarya 2	Lokakarya 3
134	Aditya Fadillah N. A.	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Pengembangan Daerah				1
135	Hafizhah F.	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Pengembangan Daerah			1	
136	Dewa Ekayana	Kementerian Keuangan RI, Badan Kebijakan Fiskal		1		
137	Triana Meinarsih	Kementerian Keuangan RI, BPDPKS		1	1	1
138	Hosea Reno Valentino	Kementerian Keuangan RI, BPDPKS		1	1	1
139	Josef Turnip	Kementerian Keuangan RI, BPDPKS		1		
140	Wahid Setiadi	Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi			1	1
141	Dimas Yunus Tirtana	Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi				1
142	Pradhana Rameshwari	Kementerian Perdagangan RI		1		
143	Betty Puspita	Kementerian Perdagangan RI	Junior Planner	1		
144	Lulu Sumartini	Kementerian Perdagangan RI	Ahli Madya Analis Investigasi Pengamanan Perdagangan	1		
145	Eka Purnama	Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan (Dektanhut)			1	
146	Ikka F. M. Kennedy	Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan (Dektanhut)				1

Tabel L1.1. Lanjutan

				Partisi	pasi dalam Lok	kakarya
No	Nama	Instansi	Jabatan	Lokakarya 1	Lokakarya 2	Lokakarya 3
147	Fata Hudaya	Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan (Dektanhut)				1
148	Angelia R. R. Pardede	Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		1		
149	Ririn Elfrida Manurung	Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan				1
150	Sylvia K.	Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan				1
151	Andi Kiky	Kemitraan		1		
152	Anindita S.	Kemitraan		1		
153	Yesaya Hardyanto	Kemitraan		1		
154	Hasan	Kompasindo				1
155	Isner Manalu	Konservasi Indonesia	Program Manager	1		
156	Trisa Rembonita	Konservasi Indonesia				1
157	Alma Tiara	KPSHK				1
158	Heru Samosir	Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)				1
159	Vitri Sekarsari	Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)		1		
160	Ristika Putri Istanti	Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)	Kepala Sekretariat		1	
161	Anastasya F.	Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)			1	
162	Ranie Putri	Media KBRN RRI				1
163	Yusdiansyah	Media KBRN RRI			1	
164	Fitri Bariu	Metroheadline.com			1	
165	Hans Nicholas Jong	Mongabay Indonesia				1
166	Dina Hidayana	MPR RI				1
167	Ahmad Dermawan	Norwegian University of Life Sciences (NMBU)		1		1

Tabel L1.1. Lanjutan

	N	lucksus?	lahat.	Partisi	pasi dalam Lok	akarya
No	Nama	Instansi	Jabatan	Lokakarya 1	Lokakarya 2	Lokakarya 3
168	Jonatan Salinding	Olam Global Agri				1
169	Dea S. Triaji	Oxfam Indonesia		1	1	1
170	Muh. Fardan	Oxfam Indonesia	FAIR Project		1	
171	Zakiy Rabbaanii	PATERA Foundation		1		
172	Rachmatul Rajab A.	PATERA Foundation		1		
173	Aji Rizki P.	PATERA Foundation			1	1
174	M. Irsyad Maguantara	PATERA Foundation				1
175	M. Rizky A. K.	PATERA Foundation			1	
176	Adam Maulana	PATERA Foundation			1	
177	Rommy Hefryan	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara, Disbun		1		
178	Edy Sumarno	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara, Disbun		1		
179	M. Taufik Rahmani, S.P., M.P.	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara, Disbun				1
180	John Laurens Barus, S.E.	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara, Disbun				1
181	Taupiq	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara, DLHK		1		
182	Yudiarta	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara, DLHK				1
183	Zulkifli, S.Ag., M.Si.	Pemerintah Kab. Pelalawan, Sekretariat Daerah				1
184	Imelda Afrilia	Pemerintah Kab. Pelalawan, Bappeda				1
185	Akhtar, S.E.	Pemerintah Kab. Pelalawan, Disbunnak				1
186	Muhammad Setiawan	Pemerintah Kab. Pelalawan, Disbunnak		1		1
187	Bambang Yuda Prabowo	Pemerintah Kab. Pelalawan, Disbunnak		1		
188	Zulkarnain	Pemerintah Kab. Pelalawan, Disbunnak		1		

Tabel L1.1. Lanjutan

No	Nama	Instansi	labatan	Partisi	pasi dalam Lok	akarya
No	Nama	Instansi	Jabatan	Lokakarya 1	Lokakarya 2	Lokakarya 3
189	Zulkarnain, S.Hut., M.Si.	Pemerintah Kab. Pelalawan, Sekretariat TPD RAD KSB				1
190	Awaluddin Majid	Pemerintah Kab. Pelalawan, DLH		1		
191	Edy Purwanto Casmani, S.Sos., M.Si.	Pemerintah Kab. Pulang Pisau, Sekretariat Daerah				1
192	Yenni Florentina	Pemerintah Kab. Pulang Pisau, Bapperida				1
193	Tata Ali Sumitra	Pemerintah Kab. Pulang Pisau, Distan				1
194	Nisfu Kusumarestu	Pemerintah Kab. Pulang Pisau, DLH				1
195	Ivo Krisnaini	Pemerintah Kab. Pulang Pisau, DLH		1		
196	Ekawati BR Pandia	Pemerintah Kab. Pulang Pisau, DLH		1		
197	Kartiyus, S.H., M.Si.	Pemerintah Kab. Sintang, Sekretariat Daerah				1
198	Billy F. S.	Pemerintah Kab. Sintang, Sekretariat Daerah				1
199	Fatmawati	Pemerintah Kab. Sintang		1		
200	Mogo Ginta, S.Sos.	Pemerintah Kab. Sintang, Disnakertrans	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	1		
201	Mulyadi	Pemerintah Kab. Sintang, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan		1		
202	Nashirul Haq	Pemerintah Kab. Sintang, DisperindagkopUKM		1		
203	Arif Wahyudi	Pemerintah Kab. Sintang, DisperindagkopUKM	Analis Koperasi	1		

Tabel L1.1. Lanjutan

N	Nama	In the second	la hate	Partisi	pasi dalam Lok	akarya
No	Nama	Instansi	Jabatan	Lokakarya 1	Lokakarya 2	Lokakarya 3
204	Arif Setya Budi	Pemerintah Kab. Sintang, Sekretariat TPD RAD KSB		1		1
205	Martin Nandung, S.Sos., M.Si.	Pemerintah Kab. Sintang, Distanbun				1
206	Ricardo	Pemerintah Kab. Sintang, DLH		1		
207	Hendarto	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Disbunnak	Bidang P4U Perkebunan	1		
208	Fauzi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli muda	1		
209	Evi Indraswati	Pili Green Network		1		
210	Siti Suprehatin	Pili Green Network		1		
211	Mila Nuh	Proforest	Regional Landscape Coordinator	1		
212	Abi Ismarrahman	Proforest	Operations Director	1		
213	Wening Ila Idzatilangi	Proforest				1
214	Bias Berlio Pradyatma R	PT Aihika Sawala Ekotropika (Ecotrop)	HCV & HCSA Assessor	1		
215	Rifqi Hanif	PT Asian Agri				1
216	Dani Aldinas	PT Astra Agro Lestari		1	1	1
217	Amrizal Yusri	PT Astra Agro Lestari			1	
218	M. Fithra Adil Lubis	PT Astra Agro Lestari				1
219	Airlangga Djati	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk				1
220	Khairul Anwar Nasution	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk			1	
221	Andi Muhammad Amin	PT Bumitama Gunajaya Agro	Responsibility Land Use & Conservation Manager	1		
222	Fendri Ahmad	PT Dharma Gunawibawa		1	1	1
223	Hadi Syahputra	PT Dharma Gunawibawa			1	1
224	Samsul Rijal	PT Eagle High Plantations Tbk			1	

Tabel L1.1. Lanjutan

				Partisi	pasi dalam Lok	akarya
No	Nama	Instansi	Jabatan	Lokakarya 1	Lokakarya 2	Lokakarya 3
225	Imam Susilo	PT Eagle High Plantations Tbk	Head CSR			1
226	Yogi	PT Eagle High Plantations Tbk	Senior Staff Plasma CSR			1
227	Dico Satriyo W.	PT Ecogreen Oleochemicals			1	1
228	Rahmat Ahdiansyah	PT Mutu Agung Lestari				1
229	Taufiq Surahman	PT Musim Mas		1		
230	Siswondo Parman	PT Musim Mas		1		
231	Edi Suryanto	PT Salim Ivomas Pratama			1	
232	Banu A. Imantara	PT Sampoerna Agro Tbk			1	1
233	Jusupta Tarigan	PT SMART Tbk	Head of Economic Empowerment, Sustainability & Communications	1		
234	Agus Purnomo	PT SMART Tbk	Senior Advisor Sustainability	1		
235	Sinung Raharjo S.	PT SMART Tbk		1		
236	Agus Winarno Boyce	PT SMART Tbk	Senior Expert CSO SusCom		1	1
237	Farras Imantoko	PT Sucofindo	Lead Auditor ISPO			1
238	Riasman Damanik	PT Sucofindo	Senior Lead Auditor Sustainability Schemes/ISPO- SVLK	1		
239	Amelia Majid	PT Surveyor Indonesia		1		
240	Hafizh Farhan H. F.	PT Surveyor Indonesia		1		
241	Revidia R. S.	PT Surveyor Indonesia		1		
242	Martinus Naya	PT Surveyor Indonesia		1		
243	Rus Sylvi IP	Pustandpi BSI-LHK		1		
244	Luthfia Zahra Z.	Puter Indonesia			1	
245	Hendri Ziasmono	Rainforest Alliance	Palm Oil Stakeholder Engagement		1	

Tabel L1.1. Lanjutan

N	Nama	lundama"	la base	Partisi	pasi dalam Lok	akarya
No	Nama	Instansi	Jabatan	Lokakarya 1	Lokakarya 2	Lokakarya 3
246	Tri Padukan Purba	Rainforest Alliance	Palm Oil Program Manager		1	
247	Doddy Aryadi	Rainforest Alliance			1	
248	Tubagus Siagian	Rainforest Alliance			1	
249	Laura Flowrensia	Rainforest Alliance/ LandScale	LandScale Senior Program Associate		1	
250	Cecep Saepulloh	Remark Asia		1		
251	Ajrini Shabrina	Remark Asia			1	
252	Aslinda N. M.	Remark Asia				1
253	Kostian Fitri Yanti	Remark Asia				1
254	Zhafira Rizky Amelia	Remark Asia			1	1
255	Ilham Setiawan Noer	Resilience Development Initiative (RDI)	Research Officer EAFOR-RDI			1
256	Niki Nofari	RSPO		1		
257	Mahatma Windrawan	RSPO	Market Transformation Deputy Director	1		1
258	Stephany Iriana Pasaribu	RSPO	Stakeholders Engagement Manager	1		1
259	Imam A. El Marzuq	RSPO, Rainforest Alliance		1		1
260	Sandika Ariansyah	Samdhana Institute	Program Staff		1	1
261	Sayyidatiihayaa Afra	Satya Bumi	Researcher			1
262	G. Victor M. Sibarani, S.Hut., S.H.	SBRN Law Office				1
263	Achmad Surambo	Sawit Watch	Direktur	1		
264	Hady Saputra	Sawit Watch		1		
265	Agustin Rahayu	Sekretariat Wakil Presiden RI	Analis Kebijakan Madya		1	1
266	Dwi Nursanti	Sekretariat Wakil Presiden RI			1	
267	Marini Sarizki	Sekretariat Wakil Presiden RI	Analis Kebijakan Muda		1	1
268	Muhammad Indra N.	Sekretariat Wakil Presiden RI			1	
269	Aris Darujo	SIPPO				1
270	Sutrisna	SIPPO				1
271	Dani Rahadian Hidayat	SNV	Oil Palm Advisor	1		

Tabel L1.1. Lanjutan

No	Nama	Instanci	lahatan	Partisi	pasi dalam Lok	akarya
No	Nama	Instansi	Jabatan	Lokakarya 1	Lokakarya 2	Lokakarya 3
272	Audelia Thalita R.	Solidaridad Indonesia		1		
273	Hermawan Yulianto	Solidaridad Indonesia				1
274	Ali Akbar	Solidaridad Indonesia				1
275	Ahmad Ghazian 'Atiqi	Swisscontact Indonesia			1	
276	Christina Rini	Swisscontact Indonesia				1
277	Teuku Bahran Basyiran	Swisscontact Indonesia				1
278	Andri Kornelius	Tay Juhana Foundation				1
279	Andry Satrio	The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)	Head of Center of Industry, Trade and Investment	1		
280	Janne Siregar	Tropical Forest Alliance (TFA)	Jurisdictional & Communication Lead	1	1	
281	Rini Indriyanti	UNDP Indonesia				
282	Sunaryo	Universitas Indonesia		1		
283	Hariati Sinaga	Universitas Indonesia			1	
284	Dr. Dhanu Pitoyo	Universitas Palangka Raya			1	1
285	Muhammad Arief Rafsanjani	Universitas Palangka Raya		1	1	1
286	Dr. Hendrik Segah	Universitas Palangka Raya	Direktur PPIIG UPR	1		1
287	Dr. Zafrullah Damanik	Universitas Palangka Raya	Sekretaris PPIIG UPR			1
288	Dr. Sustiyah	Universitas Palangka Raya				1
289	Chartina Pidjath	Universitas Palangka Raya				1
290	Dr. Natalina Asi	Universitas Palangka Raya	Wakil Rektor UPR			1
291	Haryani Turnip	USAID SEGAR	STTA	1		
292	Benny	WartaJakarta				1
293	Dany	WartaJakarta			1	
294	Astrid Fitriani	WCS Indonesia				1
295	Jeni Pareira	WCS Indonesia		1		

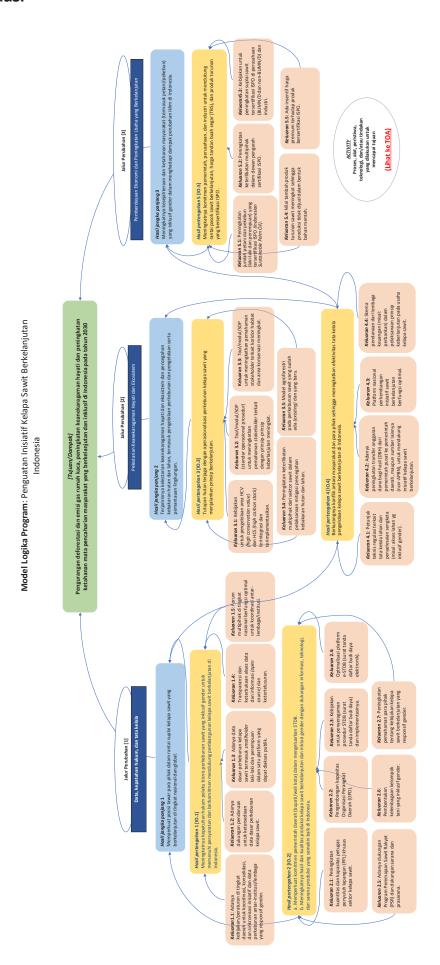
Tabel L1.1. Lanjutan

Ne	Nama	lustansi:	Inhatas	Partisi	pasi dalam Lok	akarya
No	Nama	Instansi	Jabatan	Lokakarya 1	Lokakarya 2	Lokakarya 3
296	Jeri Imansyah	WCS Indonesia			1	
297	Titiek Setyawati	WCS Indonesia/BRIN		1		
298	Pujuh Kurniawan	Wilmar	Indonesia Sustainability Lead			1
299	Syahrial Anhar Harahap	Wilmar		1		1
300	Hultera Paul	Winrock International			1	
301	Heru P. Yuda	World Bank	Consultant - Agriculture Specialist			1
302	Ruby Mangunsong	World Bank				1
303	Triyanto Fitriyadi	World Bank				1
304	Rostanto Suprapto	WRI Indonesia		1		
305	Shofia Saleh	WRI Indonesia				1
306	Benita Nathania	WRI Indonesia	Forest & Landscape Monitoring Project Lead	1		
307	Muhammad Irham Maulana	WWF Indonesia		1		
308	Nurul Azizah	WWF Indonesia	Staff	1		
309	Ahmad Syafri	WWF Indonesia	Expert	1		
310	Dewi Rizki	WWF Indonesia	Chief Conservation Officer (CCO)			1
311	Rizka Nurul Annisa	WWF Indonesia				1
312	Darkono Tjawikrama	Yayasan EcoNusantara	Peneliti	1	1	
313	Dr. La Ode Mbunai, S.H., M.H., CLA	Yayasan Ekolikum Studi Indonesia	Direktur Eksekutif Eksekusi			1
314	R. Ari Wibowo	Yayasan Ekolikum Studi Indonesia				1
315	Anton Sanjaya	Yayasan KEHATI				1
316	M. Bintoro	Yayasan Hutan Tropis	Landscape Team	1		
317	Anne Fadilla Rachmi	Yayasan IDH	Program Manager, Landscape Governance		1	
318	Yohanes Ryan	Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)	Sustainable Oil Palm Senior Manager		1	
319	Dhia Fauziyah Salsabila	Yayasan Madani Berkelanjutan	Program Assistant		1	

Tabel L1.1. Lanjutan

				Lokakarya 1 Lokakarya 2 Loka		akarya
No	Nama	Instansi	Jabatan			Lokakarya 3
320	Trias Fetra	Yayasan Madani Berkelanjutan	Program Officer		1	
321	Sadam Afian R.	Yayasan Madani Berkelanjutan			1	
322	Sofie Choirun Nisa	Yayasan Madani Berkelanjutan	Program Assistant		1	
323	Agysta Zaskia	Yayasan Riung Rimbaraya Indonesia			1	
324	Rafly Rifansyah	Yayasan Riung Rimbaraya Indonesia				1
325	Fitrianto Nurfaizin	Yayasan Riung Rimbaraya Indonesia			1	1
326	Gita P. J.	Yayasan Sangga Bumi Lestari		1		
327	Okita Miraningrum	Yayasan Sangga Bumi Lestari				1
328	Sri Wahyuni	Yayasan Sangga Bumi Lestari	Supply Chain Research Officer	1		1
	Total peserta masing-	masing lokakarya		140	109	162
	Total peserta lokakar	ya 1, 2, dan 3			328	
	Total instansi				146	

## 2. Bagan Rinci Teori Perubahan, Teori Tindakan, serta Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi



Teori Aksi - Penguatan Inisiatif Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

1.1 Mendorong (melalui aktor nasional) adanya kebijakan/peraturan di tingkat daerah untuk koordinasi, konsolidasi, dan sinkronisasi inisiatif serta data perkebunan antar-institusi/lembaga yang responsif gender.	natura de	[O.1] Meningkatnya kepatuhan hukum pelaku bisnis perkebunan sawit yang inklusif gender untuk memenuhi	(LO.1) Memperkuat posisi tawar para pihak dalam rantai suplai kelapa sawit yang berkelanjutan di	Pengurangan deforestasi dan emisi gas rumah kaca, peningkatan keanekaragaman
Penganggaran dana untuk pengumpulan data dan pembangunan piduform data dasar.     As Pengumpulan data dan pembangunan pidiform data dasar perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dan bisa diakses oleh publik.	1.2 Adanya dukungan pendanaan untuk ketersediaan data dasar perkebunan kelapa sawit. 1.3 Adanya data dasar perkebunan kelapa sawit termasuk pemangku kepentingan laki-laki dan perempuan dalam satu piatjorn yang dapat diakses publik.	persyaratan dan berkomitmen mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.	tingkat nasional dan global.	hayati dan peningkatan ketahanan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia pada tahun 2030.
Pembangunan plotform data yang terintegrasi dan bisa diakses publik untuk mendukung ketertelusuran.     Optimalisasi forum multipihak di tingkat nasional untuk koodinasi	1.4 Transparansi dan keterbukaan akses data dan informasi ( <i>open source</i> ) dan ketertelusuran. 1.5 Forum multiphak di fungat nasional berfungsi optimal untuk			
antahermogganisutusi. 2.1.a Rekrutmen petugas penyuluh lapangan (PPL) khusus untuk pendampingan kelapa sawit. 2.1.b Penyeragaman modul pendampingan dan peningkatan kapasitas	Roodinasi anda-retriogga/instrus. 2.1 Peningkatan kuantitas dan kapasitas PPL khusus sektor kelapa sawit.			
2.2 Pelatihan untuk pengembangan kapasitas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung inisiatif dan komitmen kelapa sawit berkelanjutan di tingkat tapak.	2.2 Pengembangan kapasitas organisasi perangkat daerah (OPD).	[IO.2] a. Memperkuat komitmen pemerintah daerah (bupati/wali kota) dalam mengeluarkan STDB.		
2.3 Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan untuk penyeragaman prosedur dalam mengeluarkan STDB (surat tanda daftar budi daya).	2.3 Kebijakan untuk penyeragaman prosedur STDB dan implementasinya.	b. Meningkatnya hasil dan kualitas produksi kelapa sawit berkelanjutan dan		
2.4 Pemeliharaan <i>plotform</i> e-STDB (surat tanda daftar budi daya elektronik).	2.4 Optimalisasi <i>platform</i> e-STDB.	inklusi gender dengan dukungan informasi, teknologi, dan sarana		
2.5 Percepatan implementasi kebijakan, dukungan pendanaan, dan penyederhanaan prosedur untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan perbaikan/peningkatan sarana dan prasarana.	2.5 Adanya dukungan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan dukungan sarana dan prasarana.	produksi yang semakin baik di Indonesia.		
2.6 Membentuk kelembagaan kelompok tani yang inklusi gender untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas dan adopsi praktik-praktik keberlanjutan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit	2.6 Pembentukan kelembagaan kelompok tani yang inklusi gender.			
2.7 Sosialisasi dan edukasi para pihak terkait kebijakan kelapa sawit berkelanjutan yang responsif gender	2.7 Peningkatan pemahaman para pihak tentang kebijakan kelapa sawit berkelanjutan yang responsif gender.			
3.1 Integrasi dan implementasi kebijakan untuk pengelolaan area HCV Thinh conservotion voluel dan HCS thinh corbon stock.	3.1 Kebijakan untuk pengelolaan area HCV dan HCS terintegrasi dan terimbementasikan.	[IO.3] Tutupan hutan terjaga dengan operasionalisasi perkebunan kelapa	[LO.2] Terjaminnya kelestarian keanekaragaman hayati dan	
3.2 Edukasi dan sosialisasi kepada para pihak untuk menerapkan prinsip- prinsip keberlanjutan meningkat.	<ol> <li>Toof /modul/standar operasional prosedur (SOP) untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terkait prinsip- prinsip keberlanjutan.</li> </ol>	sawit yang menjalankan prinsip berkelanjutan.	ekosistem dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, termasuk pengelolaan perkebunan	
<ol> <li>3.3 Edukasi dan sosialisasi kepada para pihak terkait koridor habitat dan area konservasi meningkat.</li> </ol>	3.3 Tool /modul/SOP untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terkait koridor habitat dan area konservasi.		dan pengelolaan serta pemantauan lingkungan.	
3.4 Edukasi, sosialisasi, dan pelibatan multipihak dalam proses pelaksanaan mitigasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 3.5 Implementasi/pengembangan model agroforestri pada perkebunan sawit yang sudah ada (existing) dan yang baru	3.4 Peningkatan keterlibatan multipihak dari sektor sawit dalam pelaksanaan mitigasi pencegahan kebakaran Intran dan lahan. 3.5 Model agroforestri pada perkebunan sawit yang sudah ada (existing) dan yang baru.			
4.1 Pengembangan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) regulasi terkait dengan tata kelola lahan dan sengketa.	4.1 Juknis dan Juklak regulasi terkait tata kelola lahan dan penyelesaian sengketa (misal: akses lahan gi inklusif gender).	(10.4) Berkurangnya konflik antara masyarakat dan para pihak sehingga		
4.2. Mendarong perubahan kebujakan dalam transter anggaran daha bagi hasil (DBH) untuk mendukung inisiatif kelapa sawit berkelanjutan yang sudah ada (existing) dan yang baru diinisiasi.	4.2 Adanya peningkatan transfer anggaran UBH dari pemerintan pusat ke pemerintah daerah, maupun sumber lainnya (non-APBN), untuk mendukung inisiatif kelapa sawit berkelanjutan.	meningkatkan erektivitas tata kelola pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.		
4.3. Optimalisasi <i>platform</i> untuk memantau perkembangan inisiatif kelapa sawit berkelanjutan.	4.3 Platform nasional perkembangan inisiatif sawit berkelanjutan berfungsi optimal.			
4.4. Pengembangan skema pendanaan dari lembaga keuangan (misal: perbankan) dalam pelaksanaan kegiatan.	4.4 Skema pendanaan dari lembaga keuangan (misal: perbankan) dalam pelaksanaan prinsip keberlanjutan pada usaha kelapa sawit.			
5.1 Percepatan dan dukungan pendanaan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) bagi petani.	S.1 Peningkatan jumlah petani dan pekebun (laki-laki dan perempuan) yang tersertifikasi ISPO.	[IO.5] Meningkatnya komitmen pemerintah, perusahaan, dan industri	[LO.3] Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan	
<ol> <li>Mendorong pelibatan para pihak dalam dewan pengarah sertifikasi ISPO.</li> </ol>	5.2 Peningkatan keterlibatan multipihak dalam dewan pengarah sertifikasi ISPO.	untuk mendukung rantai pasok sawit berkelanjutan, harga tandan buah segar	masyarakat (termasuk petani) yang inklusif gender dalam menghadapi	
5.3 Pengembangan untuk peningkatan suplai sawit tersertifikasi ISPO.	S.3 Kebijakan untuk peningkatan suplai sawit tersertifikasi ISPO di perusahaan (BUMN/BUMD, dan non-BUMN/D) dan industri.	(TBS) dan produk turunan yang bersertifikasi ISPO.		
5.4 Pengembangan nilai tambah produk turunan sawit sehingga hasil produksi tidak dijual dalam bentuk bahan mertah. S. S. Bonasam haranan kema insentif haran anamium tarbadan noduk	5.4 Nilai tambah produk turunan sawit meningkat sehingga produksi tidak dijual dalam bentuk bahan mentah.			
5.5. rengemangan skema inseriur nanga preminum ternadap produk bersertifikasi ISPO.	5.5 Add Insertit natiga premium temadap produk berseruması 15°C.			

#### Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi (MEF-Monitoring and Evaluation Framework) - Penguatan Inisiatif Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Ringkasan	Indikator Pintar (kualitatif/kuantitatif) %persentase/#jumlah	Baseline (berapa nilai saat ini)	Target (berapa nilai target)	Sumber Data/Cara Verifikasi	Frekuensi (seberapa sering akan dimonitor dan diukur)	Tanggung jawab oleh (siapa yang akan memonitor dan mengukur)	Pelaporan (di mana akan dilaporkan)	Asumsi Utama
Dampak Pengurangan deforestasi dan emisi gas rumah kaca, peningkatan keanekaragaman hayati, dan peningkatan ketahanan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif di	Persentase (%) menurunnya angka deforestasi di Indonesia pada tahun 2030 (untuk kontribusi pada target SDGs).	Untuk didiskusikan oleh Tim Pelaksana/ Sekretariat RAN KSB (TBD)	80%	TBD	1x setahun	Tim khusus yang ditunjuk sekretariat/evaluator eksternal	Laporan Sekretariat RAN KSB ke Kementan	Berjalannya kontrol dalam proses perizinan dan operasional pembukaan kawasan/alih fungsi lahan bagi perusahaan perkebunan.
Indonesia pada tahun 2030.	dapat dihindari	TBD TBD	39.000 ha 1.950.000 ha	TBD TBD	1x setahun	Tim khusus yang ditunjuk sekretariat/evaluator eksternal	Laporan Sekretariat RAN KSB ke Kementan	<ul> <li>Adanya perencanaan sektor perkebuna yang berkomitmen dalam mencegah terjadinya deforestasi.</li> </ul>
Hasil jangka panjang [LO.1] Memperkuat posisi tawar para pihak dalam rantai suplai kelapa sawit yang berkelanjutan di tingkat nasional dan global.	hutan alam Persentase (%) peningkatan pendapatan petani dari penjualan tandan buah segar (TBS).	TBD	20%	TBD	1x setahun	Tim khusus yang ditunjuk sekretariat/evaluator eksternal	Laporan Sekretariat RAN KSB ke Kementan	
Hasil jangka menengah [IO.1] Meningkatnya kepatuhan hukum pelaku bibinis perkebunan sawit yang inklusif gender untuk memenuhi persyaratan dan berkomitmen mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.	Jumlah (#) perusahaan perkebunan yang memenuhi persyaratan penilaian usaha perkebunan (PUP) dan berkomitmen mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.	TBD	TBD	TBD	1x setahun	Tim khusus yang ditunjuk sekretariat/evaluator eksternal	Laporan Sekretariat RAN KSB ke Kementan	
1.1 Adanya kebijakan/peraturan di tingkat daerah untuk koordinasi, konsolidasi, dan sinkronisasi inisiatif dan data perkebunan antar- institusi/lembaga yang responsif gender.	Jumlah (#) kebijakan/peraturan yang diterbitkan untuk mendorong koordinasi, konsolidasi, dan sinkronisasi inisiatif dan data perkebunan di tingkat daerah	TBD			1x per semester (6 bulan)		Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan koordinator sekretariat/Kementan	
1.2 Adanya dukungan pendanaan untuk ketersediaan data dasar perkebunan kelapa sawit	Jumlah (#) anggaran untuk dukungan pendataan perkebunan kelapa sawit di nasional dan daerah.	TBD			1x per semester (6 bulan)	Tim Pemantauan dan Evaluasi (monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan koordinator sekretariat/Kementan	
1.3 Adanya data dasar perkebunan kelapa sawit (termasuk pemangku kepentingan laki-laki dan perempuan) dalam satu platform yang dapat diakses publik.	Adanya <i>platform</i> data dasar perkebunan kelapa sawit yang dapat diakses oleh publik	TBD			1x per semester (6 bulan)	Tim Pemantauan dan Evaluasi (monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan koordinator sekretariat/Kementan	
1.4 Transparansi dan keterbukaan akses data dan informasi (open source) dan ketertelusuran.		TBD			1x per semester (6 bulan)	Tim Pemantauan dan Evaluasi (monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan koordinator sekretariat/Kementan	
1.5 Forum multipihak di tingkat nasional berfungsi optimal untuk koodinasi antar- lembaga/institusi	Adanya forum multipihak yang aktif sebagai tempat koodinasi antar- lembaga/institusi.	TBD			1x per semester (6 bulan)	Tim Pemantauan dan Evaluasi (monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan koordinator sekretariat/Kementan	
Hasil jangka menengah [IO.2] a. Memperkuat komitmen pemerintah daerah (bupati/wali kota) dalam mengeluarkan STDB.	Jumlah (#) pemerintah daerah (bupati/wali kota) yang berkomitmen mengeluarkan STDB.	TBD	16.000 petani plasma		1x setahun	Tim khusus yang ditunjuk sekretariat/evaluator eksternal	Laporan Sekretariat RAN KSB ke Kementan	Adanya komitmen pemerintah dan dukungan PPL dalam melakukan pendampingan/pelatihan bagi pekebun terkait dengan diversifikasi.
<ul> <li>b. Meningkatnya hasil dan kualitas produksi kelapa sawit berkelanjutan dan inklusi gender dengan dukungan informasi, teknologi, dan sarana produksi yang semakin baik di Indonesia.</li> </ul>	Jumlah (#) petani plasma yang mendapatkan manfaat dari dukungan peningkatan kualitas produksi kelapa sawit berkelanjutan.							
2.1 Peningkatan kuantitas dan kapasitas petugas penyuluh lapangan (PPL) khusus sektor kelapa sawit.	Jumbal (e) PPL yang dilathi dan berkomitmen untuk menjadi PPL khusus sektor kelapa sawit. Jumbal (e) pelatihan/sesi pendampingan dan bimbingan yang diberikan kepada petani oleh PPL Jumlah (e) petani yang mengikuti kegiatan yang diorganisasi atuu duduung oleh PYL, seperti pertemuan	тво			1x per semester (6 bulan)	Tim Penantauan dan Evaluasi (monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan koordinator sekretariat/Kementan	
2.2 Pengembangan kapasitas organisasi perangkat daerah (OPD).	kelomond stau nelatikan lananean Jumlah (#) pelatihan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan untuk staf organisasi perangkat daerah (OPD). Jumlah (#) staf organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengikuti pelatihan pengelolaan kelapa sawit	TBD			1x per semester (6 bulan)	Tim Pemantauan dan Evaluasi (monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan koordinator sekretariat/Kementan	
2.3 Kebijakan untuk penyeragaman prosedur STDB dan implementasinya.	herkelaniutan Jumlah (#) kebijakan untuk penyeragaman prosedur STDB Jumlah (#) dokumen SOP/mekanisme pemantauan implementasi nenyeragaman prosedur STDR	TBD			1x per semester (6 bulan)	Tim Pemantauan dan Evaluasi (monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan koordinator sekretariat/Kementan	
2.4 Optimalisasi <i>platform</i> e-STDB		TBD			1x per semester (6 bulan)	Tim Pemantauan dan Evaluasi (monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan koordinator sekretariat/Kementan	
2.5 Adanya dukungan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan dukungan sarana dan prasarana.	perempuan) yang mengikuti pelatihan dan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam budi daya kelapa sawit yang berkelanjutan.	TBD			1x per semester (6 bulan)	Tim Pemantauan dan Evaluasi (monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan koordinator sekretariat/Kementan	
2.6 Pembentukan kelembagaan kelompok tani yang inklusi gender.	Jumlah (#) kelompok tani yang dibentuk di tingkat desa/kecamatan.				1x per semester (6 bulan)	Tim Pemantauan dan Evaluasi (monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan koordinator sekretariat/Kementan	
2.7 Peningkatan pemahaman para pihak tentang kebigikan kelapa sawit berkelanjutan yang responsif gender.	Jumlah (#) pelatihan tentang kebijakan kelapa sawit berkelanjutan yang responsif gender yang diselenggarakan. Jumlah (#) para pihak yang mendapatkan pelatihan tentang kebijakan kelapa sawit berkelanjutan yang responsif gender.	TBD			1x per semester (6 bulan)	Tim Pemantauan dan Evaluasi (money) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan koordinator sekretariat/Kementan	

Berlanjut ke halaman berikutnya

Ringkasan	Indikator Pintar	Baseline	Target	Sumber Data/Cara	Frekuensi	Tanggung jawab oleh	Pelaporan	Asumsi Utama
	(kualitatif/kuantitatif) %persentase/#jumlah	(berapa nilai saat ini)	(berapa nilai target)	Verifikasi	(seberapa sering akan dimonitor dan diukur)	(siapa yang akan memonitor dan mengukur)	(di mana akan dilaporkan)	
Hasil jangka panjang [LO.2] Terjaminnya kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem serta pencegahan	Adanya sistem peringatan dini dan respons cepat untuk mendeteksi dan merespons kebakaran hutan dan lahan	TBD			1x setahun	Tim khusus yang ditunjuk sekretariat/evaluator eksternal	Laporan Sekretariat RAN KSB ke Kementan	
kebakaran hutan dan lahan, termasuk pengelolaan perkebunan dan pengelolaan dan	Nol deforestasi: perkebunan kelapa							
pemantauan lingkungan.	sawit tidak berkontribusi terhadap deforestasi baru dan mencapai nol							
Hasil jangka menengah [10.3] Tutupan hutan terjaga dengan	deforestasi Jumlah (#) ha area hutan yang terjaga khusus untuk konservasi	TBD			1x setahun	Tim khusus yang ditunjuk sekretariat/evaluator eksternal	Laporan Sekretariat RAN KSB ke Kementan	
operasionalisasi perkebunan kelapa sawit yang menjalankan prinsin berkelanjutan	keanekaragaman hayati.							
3.1 Kebijakan untuk pengelolaan area HCV dan HCS terintegrasi dan terimplementasikan.	Adanya kebijakan pengelolaan area HCV dan HCS terintegrasi dan terimplementasikan.	TBD			1x per semester (6 bulan)	Tim Pemantauan dan Evaluasi (monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan koordinator	
3.2 Tool/modul/standar operasional prosedur	Adanya tool/modul/standar	TBD			1x per semester	Tim Pemantauan dan Evaluasi	Laporan 6 bulan dan	
(SOP) untuk meningkatkan pemahaman stakeholder terkait prinsip-prinsip keberlanjutan meningkat.	operasional prosedur (SOP) terkait prinsip-prinsip keberlanjutan meningkat.				(6 bulan)	(monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	tahunan disampaikan koordinator	
3.3 Tool/modul/SOP untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terkait	Adanya tool /modul/SOP terkait koridor habitat dan area konservasi meningkat.	TBD			1x per semester (6 bulan)	Tim Pemantauan dan Evaluasi (monev) internal yang dibentuk	sekretariat/Kementan Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan	
koridor habitat dan area konservasi meningkat.						oleh Sekretariat RAN KSB	koordinator sekretariat/Kementan	
3.4 Peningkatan keterlibatan multipihak dari sektor sawit dalam pelaksanaan mitigasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	Jumlah (#) pihak (lembaga/individu/kelompok) yang terlibat dan berpartisipasi dalam	TBD			1x per semester (6 bulan)	Tim Pemantauan dan Evaluasi (monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan koordinator	
	pengelolaan dan pemantauan lingkungan						sekretariat/Kementan	
<ol> <li>Model agroforestri pada perkebunan sawit yang sudah ada (existing) dan yang baru.</li> </ol>	Adanya indeks keanekaragaman: Pengukuran tingkat keanekaragaman hayati dengan memperhitungkan	TBD			1x per semester (6 bulan)	Tim Pemantauan dan Evaluasi (monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSBB	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan koordinator	
	jumlah dan jenis tanaman di area agroforestri.					Olem Sext etamat (VAIV KSBB	sekretariat/Kementan	
	Adanya desain agroforestri dalam							
	perencanaan awal pembangunan perkebunan kelapa sawit baru.							
	Persentase (%) luas lahan (ha) yang diintegrasikan dengan tanaman							
Hasil jangka panjang [IO.4] Berkurangnya konflik antara masyarakat	pernforestri Pengelolaan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan prinsip-prinsip hak guna	TBD			1x setahun	Tim khusus yang ditunjuk sekretariat/evaluator eksternal	Laporan Sekretariat RAN KSB ke Kementan	Terbangunnya harmonisasi/kemitraan antara perkebunan kelapa sawit dan
dan para pihak sehingga meningkatnya efektivitas tata kelola pengelolaan kelapa sawit	usaha yang berkelanjutan. Persentase luas lahan yang					secretariaty evaluator exsternal	NAN KOD KE KEMENTAN	masyarakat sekitar kawasan perkebunan.
berkelanjutan di Indonesia. 4.1 Juknis dan Juklak regulasi terkait tata kelola	diintegrasikan dengan tanaman Adanya juknis dan juklak regulasi terkait	TBD			1x per semester	Tim Pemantauan dan Evaluasi	Laporan 6 bulan dan	
lahan dan penyelesaian sengketa (misal: akses lahan yang inklusif gender)	tata kelola lahan dan penyelesaian sengketa.				(6 bulan)	(monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	tahunan disampaikan koordinator sekretariat/Kementan	
4.2 Adanya peningkatan transfer anggaran DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah	Persentase (%) peningkatan transfer anggaran DBH dari pemerintah pusat ke	TBD			1x per semester (6 bulan)	Tim Pemantauan dan Evaluasi (monev) internal yang dibentuk	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan	
maupun sumber lainnya (non-APBN) untuk mendukung inisiatif kelana sawit herkelaniutan	pemerintah daerah					oleh Sekretariat RAN KSB	koordinator sekretariat/Kementan	
4.3 Platform nasional perkembangan inisiatif sawit berkelanjutan berfungsi optimal.	Jumlah (#) pihak (pemerintah/swasta) yang terlibat/bertanggung jawab untuk peningkatan fungsi platform nasional	TBD			1x per semester (6 bulan)	Tim Pemantauan dan Evaluasi (monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan koordinator	
	perkembangan inisiatif sawit berkelaniutan						sekretariat/Kementan	
4.4 Skema pendanaan dari lembaga keuangan (misal: perbankan) dalam pelaksanaan prinsip keberlanjutan pada usaha kelapa sawit	Jumlah (#) petani (laki-laki dan perempuan) anggota kelompok tani yang mendapatkan akses ke layanan	TBD			1x per semester (6 bulan)	Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan koordinator	
Hasil jangka panjang	keuangan. seperti kredit dan tabungan. Persentase (%) peningkatan	TBD			1x setahun	Tim khusus yang ditunjuk	sekretariat/Kementan Laporan Sekretariat	
[LO.3] Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan masyarakat (termasuk petani) yang inklusif gender dalam menghadapi dampak	pendapatan yang dihasilkan masyarakat dari produk sawit dan produk turunannya.					sekretariat/evaluator eksternal	RAN KSB ke Kementan	
perubahan iklim di Indonesia.	Integrasi isu perubahan iklim dalam							
	kebijakan dan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten.							
Hasil jangka menengah [IO.5] Meningkatnya komitmen pemerintah,	Jumlah (#) pihak (pemerintah, perusahaan dan industri) yang	TBD			1x setahun	Tim khusus yang ditunjuk sekretariat/evaluator eksternal	Laporan Sekretariat RAN KSB ke Kementan	
perusahaan, dan industri untuk mendukung rantai pasok sawit berkelanjutan, harga tandan	berkomitmen mendukung terkait rantai pasok sawit berkelanjutan.							
buah segar (TBS) dan produk turunan yang bersertifikasi ISPO .	Jumlah (#) perkebunan kelapa sawit memegang sertifikasi berkelanjutan							
	seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil ) yang menetapkan							
5.1 Peningkatan jumlah petani dan pekebun (laki-	prinsip-prinsip berkelanjutan.  Jumlah (#) petani dan pekebun (laki-laki	TRD			1x per semester	Tim Pemantauan dan Evaluasi	Laporan 6 bulan dan	
laki dan perempuan) yang tersertifikasi ISPO meningkat.	dan perempuan) yang tersertifikasi ISPO meningkat.	100			(6 bulan)	(monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	tahunan disampaikan koordinator	
5.2 Peningkatan keterlibatan multipihak dalam dewan pengarah sertifikasi ISPO.	Jumlah (#) pihak (pemerintah,	TBD			1x per semester	Tim Pemantauan dan Evaluasi	sekretariat/Kementan Laporan 6 bulan dan	
uewan pengaran sertifikasi ISPO.	perusahaan dan industri) yang mendapatkan pelatihan terkait rantai pasok sawit berkelanjutan dan				(6 bulan)	(Monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	tahunan disampaikan koordinator sekretariat/Kementan	
5.3 Kebijakan untuk peningkatan suplai sawit	sertifikasi ISPO. Adanya Kebijakan untuk peningkatan				1x per semester	Tim Pemantauan dan Evaluasi	Laporan 6 bulan dan	
tersertifikasi ISPO di perusahaan (BUMN/BUMD, dan non-BUMN/D) dan industri.	suplai sawit tersertifikasi ISPO di perusahaan dan industri.				(6 bulan)	(monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	tahunan disampaikan koordinator sekretariat/Kementan	
5.4 Nilai tambah produk turunan sawit meningkat sehingga produksi tidak dijual dalam	Jumlah (#) variasi produk turunan kelapa sawit yang dihasilkan seperti	TBD			1x per semester (6 bulan)	Tim Pemantauan dan Evaluasi (monev) internal yang dibentuk	Laporan 6 bulan dan tahunan disampaikan	
bentuk bahan mentah.	minyak kelapa sawit, margarin, sabun, biodiesel, dan produk lainnya.					oleh Sekretariat RAN KSB	koordinator sekretariat/Kementan	
	Adanya kemitraan pemangku kepentingan (petani, pemerintah, dan							
	organisasi non-pemerintah) untuk mendukung nilai tambah dan							
5.5 Ada insentif harga premium terhadap produk	memasarkan produk turunan kelapa sawit Adanya/peningkatan persentase (%)	TBD			1x per semester	Tim Pemantauan dan Evaluasi	Laporan 6 bulan dan	
bersertifikasi ISPO.	insentif harga premium terhadap produk bersertifikasi ISPO.				(6 bulan)	(monev) internal yang dibentuk oleh Sekretariat RAN KSB	tahunan disampaikan koordinator	
		1			1	1	sekretariat/Kementan	

#### 3. Data SIPOS

Tabel L3.1. Variabel perkebunan kelapa sawit perusahaan dan rakyat, serta produksinya\*

Variabel	Unit	Nilai	Sumber
Perkebunan perusahaan dalam keadaan belum menghasilkan	ha	873.455	Kementerian Pertanian (2022)
Perkebunan perusahaan dalam keadaan menghasilkan	ha	7.714.121	
Perkebunan perusahaan dalam keadaan rusak	ha	238.574	
Perkebunan rakyat dalam keadaan belum menghasilkan	ha	1.100.638	
Perkebunan rakyat dalam keadaan menghasilkan	ha	4.627.863	
Perkebunan rakyat dalam keadaan rusak	ha	431.102	
Produksi perusahaan	ton CPO th-1	30.061.658	
Produksi petani	ton CPO th-1	15.519.234	
Produktivitas perusahaan	ton CPO ha <sup>-1</sup> th <sup>-1</sup>	3,41	
Produktivitas petani	ton CPO ha <sup>-1</sup> th <sup>1</sup>	3,35	
Jumlah petani sawit	orang	2.546.866	

<sup>\*</sup>seluruh data yang disajikan adalah data tahun 2022

Tabel L3.2. Tutupan lahan dan fraksi hutan terhadap perkebunan kelapa sawit (%)

Tutunan lahan cahalumnya		Status kawasan				
Tutupan lahan sebelumnya	APL	НРК	HP	HL dan HK		
Lahan pertanian	25,8	36,0	19,5	50,3		
Lahan pertanian gambut	8,4	23,0	21,9	7,3		
Hutan mineral	29,3	14,3	18,1	13,6		
Mangrove	0,1	0,5	0,1	0,3		
Pertambangan	0,1	0	0	0		
Pertambangan di gambut	0	0	0	0		
Vegetasi nonhutan	24,3	15,9	17,6	15,5		
Vegetasi nonhutan di gambut	2,8	4,8	3,0	8,5		
Nonvegetasi	2,5	0,8	1,9	0,8		
Nonvegetasi di gambut	0,7	0,2	0,2	0,8		
Hutan gambut	4,8	3,8	2,5	2,2		
Hutan tanaman	1,0	0,5	12,8	0,8		
Hutan tanaman di gambut	0,2	0,1	2,5	0		
Total	100	100	100	100		

Keterangan:

APL : Areal penggunaan lain HPK : Hutan produksi konversi

HP : Hutan produksi (termasuk hutan produksi terbatas)

HL dan HK : Hutan lindung dan hutan konservasi

Sumber: Hasil pengolahan data dari peta tutupan lahan (MapBiomas Indonesia 2022) dan ekstensi lahan gambut (Xu dkk. 2018)

Tabel L3.3. Emisi dari sektor kelapa sawit

Sumber emisi	Unit	Nilai	Sumber
Pembukaan lahan dari:			NFREL (2022)
Lahan pertanian	Mg CO₂e ha⁻¹	51	
Lahan pertanian di gambut	Mg CO₂e ha⁻¹	51	
Hutan mineral	Mg CO₂e ha⁻¹	537	
Mangrove	Mg CO₂e ha⁻¹	457	
Pertambangan	Mg CO₂e ha⁻¹	0	
Pertambangan di gambut	Mg CO₂e ha⁻¹	0	
Vegetasi nonhutan	Mg CO₂e ha⁻¹	104,1	
Vegetasi nonhutan di gambut	Mg CO <sub>2</sub> e ha <sup>-1</sup>	33	
Nonvegetasi	Mg CO₂e ha⁻¹	0	
Nonvegetasi di gambut	Mg CO₂e ha⁻¹	0	
Hutan gambut	Mg CO₂e ha⁻¹	390,7	
Hutan tanaman	Mg CO <sub>2</sub> e ha <sup>-1</sup>	257	
Hutan tanaman di gambut	Mg CO <sub>2</sub> e ha <sup>-1</sup>	130,6	
Emisi dari operasional perkebunan	Kg CO <sub>2</sub> e ha <sup>-1</sup>	418.337	ERIA (2007)
Pengangkutan TBS	kg CO <sub>2</sub> e Mg FFB <sup>-1</sup>	4,0154	
Pengolahan TBS Bahan bakar solar	kg CO <sub>2</sub> e Mg FFB <sup>-1</sup>	1,2046	
POME	kg CO <sub>2</sub> e Mg FFB <sup>-1</sup>	225	
CPO hingga pengolahan minyak sawit olahan	kg CO <sub>2</sub> e Mg RFP-1	31,19	

Tabel L3.4. Perdagangan dan pasar kelapa sawit\*

Variabel	Unit	Nilai	Sumber
CPO (grand total)	ton CPO	44.756.945	TRASE (2020)
Fraksi ekspor minyak sawit olahan	ton CPOe	53%	
Konsumsi domestik	ton CPOe	17.836.535	

<sup>\*</sup>Seluruh data yang disajikan adalah data tahun 2020

cifor-icraf.org

cifor.org | worldagroforestry.org

#### **CIFOR-ICRAF**



